

**MANAJEMEN KELEMBAGAAN DAN PENGELOLAAN
TEMPAT PELELANGAN IKAN UNTUK MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN NELAYAN DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM DI WILAYAH PULAU BAAI, KOTA
BENGKULU**



Oleh :
Mardian Suryani
Nim: 18913054

TESIS

Diajukan Kepada
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk Memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi

YOGYAKARTA
2020

**MANAJEMEN KELEMBAGAAN DAN PENGELOLAAN
TEMPAT PELELANGAN IKAN UNTUK MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN NELAYAN DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM DI WILAYAH PULAU BAAI, KOTA
BENGKULU**



Oleh :
Mardian Suryani
Nim: 18913054

TESIS

Diajukan Kepada
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk Memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi

YOGYAKARTA
2021

**MANAJEMEN KELEMBAGAAN DAN PENGELOLAAN
TEMPAT PELELANGAN IKAN UNTUK MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN NELAYAN DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM DI WILAYAH PULAU BAAI, KOTA
BENGKULU**



Oleh :
Mardian Suryani
Nim: 18913054

Pembimbing:
Dr. Drs. Yusdani, M.Ag

TESIS

Diajukan Kepada
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk Memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi

YOGYAKARTA
2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mardian Suryani

NIM : 18913054

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Judul Tesis : **Manajemen Kelembagaan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan dalam Perspektif Ekonomi Islam di Wilayah Pulau Baai, Kota Bengkulu.**

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya, kecuali bagian yang dirujuk pada sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis merupakan hasil plagiasi terhadap karya orang lain, maka saya bersedia bertanggung jawab atasnya dan saya siap mendapatkan sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 13 Oktober 2020

Yang menyafakan,

Mardian Suryani



PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

J. Dongsongan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523057

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER

Website : master.islam.i2i.ac.id
Email : master@i2i.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 2032/PS-IAIPM/Peng./I/2021

TESIS berjudul : **MANAJEMEN KELEMBAGAAN DAN PENGELOLAHAN TEMPAT PELELANGAN IKAN UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN NELAYAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI WILAYAH PULAU BAAL, KOTA BENGKULU**

Ditulis oleh : Mardian Suryani

N. I. M. : 18913054

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ekonomi.

Yogyakarta, 26 Januari 2021



TIM PENGUJI TESIS



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM





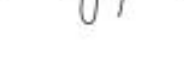
PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai 8 YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0271) 523337

Website : master.iainic.uii.ac.id
Email : mas@uic.ac.id

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Mardian Suryani
Tempat/tgl lahir : Bengkulu, 01 Maret 1996
N. I. M. : 18913054
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul Tesis : **MANAJEMEN KELEMBAGAAN DAN PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN NELAYAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI WILAYAH PULAU BAAL, KOTA BENGKULU**

Ketua : Dr. Dra. Rahmani Timorita Y., M.Ag ()
Sekretaris : Dr. Dra. Junanah, MIS. ()
Pembimbing : Dr. Drs. Yusdani, M.Ag. ()
Penguji : Dr. Anton Priyo Nugroho, SE., MM. ()
Penguji : Dr. Nurkholis, S.Ag., SEI., M.Sh.Ec.. ()

Diuji di Yogyakarta pada Selasa, 19 Januari 2021

Pukul : 15.30 – 16.30

Hasil : **Lulus**

Mengetahui
Ketua Program Studi
Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII




Junanah, MIS

NOTA DINAS



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER

Jl. Demangan Baru No. 20 Lantai 8 YOGYAKARTA
Telp dan Fax 102741 523637

Website : master.iainic.uii.ac.id
Email : ma@uii.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 2032/PS-IAIPM/Peng./I/2021

TESIS berjudul : **MANAJEMEN KELEMBAGAAN DAN PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN NELAYAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI WILAYAH PULAU BAAI, KOTA BENGKULU**

Ditulis oleh : Mardian Suryani

N. I. M. : 18913054

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ekonomi.

Yogyakarta, 26 Januari 2021



PERSETUJUAN

Judul Tesis : **Manajemen Kelembagaan dan Pengelolaan Tempat
Pelangan Ikan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan
Nelayan dalam Perspektif Ekonomi Islam di Wilayah
Pulau Baai, Kota Bengkulu.**

Nama : Mardian Suryani

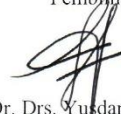
NIM : 18913054

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Magister Ilmu Agama
Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 13 Oktober 2020

Pembimbing



Dr. Drs. Yurdani, M.Ag

PERSEMBAHAN

Tesis ini akan ku persembahkan kepada:

Kedua orang tua ku Suryadin dan Sunratul Aini
yang telah mengasuh mendidik dan membesarkan dengan penuh cinta
dan kasih sayang serta doa untuk ku.

Almamater Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta



MOTTO

يُدَبِّرُ الْأُمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ

مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ﴿٥﴾

Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu.¹

الجمعة الامتداد الاندو

¹Q,S As-Sajdah: 5. Dikutip dari Tim Syghma Media Inovasi, *Kementerian Agama RI: Alquran Terjemahan dan Tajwid*, (Jawa Barat: 2014), hlm. 415

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB-LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI,
Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI
No. 158/1987 dan No.0543 b/U/1987
Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	<i>B</i>	-
ت	Tâ	<i>T</i>	-
ث	Sâ	<i>Š</i>	S (dengan titik di atas)
ج	Jîm	<i>J</i>	-
ح	Hâ'	<i>Ĥa'</i>	H (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	<i>Kh</i>	-
د	Dâl	<i>D</i>	-
ذ	Zâl	<i>Ž</i>	Z (dengan titik di atas)
ر	Râ'	<i>R</i>	-
ز	Zâ'	<i>Z</i>	-
س	Sîn	<i>S</i>	-
ص	Syîn	<i>Sy</i>	-
ض	Sâd	<i>Š</i>	S (dengan titik di bawah)
ط	Dâd	<i>Ď</i>	D (dengan titik di bawah)
ظ	Tâ'	<i>Ṭ</i>	T (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	<i>Ẓ</i>	Z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma di atas
غ	Gaîn	<i>G</i>	-
ف	Fâ'	<i>F</i>	-
ق	Qâf	<i>Q</i>	-
ك	Kâf	<i>K</i>	-
ل	Lâm	<i>L</i>	-
م	Mîm	<i>M</i>	-
ن	Nûn	<i>N</i>	-
ه	Wâwu	<i>W</i>	-
و	Hâ'	<i>H</i>	-
ء	Hamzah	-	Apostrof
ي	Yâ'	<i>Y</i>	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	' <i>iddah</i>

III. Ta' marbūtah di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya. Kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karâmah al-auliyâ</i>
--------------------------	---------	--------------------------

- c. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakat al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

-----َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
-----ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	-I
-----ُ	<i>Dammah</i>	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	Â
جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	<i>Jâhiliyah</i>
<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	Â
تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansâ</i>
<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	Î
كَرِيمٌ	Ditulis	<i>karîm</i>
<i>Dammah + wawu mati</i>	Ditulis	Û
فُرُوضٌ	Ditulis	<i>Furûd</i>

VI. Vokal Rangkap

1	<i>Fathah + Ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	<i>Fathah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandan *alif + Lam*

a. Bila di ikuti huruf *qomariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyâs</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamisiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*-nya

السماء	Ditulis	<i>As-Samâ'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furûd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

MANAJEMEN KELEMBAGAAN DAN PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN NELAYAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI WILAYAH PULAU BAAI, KOTA BENGKULU

Mardian Suryani

Nim: 18913054

Tempat Pelelangan Ikan memiliki peran yang sangat penting dalam upaya mengoptimalkan hasil kelautan untuk itu perlu dikelola dengan sebaik-baiknya agar tercapai manfaat secara optimal. Pentingnya pengimplementasian manajemen Pengelolaan yang baik demi meningkatkan daya guna hasil potensi kelautan yang dimiliki agar dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan jenis studi lapangan (*field reseach*). Pengumpulan data dengan metode observasi, dokumentasi dan wawancara yang kemudian dianalisis dengan menggunakan fungsi-fungsi manajemen. Penelitian ini menggunakan teori fungsi manajemen dari G.R Terry yang terdiri dari Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan dan Pengawasan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan manajemen Pengelolaan di TPI Pulau Baai belum berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil kesimpulan. *Pertama*, manajemen perencanaan yaitu tidak ada standar operasional prosedur (SOP) yang jelas untuk manajemen pelelangan ikan Pulau Baai. *Kedua*, aspek pengorganisasian tidak ada struktur organisasi di dalam pelelangan ikan sehingga tidak ada yang bertanggung jawab penuh atas tugas dan peran yang ada dilapangan. *Ketiga*, manajemen pelaksanaan belum terpenuhinya pendapatan retribusi yang ditargetkan TPI Pulau Baai dalam satu tahun. *Keempat*, manajemen pengawasan tidak adanya nya sanksi yang tegas dari pihak terkait seperti Dinas Kelautan Perikanan dan Pemimpinan TPI terhadap kapal-kapal yang membongkar ikan secara illegal di TPI Pulau Baai . (2) Pengelolaan sistem lelang ikan di TPI Pulau Baai ditinjau dari perspektif ekonomi Islam: Sistem lelang Ikan di TPI Pulau Baai Bengkulu dilakukan berdasarkan asas kerelaan antara nelayan (pemilik kapal) dan para pedagang pengumpul (pembeli) karena dilakukan berdasarkan prosedur kesepakatan tentang sistem lelang, sehingga menurut pengamatan peneliti tidak ada aturan syariat yang dilanggar oleh pihak TPI Pulau Baai Bengkulu.

Kata Kunci: *Manajemen Pengelolaan, Tempat Pelelangan Ikan, Kesejahteraan, Ekonomi Islam.*

ABSTRACT

INSTITUTIONAL MANAGEMENT OF FISH AUCTION TO IMPROVE FISHERMAN WELFARE IN BAAI ISLAND, BENGKULU CITY THROUGH ISLAMIC ECONOMICS

Mardian Suryani
Student ID Number: 18913054

The pivotal role of Fish Auction in optimizing marine products makes it necessary to ensure its best management as a way to achieve optimal benefits. A good management of Fish Auction is mainly aimed at increasing the existing marine potential effectively for proper management and utilization. This is a field research using descriptive qualitative approach. Data were collected by means of observation, documentation, and interviews to be analyzed using management functions. This research uses the theory of management functions by G.R Terry, which consists of planning, organizing, implementing and controlling. The results of this study indicate that: (1) the management system at the Baai Island TPI is less well implemented. The study reveals that: First, in terms of planning management, there is no clear standard operating procedure (SOP) for the management of the Pulau Baai fish auction. Second, in terms of the organizational aspect, there is no organizational structure in the fish auction so that no one is fully responsible for the existing duties and roles in the field. Third, the management implementation has yet to fulfil the annual target of retribution revenue set by TPI Pulu Baai. Fourth, the supervisory management does not have strict sanctions from related parties, such as the Marine, Fishery, and Fisheries Service Office for vessels unloading fish illegally at TPI Pulau Baai. (2) as seen from the perspective of Islamic Economics, the management system of the Fish Auction of TPI Pulau Baai indicates the following points: The fish auction system at TPI Pulau Baai Bengkulu is carried out based on the principle of willingness between fishermen (ship owners) and collecting traders (buyers) because it is carried out based on agreed procedures regarding the auction system. Therefore, according to the researchers' observations, there were no violations of sharia rules by the TPI Pulau Baai Bengkulu.

Keywords: *Management, Fish Auction, Welfare, Islamic Economics.*

December 30, 2020

TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله ، اشهد ان لا اله الا الله واحده لا شريك له، و اشهد ان محمد عبده ورسوله، لا نبي بعده

Alhamdulillahillobbil'alamin, Puji dan syukur ke hadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Manajemen Kelembagaan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan dalam Perspektif Ekonomi Islam di Wilayah Pulau Baai, Kota Bengkulu”**

Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW yang menjadi uswatun hasanah bagi kita semua. Amin. Dalam proses penyusunan tesis ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun spiritual. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terima kasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT, kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. Rahmani Timorita Yulianti., M.Ag selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

4. Dr. Junanah, MSI, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Dr. Drs. Yusdani, M.Ag, selaku dosen pembimbing tesis atas segala bimbingan serta arahan yang diberikan.
6. Seluruh Dosen di Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan kontribusi pemikiran dan wawasan selama peneliti kuliah di Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Segenap pejabat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu, terutama Pangkalan Pendaratan Ikan Pulau Baai Provinsi Bengkulu, yang telah banyak memberikan kontribusi dalam menyelesaikan penelitian ini.
8. Kedua orang tua ku ayah Suryadin dan ibu Sunratul Aini, yang telah mengasuh mendidik dan membesarkan dengan penuh cinta dan kasih sayang serta doa untuk ku. Semoga aku bisa menjadi kebanggaan ayah ibu dan bisa membahagiakan kalian. Amin
9. Kepada kakak ku Gustiya Sunarti, Fidhia Andani dan Adikku Meysarah, Lia Anggaraini serta orang-orang terdekatku yang selalu memberikan motivasi, *support* dan bimbingan kepadaku.
10. Debis Kawer Kansen, S.E yang selalu memberikan motivasi dan semangat untuk ku. Semoga selalu diberikan kelancaran disetiap urusan.
11. Teman-Teman yang memberikan *support* dan dukungan, Dhiyaul Aulia Zulni, Galih Aisia, Aulia Rahmi, Nurma Rosmitha, Ajeng Retno Wijaya, Zeena

Aman, Bima, Micio, Mas Indra, Mas Iqbal, dll. Semoga selalu dalam Lindungan Allah.

12. Keluarga Besar Universitas Islam Indonesia, terkhusus teman-teman seperjuangan di kelas Ekonomi Islam Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia angkatan 2018/2019 yang telah memberikan semangat dan telah mewarnai kehidupan peneliti selama berada di Kota Yogyakarta.

13. Seluruh keluarga besar Provinsi Bengkulu yang menimba ilmu di Yogyakarta yang memberikan doa dan *support* kepada peneliti.

Dalam penulisan tesis ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi perbaikan kedepan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis khususnya dan umumnya kepada kita sekalian.

Yogyakarta, 13 November 2020

Peneliti



Mardian Suryani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
TIM PENGUJI TESIS	iv
NOTA DINAS	v
PERSETUJUAN	vi
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Sistematika Pembahasan	12
BAB II. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI	14
A. Kajian Penelitian Terdahulu	14
B. Kerangka Teori	28
1. Kesejahteraan	28
2. Manajemen Pengelolaan Dalam Islam	35
3. Jual Beli Lelang	43
4. Tempat Pelelangan Ikan	49
5. Ekonomi Islam	50

BAB III. METODE PENELITIAN	57
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	57
B. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	58
C. Informan Penelitian.....	58
D. Teknik Penentuan Informen	58
E. Teknik Pengumpulan Data	59
1. Melalui Observasi	59
2. Metode Wawancara.....	60
3. Metode Dokumentasi	61
F. Keabsahan Data	61
G. Teknik Analisis Data	62
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	65
A. Profile UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan dan Tempat Pelelangan Ikan (PPI dan TPI) Pulau Baai Kota Bengkulu.	65
B. Data Informen Penelitian	73
C. Aktivitas Tempat Pelelangan Ikan Pulau Baai Kota Bengkulu:....	75
D. Manajemen Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan Pulau Baai Kota Bengkulu untuk Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan:	77
E. Analisis Pengelolaan Sistem Lelang Ikan di TPI Pulau Baai Bengkulu Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam.	95
BAB V. PENUTUP.....	103
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran	105
Daftar Pustaka	106
Lampiran	I

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin Provinsi Bengkulu, 4
Tabel 2	: Perbedaan dan Persamaan Penelitian, 24
Tabel 3	: Tahapan Keluarga berdasarkan Indikator, 33
Tabel 4	: Sarana dan Prasarana TPI Pulau Baai, 72
Tabel 5	: Jenis Kapal Menurut Ukuran, 74
Tabel 6	: Jenis Alat Tangkap, 74
Tabel 7	: Jenis Ikan Dominan yang di Tangkap, 75
Tabel 8	: Daftar Informen, 76
Tabel 9	: Rekapitulasi Potensi dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2020 UPTD Pelabuhan Perikanan Pulau Baai, 86
Tabel 10	: Temuan Lapangan, 93

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara kepulauan dengan kawasan maritim yang sangat luas dan landasan kontinental yang besar. Kepulauan Indonesia mendapat air lautan dari Samudera India dan Samudra Pasifik yang disebabkan oleh adanya (*romasell Current*) yaitu aliran bawah laut ekuator di kedalaman 40-100 m dan kira-kira lebarnya 300 km.¹

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang luas dan strategis, memiliki sumber daya alam yang kaya akan keberanekaragaman hayati, baik di darat maupun di perairan tawar dan laut. Berdasarkan data yang terukur, Indonesia memiliki 95.181 km panjang garis pantai dengan kurang lebih 50 juta luas zona ekonomi eksklusif. Indonesia terdiri dari 5 buah pulau seperti Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi dan Papua. Pulau Indonesia dua pertiganya adalah laut yang di dalamnya terdapat kekayaan keanekaragaman hayati yang tersebar mulai dari laut sampai dengan pemukiman.¹

Besarnya potensi kelautan ternyata tidak diikuti oleh kesejahteraan masyarakat nelayan. Problem yang terlihat pada kondisi sosial ekonomi nelayan kita sangat jauh berbeda dengan potensi sumberdaya alamnya. Pada kenyataannya kondisi masyarakat nelayan atau masyarakat pesisir merupakan kelompok

¹Mukayat D Brotowidoyo, *Pengantar Lingkungan Perairan dan Budidaya Air* (Yogyakarta: Liberty, 1995), hlm. 115

¹I Nyoman Sumera Naitja, *Managemen Sumber Daya Perikanan*, (Bogor: IPB Press, 2010), hlm. 01.

masyarakat yang relative tertinggal secara ekonomi, sosial. Pada hakikatnya masyarakat nelayan identik dengan masyarakat yang miskin. Kusnadi dalam bukunya Akar Kemiskinan Nelayan, secara factual ada dua faktor yang menyebabkan kemiskinan pada masyarakat nelayan, yaitu faktor *alamiah* dan *non alamiah*. Faktor *alamiah* disebabkan karena *fluktuasi* musim tangkap ikan dan struktur *alamiah* sumber daya ekonomi desa. Sementara faktor *non alamiah* berhubungan dengan keterbatasan daya jangkau teknologi penangkapan ikan, ketimpangan dalam system bagi hasil dan tidak adanya jaminan sosial tenaga kerja, lemahnya penguasaan jaringan pemasaran hasil tangkapan dan belum berfungsinya koperasi nelayan yang ada.

Potensi pembangunan yang berbasis sumber daya kelautan dan perikanan merupakan domain ekonomi Departemen Kelautan dan Perikanan adalah pendayagunaan sumber daya perikanan tangkap dan budidaya, baik laut maupun perairan umum, industri pengelolaan hasil perikanan, bioteknologi laut dan perairan tawar, benda berharga serta pengelolaan pulau-pulau kecil. Salah satu kebutuhan yang mutlak diperlukan untuk memajukan kegiatan industri perikanan dan merealisasikan program peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir adalah dengan menyediakan prasarana pelabuhan perikanan yang memadai.

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau Kecil menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Sebagaimana berdasarkan perundang-undangan ini, disebutkan juga bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah suatu pengoodinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian

sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh pemerintah daerah, antar sektor, antar ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.²

Provinsi Bengkulu yang terletak di bagian pantai barat pulau Sumatera dan berhadapan langsung dengan samudera Hindia, dengan garis pantai sepanjang ±525 km yang memanjang dari tenggara ke arah barat daya, mulai dari kabupaten Kaur yang berbatasan dengan provinsi Lampung hingga kabupaten Muko-muko yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat, memiliki potensi sumber wilayah pesisir dan lautan yang cukup besar dari perspektif kemaritiman, baik potensi kelautan dan perikanan, pariwisata, perhubungan dan maupun potensi energy serta sumber daya mineral.

Wilayah pesisir di provinsi Bengkulu mencakup 6 (enam) kabupaten dan 1 (satu) kota. Hal ini menunjukkan, bahwa sebaran penduduk Bengkulu sebagian besar berada di desa-desa pesisir tersebut. Disisi lain juga dapat dilihat bahwa sepanjang pesisir pantai provinsi Bengkulu ini menjadi penyumbang angka kemiskinan yang cukup besar. Hal tersebut ditandai dengan permukiman yang kumuh akibat dari tingkat kesejahteraan masyarakat yang rendah. Sumber penghidupan yang sangat terbatas ditambah dengan kualitas SDM yang rendah menambah permasalahan yang dihadapi oleh kawasan pesisir ini. Belum lagi dengan bencana alam yang kerap terjadi serta ketergantungan nelayan terhadap iklim, membuat sumber penghidupan masyarakat menjadi sangat terbatas. Angka

²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun, 2014.

kemiskinan di provinsi Bengkulu pada bulan maret tahun 2017 masih cukup tinggi, yaitu 316.980 Orang (16.45%) (BPS Provinsi Bengkulu, 2017).³

Tabel 1

Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin Provinsi Bengkulu Maret 2019
Tahun 2019

Provinsi	Persentase
Aceh	15.32%
Sumatera Utara	8.83%
Sumatera Barat	6.42%
Riau	7.08%
Jambi	7.60%
Sumatera Selatan	12.71%
Bengkulu	15.23%
Lampung	12.62%
Bangka Belitung	4.62%
Kapulauan Riau	5.90%

Sumber data: Data Skunder⁴

Tabel diatas menggambarkan kondisi kemiskinan di Provinsi Bengkulu yang tersebar di Sembilan kabupaten dan satu Kota. Tingkat kemiskinan dikota Bengkulu mencapai angka presentase sebesar 15.32%, yang tersebar di Sembilan kecamatan sepanjang wilayah kota Bengkulu. Tetapi provinsi Bengkulu memiliki potensi perikanan yang cukup besar yang apabila dimanfaatkan dengan optimal akan menjadi modal dalam mengatasi permasalahan kemiskinan.

Provinsi Bengkulu yang terletak di pantai Barat Pulau Sumatera, memiliki potensi sumberdaya kelautan, perikanan, dan kemaritiman yang cukup besar untuk dikelola dan dikembangkan sebagai salah satu sumber pertumbuhan daerah.

³Rencana Aksi Daerah Pengembangan Ekonomi Kemaritiman di Provinsi Bengkulu Tahun 2017.

⁴Bengkulu BPS, *Provinsi Bengkulu dalam Angka*, dikutip dari Bengkulu, BPS. Go. Id, Pada 24 Desember 2019, pukul 20:39 WIB

Wilayah provinsi Bengkulu memiliki garis pantai sepanjang ± 525 km. laut territorial sampai batas 12 mil ($525 \text{ km} \times 12 \text{ mil} \times 1,852 \text{ km} = 1.667,6 \text{ km}^2$) atau setara dengan 1.166.760 hektar. Jika dihitung sampai batas perairan laut ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia), maka luas perairan laut Provinsi Bengkulu adalah $525 \text{ km} \times 200 \text{ mil} \times 1,853 \text{ km} = 194.460 \text{ km}^2$ yang setara dengan 19.446.000 hektar. Bandingkan dengan luas daratan Provinsi Bengkulu yaitu 19.795.515 hektar, maka luas perairan laut yang dapat dimanfaatkan potensinya untuk kepentingan pembangunan ekonomi dalam perspektif kemaritiman jauh lebih luas yang jika dikelola dan dikembangkan maka dapat memajukan perekonomian daerah dan mensejahterakan masyarakat, khususnya yang berada di wilayah pesisir⁵.

Melihat adanya potensi kelautan yang cukup besar maka sangat penting untuk mengelola seluruh hasil laut agar menjadikannya sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang juga sebagai salah satu sumber penghidupan masyarakat sekitar. Untuk mendukung pengoptimalisasian maka disediakan sarana prasarana laut, seperti pangkalan pendaratan ikan dan tempat pelelangan ikan. Hal ini agar mempermudah para nelayan untuk mendaratkan serta menjual hasil tangkap perikanan. Tidak terkelolanya fasilitas secara baik mengakibatkan ketidak efektifan proses pengoptimalisasian dari hasil potensi kelautan sehingga menjadi penyebab kurang terserapnya semua hasil potensi kelautan yang dimiliki.

Tempat pelelangan ikan memiliki peran yang sangat penting dalam upaya mengoptimalisasi hasil kelautan untuk itu perlu dikelola dengan sebaik-baiknya

⁵Kegiatan Rencana Aksi Daerah Pengembangan Ekonomi Kemaritiman di Provinsi Bengkulu, diakses pada tanggal 19 Agustus 2020, pukul, 10:30 Wib.

agar tercapai manfaat secara optimal. Tempat Pelelangan Ikan memberikan kontribusi dan manfaat bagi para nelayan untuk menjaga kestabilan harga jual. Tempat pelelangan ikan merupakan salah satu fungsi utama dalam kegiatan perikanan dan juga merupakan salah satu faktor yang menggerakkan dan meningkatkan usaha dan kesejahteraan nelayan. Adanya TPI (Tempat Pelelangan Ikan) memberikan kontribusi dan manfaat bagi para nelayan untuk menjaga kestabilan harga jual. TPI membantu nelayan dari cengkraman dan jeratan para tengkulak yang membeli ikan dengan harga di bawah standar yang telah ditentukan.⁶ Pelelangan ikan ini antara lain bermanfaat untuk meningkatkan nilai jual ikan hasil tangkapan nelayan, menjaga kualitas ikan, sehingga dapat mengubah taraf hidup nelayan kearah yang lebih sejahtera.

Pentingnya pengimplementasian manajemen pengendalian yang baik demi meningkatkan daya guna hasil potensi kelautan yang dimiliki agar dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. Manajemen merupakan sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dengan adanya suatu manajemen pengelolaan yang dilaksanakan oleh pengelola TPI Pulau Baai melalui berbagai rangkaian program yang seharusnya didukung oleh sejumlah nelayan. Mulai dari rencana dengan melihat situasi lingkungan hingga diakhiri dengan evaluasi, sehingga tiap program dapat

⁶*Ibid.*

terlaksana dengan baik. Pengelola TPI Pulau Baai merupakan unsur yang terkait dalam mengatur pemasaran hasil tangkap nelayan. Mereka adalah bagian dari system kelembagaan dalam perikanan yang turut menentukan kesejahteraan nelayan. Proses peningkatan keberdayaan nelayan menuntut peran mereka dalam mengelola sumber daya perikanan.

Kota Bengkulu dipilih peneliti sebagai lokasi penelitian ini karena memiliki potensi perikanan yang sangat besar, hal ini dapat dijadikan salah satu sumber pendapatan daerah yang besar apabila dapat dikelola dengan baik. Salah satu cara mengelolah dan mendistribusikan hasil perikaan didirikan Tempat Pelelanangan Ikan (TPI). Salah satu TPI yang berada di Kota Bengkulu yaitu TPI Pulau Baai yang beradah dibawah UPT Pelabuhan Perikanan Pulau Baai provinsi Bengkulu. Masyarakat TPI Pulau Baai juga mulai menyadari perlunya kehadiran lembaga keuangan yang dapat mengelola dana masyarakat.

Pada Tempat Pelelengan Ikan Pulau Baai terdapat 2 (dua) koperasi, dan satu lembaga keuangan Bank BRI tempat nelayan menabung. Hal ini menandakan bahwa masyarakat memperoleh kemudahan untuk dapat memperoleh jasa koperasi dengan jarak yang dekat dan dapat memenuhi kebutuhan nelayan. Selain itu juga, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bagi masyarakat nelayan di Tempat Pelelengan Ikan Pulau Baai Juga terdapat pasar tradisional dimana masyarakat nelayan dapat melakukan transaksi jual beli bahan pangan dan ikan khususnya di pasar tersebut. Mangsa pasarnya juga tidak hanya masyarakat sekitar, tetapi juga masyarakat dari berbagai tempat di Kota Bengkulu.

Pada dasarnya sistem dari Tempat Pelelangan Ikan ialah suatu pasar melalui penawaran umum (lelang), lelang merupakan penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang. Sebelum ada sistem pelelangan ikan nelayan menjual sendiri hasil tangkapannya kepada konsumen setempat dengan cara barter atau dengan nilai uang tertentu. Namun, kegiatan ini tidak terorganisir dengan baik dan kurang efisien serta tidak menjaga mutu ikan hal ini membuat harga ikan cenderung menurun.

Melihat kenyataan ini, maka diupayakan adanya perubahan dalam hal pemasaran ikan. Ikan-ikan hasil tangkapan nelayan harus dijual dengan cara lelang sehingga harga tidak hanya ditentukan oleh pembeli dan mutu ikan dapat dipertahankan serta nilai jual yang diperoleh nelayan menjadi lebih besar. Untuk memperlancar proses pelelangan ikan ini, pemerintah telah membangun tempat pelelangan ikan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan bongkat muat dan pasar ikan beserta fasilitas lainnya yang disediakan. Tempat pelelangan ikan merupakan sentral tempat pelelangan ikan. Adanya TPI (Tempat Pelelangan Ikan) memberikan kontribusi dan manfaat bagi para nelayan untuk menjaga kestabilan harga jual. TPI membantu nelayan dari cengkraman dan jeratan para tengkulak yang memberi ikan dengan harga di bawah standar yang telah ditentukan.⁷ Pelelangan ikan ini antara lain bermanfaat untuk meningkatkan nilai jual ikan

⁷*Ibid.*

hasil tangkapan nelayan sehingga dapat mengubah taraf hidup nelayan kearah yang lebih sejahtera.

Setelah melakukan observasi di tempat Pelelangan Ikan Pulau Baai peneliti menemukan berbagai masalah terkait manajemen pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan di Pulau Baai. *Pertama*, dari segi teknis perencanaan tidak adanya Peraturan Khusus dalam Manajemen Pengelolaan pelelangan ikan. Tidak ada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang matang untuk Manajemen Pelelangan Ikan Pulau Baai. *Kedua*, dari segi Pengorganisasian tidak ada anggaran yang khusus diberikan Dinas Kelautan untuk operasional pelelangan ikan. Kurangnya kerjasama diantara staff karyawan kepelabuhan dan para nelayan yang mengelolah Tempat Pelelangan Ikan dimana tidak ada struktur organisasi di dalam pelelangan ikan sehingga tidak ada yang bertanggung jawab penuh atas tugas dan peran yang ada dipelalangan. Hal tersebut menyebabkan pelelangan tidak berjalan dengan efektif. *Ketiga*, dari segi pelaksanaan Pendapatan Masyarakat nelayan dan pencapaian retribusi TPI Pulau Baai. *Keempat*, terdapat juga masalah dari segi pengendalian, kurangnya pengawasan dari pihak terkait sehingga di TPI masih banyak Kapal Ilegal (kapal yang tidak memiliki izin) yang mendaratkan hasil tangkapannya di TPI Pulau Baai.

Dari latar belakang yang telah penulis paparkan di atas maka penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai : **“Analisis Kelembagaan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Wilayah Pulau Baai, Kota Bengkulu.”**

B. Pertanyaan Penelitian:

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka pertanyaan dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Sistem Manajemen Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan Pulau Baai Kota Bengkulu untuk Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan?
2. Bagaimana Pengelolaan Sistem Lelang Ikan di TPI Pulau Baai ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari beberapa pertanyaan di atas maka Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menganalisis Bagaimana Sistem Kelembagaan dan Strategi Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan Pulau Baai Kota Bengkulu untuk Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan dalam Perspektif Ekonomi Islam.
- b. Menganalisis Bagaimana Pengelolaan Sistem Lelang Ikan di TPI Pulau Baai ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian dengan judul: **“Analisis Kelembagaan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Wilayah Pulau Baai, Kota Bengkulu.”** ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini menjadi bentuk kontribusi bagi Tempat Pelelangan Ikan lain dalam meningkatkan Kesejahteraan nelayan. Dari hasil penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai Informasi baru tentang akan pentingnya sebuah Strategi TPI Pulau Baai untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dalam perspektif Ekonomi Islam yang menjadikannya sebagai instrument sosial dan ekonomi yang membebaskan nelayan dari kemiskinan, serta meningkatkan perekonomian masyarakat.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberi manfaat berarti bagi:

1) Bagi Praktisi

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan tentang pentingnya sebuah Strategi TPI dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan yang dapat membebaskan nelayan dari kemiskinan dengan Ekonomi Islam sebagai tinjauannya.

2) Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah teori tentang strategi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan dapat menjadi sumber rujukan bagi akademisi lainnya yang tertarik membahas tentang peningkatan kesejahteraan.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematis pembahasan dalam penelitian ini secara garis besar dibagi menjadi lima bab yang berdiri sendiri namun saling berhubungan. Di dalam masing-masing bab terdapat sub bab yang tidak dapat dipisahkan sebagai berikut:

Bab I Pada bab ini peneliti membaginya menjadi enam bagian yaitu, Latar Belakang masalah yang menggambarkan problematika yang terkait dengan permasalahan penelitian ini, Rumusan Masalah yang menjadi pokok permasalahan pada penelitian, Tujuan Penelitian dan manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, Kajian terhadap Penelitian Terdahulu yang menjelaskan persamaan dan perbedaan topik penelitian dengan penelitian lainnya, dan Sistematika Penelitian. Teori yang berkaitan dengan topik penelitian yang diambil akan dijelaskan pada bab 2.

Bab II Bab kedua membahas mengenai kerangka teori yang berupa tinjauan umum mengenai Kesejahteraan, Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam, Manajemen Pengelolaan dalam Islam, Jual beli lelang dan Ekonomi Islam. Agar penelitian lebih terstruktur, maka metode penelitian yang digunakan oleh peneliti akan dijelaskan pada bab 3.

Bab III dalam bab ini membahas mengenai penjelasan dari Metode Penelitian, yang berisikan Pendekatan dan Jenis Penelitian, Penjelasan Judul, Tempat dan Waktu Penelitian, Informan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Keabsahan Data dan Teknik Analisis Data, setelah permasalahan penelitian, teori dan metode telah

ditetapkan, maka hasil penelitian dan analisis akan dijelaskan pada bab 4.

Bab IV Dalam bab ini penulis menganalisis Manajemen Kelembagaan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pulau Baii untuk meningkatkan Kesejahteraan Nelayan dalam Perspektif Ekonomi Islam, yang kemudian menjabarkan hasil penelitian yang mengacu pada rumusan masalah. Dari pemaparan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan pertanyaan penelitian yang akan dijelaskan pada bab 5.

Bab V Penutup, bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini yang memuat kesimpulan dan saran, pada sub bab kesimpulan penulis akan menyimpulkan yang berdasar pada rumusan masalah yang akan penulis uraikan secara singkat, padat dan jelas sehingga mudah untuk dipahami namun bersifat menyeluruh. Sedangkan pada bagian saran akan dicantumkan saran untuk Manajemen Pengelolaan TPI dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan maupun untuk peneliti selanjutnya agar mendapatkan hasil yang lebih sempurna.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Agar penelitian ini tidak tumpang tindih dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lainnya, maka dalam hal ini perlu dilakukan telaah kepustakaan berupa kajian terhadap penelitian sebelumnya, supaya dapat dijadikan pembeda untuk penelitian ini.

Pertama, penelitian yang dilakukan Meri Enita Puspita Sari dan Diah Ayu Pratiwi, yang berjudul “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Hidup Masyarakat Suku Laut Pulau Bertam Kota Batam*”. Penelitian ini fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan hidup nelayan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas hidup dan kesejahteraan sosial masyarakat suku laut pulau Bertam dipengaruhi oleh perubahan hidup yang mereka jalani. Masyarakat nelayan masih menggunakan alat tradisional dan sangat bergantung kepada hasil tangkapan ikan, mereka hidup dalam kondisi yang sangat kekurangan, hal ini dapat dilihat dari kualitas air yang diperoleh, peralatan tangkapan ikan dan rumah yang mereka tempati tidak memadai. Dari segi sosial diketahui bahwa masyarakat suku laut tidak melakukan aktivitas kemasyarakatan secara bersama.¹

¹Meri Enita Puspita Sari dan Diah Ayu Pratiwi, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Hidup Masyarakat Suku Laut Pulau Batam Kota Batam”, *Jurnal Trias Politika*, Vol. 02, No. 02, Oktober 2018.

Kedua, penelitian yang Berjudul “*Dinamika Kehidupan Sosial Ekonomi Nelayan Desa Sirnobojo Kabupaten Pacitan Tahun 1998-2014*” oleh Sinta Rahayu, Jayusman dan Romadi, Penelitian ini berangkat dari permasalahan masyarakat nelayan di desa Sirnolobo yang banyak mengalami perubahan sosial ekonominya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan ini terjadi seiring dengan adanya kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Upaya-upaya baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun dari kalangan masyarakat nelayan itu sendiri di sambut baik oleh pemerintah pusat, sehingga menaruh harapan besar dari kalangan masyarakat nelayan untuk terus melakukan usaha agar kehidupan masyarakat menjapai kesejahteraan.²

Ketiga, penelitian dari Rierti Triyanti dan Maulana Firdaus, yang berjudul “*Tingkat Kesejahteraan Nelayan Skala Kecil Dengan Pendekatan Penghidupan Berkelanjutan di Kabupaten Indramayu*” penelitian ini berangkat darimasalah kabupaten Indramayu yang memiliki jumlah rumah tangga menengah kebawah paling banyak di Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan nelayan di kabupaten Indramayu tergolong pada tingkat sedang. Rendahnya permodalan disebabkan oleh ketergantungan masyarakat nelayan kepada tengkulak yang menyebabkan lemahnya kases nelayan terhadap ekonomi maupun kelmbagaan sosial diantara nelayan.³

²Sinta Rahayu, Jayusman dan Romadi, “Dinamika Kehidupan Sosial Ekonomi Nelayan Desa Sirnobojo Kabupaten Pacitan Tahun 1998-2014”, *Journal of Indonesian Histori*, Vol. 06, No. 01, Oktober 2017.

³Riesti Triyanti dan Maulana Firdaus, “Tingkat Kesejahteraan Nelayan Skala Kecil Dengan Pendekatan Kehidupan Berkelanjutan di Kabupaten Indramayu”, *Jurnal Ekonomi*, Vol. 11, No. 01, Juni 2016.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Annisa Ilmi Faried dan Diwayana Putri Nasution, dengan judul “*Analisis Strategi Peningkatan Kesejahteraan Nelayan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Desa Pahlawan Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara*”. Penelitian ini fokus pada strategi pemerintah dalam mengatasi kesejahteraan masyarakat Pesisir dalam upaya pembangunan pesisir. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu adanya pembangunan fasilitas, pengembangan keterampilan, pembangunan prasarana, penguasaan teknologi. Dengan adanya strategi ini diharapkan dapat menjadi solusi dengan menempatkan system sosial dan ekonomi serta nilai budaya menjadi faktor pendorong perubahan masyarakat pesisir.⁴

Kelima, Penelitian yang berjudul “*Kebijakan Pembiayaan Bagi Nelayan Tradisional*” oleh Rouli Anita Velentina. Penelitian ini berangkat dari masalah nelayan Indonesia yang menyandang stereotip berupa lemah, bodoh, tidak efektif dan tidak mampu menggapai masa depan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *pertama*, dalam upaya peminjaman modal lembaga perbankan masih sangat minim memberikan pinjaman kepada masyarakat nelayan tradisional. Karena pemberian kredit kepada masyarakat nelayan memiliki resiko yang tinggi. *Kedua*, pemerintah memegang peran yang sangat penting dalam meningkatkan

⁴Annisa Iimi Faried dan Diwayana Putri Nasution, “Analisis Strategi Peningkatan Kesejahteraan Nelayan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Desa Pahlawan kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara”, *Jurnal Kajian Ekonomi*, Vol. 03, No. 02, Juli 2018.

minat lembaga perbankan dalam memberikan pinjaman modal kepada masyarakat nelayan.⁵

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Lisbeth Pininta, Djamin Bakce, dan Jum'atri Yusri yang berjudul "*Faktor-Faktor Determinan Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Peserta Program Desa Mandiri Pangan di Provinsi Riau*". Penelitian ini berfokus pada Program Desa Mandiri dalam melaksanakan program peningkatan Kesejahteraan masyarakat Provinsi Riau. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adapun yang menjadi faktor-faktor determinan yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan rumah tangga di Provinsi Riau adalah kepemilikan lahan dan pendampingan.⁶

Ketujuh, penelitian dari Sunarlan dan Kusnadi yang berjudul, "*The Synergi of marine Fishing And The Eko-Tourism Sector As The Solution In Resolving poverty Of Fishermen*". Penelitian ini fokus pada kondisi sosial ekonomi masyarakat dimana kondisi pendapatan dari tingkat melaut terjadi penurunan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, adapun yang menjadi penyebab penurunan pendapatan masyarakat disebabkan oleh kelangkaan sumber daya perikanan, selain itu hambatan laut juga terjadi karena faktor cuaca yang tidak stabil sehingga menyebabkan ketidak jangkauan melaut. Meskipun demikian

⁵Rouli Anita Velentina, "Kebijakan Pembiayaan Bagi Nelayan Tradisional", *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 47, No. 03, Juli 2018.

⁶Lisbeth Pininta, Djaimi Backed an Jum'atri Yusri, "Faktor-Faktor Determinan Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Peserta Program Desa Mandiri Pangan Di Provinsi Riau", *Jurnal Agribisnis*, Vol. 20. No. 01, Juni 2018.

dengan adanya sector ekowisata dapat menampung penyediaan tenaga kerja sehingga para nelayan dapat membuat usaha sendiri.⁷

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh, A.I.F. Lubis, A.P.U. Siahaan, dkk, yang berjudul “*Strategy For Improving Science And WelFare Through Community Empowerment Technology*”. Penelitian ini berfokus pada strategi pemerintah Precess Hierarchy Analisis (AHP) yang mencakup Kebijakan pemerintah, kualitas layanan, pengembangan akses modal, pembangunan fasilitas sekolah, akses sumber daya perikanan, pengembangan keterampilan dan technology. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan pemerindah dapat menjadi solusi dalam pembangunan ekonomi masyarakat.⁸

Kesembilan, penelitian yang dilakukan Oleh Indra Cahyadinata, Achmad Fahrudin, dkk, dengan judul “*Household welfare of mud crab fishermen in small outermost islands. Case study: Enggano Island, Bengkulu Province, Indonesia*”. Penelitian ini fokus pada pengembangan pulau Enggano dalam meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skor pencapaian untuk minimum kesejahteraan kepiting lumpur adalah 33%, pencapaian maksimum 80% dan pencapaian rata-rata 59%. Dari hasil ini

⁷Sunarlan dan Kusnadi, “The Synergy Of Marine Fishing And The Eco-Tourism Sector As The Solution In Resolving Poverti Of Fishermen”, Vol. 31, No. 2, 2018.

⁸A.I.F. Lubis, A.P.U. Siahaan, dkk, “Strategy For Improving Science And Welfare Through Community Empowerment Tecknology”, *International Journal Of Civil Engineering And Tegnology (IJCIET)*, Vol. 09, No. 09, September 2018.

menunjukkan bahwa nelayan kepiting lumpur di Pulau Enggano termasuk kedalam kategori kesejahteraan sedang.⁹

Kesepuluh, penelitian yang dilakukan oleh, Khondker Murshed E Jahan, Ben Belton, dan K. Kuperan Viswanathan. Yang berjudul “*Communication strategies for managing coastal fisheries conflicts in Bangladesh*”. Penelitian berangkat dari masalah kegagalan kelembagaan dalam mengelola perikanan dan menegakkan hukum dan peraturan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, rencana komunikasi yang efektif dapat memainkan peran penting dalam menyelesaikan konflik.¹⁰

Kesebelas, penelitian Taufik dengan judul “*Analisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar*”, penelitian ini berangkat dari tingginya tingkat kemiskinan masyarakat pesisir di Polewali dan bagaimana peran pemerintah setempat dalam menyikapi masyarakat pesisir yang penghasilannya tidak tetap karena pendapatan mereka sangat bergantung pada musim. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah dalam membantu masyarakat nelayan telah terlaksana secara utuh hanya saja ada beberapa bagian yang masih kurang terkoordinasi dalam program pemberdayaan. Bantuan yang diberikan pemerintah sangat bermanfaat bagi masyarakat, bantuan tersebut

⁹Indra Cahyadinata, Achmad Fahrudin, dkk, “Household Wekfare Of Mud Crab Fishermen In Small Outermost Islands. Case Study: Enggano Island, Bengkulu Province, Indonesia, *AAFL Bioflux*, Vol. 12, No. 02, 2019.

¹⁰Khondker Murshed e Jahan, Ben Belton, dan K. Kuperan Viswanathan, “*Communication Strategis For Managing Coastal Fisheries Conflicts In Bangladesh*”, Vol. 32, No. 04, Maret 2014.

digunakan dalam permodalan sehingga dapat menunjang produktifitas para nelayan.¹¹

Kedua belas, penelitian Tumpal Manik dan Hadli Lidya Rikayana, yang berjudul “*Pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Kelurahan Kampung Bugis, Tanjung Pinang*”, penelitian ini berangkat dari masalah kurangnya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan usaha ekonomi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa usaha ekonomi produktif sebelumnya sudah pernah dilakukan tetapi belum mencapai tujuan. Pemberdayaan usaha ekonomi produktif dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan berdasarkan pelaksanaan usaha ekonomi produktif berpengaruh signifikan sebesar 36% terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di kampung bugis, karena masyarakat dapat melakukan usaha ekonomi masyarakat sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang mereka miliki sehingga usaha yang mereka lakukan dapat diterima lingkungan sesuai dengan permintaan kebutuhan masyarakat saat ini.¹²

Ketiga Belas, Penelitian dari I Gede Made Subagiana, I Gusti Lang Suta Artatanaya dan Ni Luh Made Wijayati. Yang berjudul “*Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) Pada Tiga Perkampungan Nelayan Air Kuning, Pengambengan dan Candi Kusuma Kabupaten Jembrana Propinsi Bali (Suatu Studi Komperatif)*”. Penelitian ini berangkat dari masalah tidak

¹¹Taufik, “Analisis Peran Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar”, *Ilmu Pemerintah*, No. 1, Vol. 6, Januari 2013.

¹²Tumpal Manik dan Hadli Lidya Rikayana, “Pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Kelurahan Kampung Bugis, Tanjung Pinang, *Maritime Empowerment*, No. 1, Vol.1, Tahun 2018.

terrealisasinya program pemberdayaan masyarakat pesisir karena tidak berdasarkan atas kebutuhan, potensi, harapan dan kearifan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep pemberdayaan Masyarakat pesisir di kabupaten Jembara Propinsi Bali ini dapat dilihat dari berbagai aspek: Aspek Ekonomi menyangkut bantuan permodalan, tersedianya lapangan pekerjaan, dan peningkatan pendapatan. Aspek sosial budaya meliputi pendidikan, kesehatan, agama, dan norma-norma yang berlaku. Aspek lingkungan meliputi pelestarian sumber daya pesisir beserta biota lautnya, dan program bedah rumah untuk nelayan yang miskin. Aspek Infrastruktur, meliputi, perbaikan jalan, pelanuhan, tempat pelelangan iakan dll.¹³

Keempat Belas, penelitian dari Arif Humaiani dengan judul “*Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Keterampilan Pembuatan Hand Made Berbasis Rumah Tangga*”, penelitian ini berawal dari masalah kendala ekonomi dan kurangnya peluang kerja yang menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang rendah, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplor pengetahuan dan keterampilan masyarakat sehingga dapat menciptakan peluang usaha dan lapangan pekerjaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya pelatihan Keterampilan pembuatan *Hand Made* memberikan kesadaran para masyarakat untuk merintis usaha berbasis ruma tangga yang dapat memberikan keuntungan sekaligus meningkatkan pendapatan dan perekonomian masyarakat

¹³I Gede Made Subagiana, I Gusti Lanang Suta Artatanaya dan Ni Luh Made Wijayanti, “Model Pemberdayaan Ekonomi Pesisir (PEMP) Pada Tiga Perkampungan Nelayan Air Kuning, Pengembangan dan Candi Kusuma Jembrana Propinsi Bali (Suatu Studi Komparatif), *Bisnis dan Kewirausahaan*, No. 2, Vol. 14, Juli 2018.

dusun Karang. Jika pendapatan masyarakat meningkat tentu akan berpengaruh kepada peningkatan kesejahteraan Masyarakat dusun Karang.¹⁴

Kelima Belas, Penelitian yang dilakukan oleh Siti Muslihah, Hilda Octavana Siregar dan Sriniyati, dengan judul “*Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta*”, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Bantul dari sebelum dan setelah adanya dana desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian bantuan memberikan dampak terhadap kemajuan, perkembangan dan kesejahteraan masyarakat bantul daerah istimewa jogyakarta.¹⁵

Dengan demikian, beberapa penelitian yang disebutkan diatas akan menjadi acuan atau tolak ukur peneliti dalam mengkaji masalah yang akan dianalisis. Meskipun beberapa penelitian tersebut memiliki pembahasan yang hampir sama dengan penelitian yang akan dilakukan, namun subjek, objek, dan perspektif penelitian berbeda. Yang menjadi pembeda penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian ini titik fokusnya pada pengembangan strategi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kampung sejahtera pulau Baai dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan ditinjau dari perspektik Ekonomi Islam.

¹⁴Arif Humaini, “Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Keterampilan Pembuatan *Hand Made* Berbasis Rumah Tangga, *Berdikari*, No. 1, Vol. 6, Februari 2018.

¹⁵Siti Muslihah, Hilda Octavana Siregar dan Sriniyati, “Dampak Alaokasi Dana Desa Terhadap pembangunan Dan Kesejahteraan Masyarakat Desa di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, No. 1, Vol. 7, July 2019.

Tabel 2

Perbedaan dan Persamaan Penelitian

No	Nama	Judul Penelitian	Metode	Keterangan
1.	Taufik, (2013)	<i>"Analisis Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Kecamatan Polewi Kabupaten Polewi Mandar"</i>	Penelitian Kualitatif dengan Metode Observasi, Dokumentasi dan wawancara.	<p>Persamaan: Sama-sama mengkaji masyarakat pesisir.</p> <p>Perbedaan: Penelitian ini mengkaji tentang peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat pesisir. Sedangkan penelitian yang peneliti teliti mengkaji tentang manajemen pengelolaan tempat pelelangan ikan dalam meningkatkan kesejahteraan ditinjau dalam perspektif ekonomi Islam.</p>
2	Khondker Murshed E Jahan, Ben Belton, dan K. Kuperan Viswanathan (2014)	<i>"Communication strategies for managing coastal fisheries conflicts in Bangladesh"</i>	Penelitian Kualitatif	<p>Persamaan: Sama-sama mengkaji masyarakat nelayan.</p> <p>Perbedaan: Penelitian ini mengkaji kelembagaan dalam pengelolaan perikanan dalam menegakkan hukum dan peraturan. Sedangkan penelitian yang peneliti teliti lebih berfokus kepada manajemen pengelolaan tempat pelelangan ikan (TPI) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan dengan ekonomi Islam sebagai acuannya.</p>
3	Rierti Triyanti dan Maulana Firdaus (2016)	<i>"Tingkat Kesejahteraan Nelayan Skala Kecil Dengan Pendekatan Penghidupan Berkelanjutan di Kabupaten Indramayu"</i>	Penelitian Kuantitatif, dengan pendekatan penghidupan berkelanjutan menggunakan indikator sumber daya keuangan, sosial, manusia dan alam.	<p>Persamaan: Sama-sama mengkaji kesejahteraan nelayan.</p> <p>Perbedaan: Dalam penelitian ini fokus peneliti pada manajemen pengelolaan tempat pelelangan ikan dalam mensejahterakan masyarakat nelayan. Sedangkan penelitian terdahulu mengkaji tentang</p>

				bagaimana mengetahui tingkat kesejahteraan nelayan.
4	Sinta Rahayu, Jayusman dan Romadi (2017)	<i>“Dinamika Kehidupan Sosial Ekonomi Nelayan Desa Sirnobojo Kabupaten Pacitan Tahun 1998-2014”</i>	Penelitian Kualitatif dengan pendekatan sejarah.	<p>Persamaan: Sama-Sama mengkaji tentang Ekonomi penduduk nelayan.</p> <p>Perbedaan: Penelitian lebih fokus mengkaji tentang manajemen pengelolaan Tempat pelelngan ikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan penelitian terdahulu lebih mengkaji tentang upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam mendorong masyarakat mencapai kesejahteraan.</p>
5	Rouli Anita Velentina (2018)	<i>“Kebijakan Pembiayaan Bagi Nelayan Tradisional”</i>	Metode yang digunakan yaitu metode yuridis normative.	<p>Persamaan: Sama-sama membahas tentang kesejahteraan nelayan.</p> <p>Perbedaan: Penelitian ini mengkaji tentang pengelolaan perikanan yang dapat memberikan keuntungan dan manfaat dalam mensejahterkan masyarakat nelayan.</p>
6	Lisbeth Pininta, Djamin Bakce, dan Jum’atri Yusri (2018)	<i>“Faktor-Faktor Determinan Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Peserta Program Desa Mandiri Pangan di Provinsi Riau”</i>	Penelitian analisis regresi multinominal logistik.	<p>Persamaan: Sama-sama mengkaji permasalahan kesejahteraan masyarakat nelayan.</p> <p>Perbedaan: Pada penelitian ini meneliti tentang faktor-faktor determinan tingkat kesejahteraan nelayan. Sedangkan pada penelitian yang akan peneliti tulis berfokus pada manajemen pengelolaan TPI dalam mensejahterakan masyarakat nelayan ditinjau dari perspektif Islam.</p>
7	Sunarlan dan Kusnadi (2018)	<i>“The Synergi of marine Fishing And The Eko-Tourism Sector As The</i>	Penelitian kualitatif	<p>Persamaan: Sama-sama mengkaji tentang masalah kesejahteraan nelayan.</p>

		<i>Solution In Resolving poverty Of Fishermen”</i>		Perbedaan: Penelitian ini terfokus pada apa yang menjadi penyebab menurunnya pendapatan masyarakat nelayan serta solusi apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan.
8	A.I.F. Lubis, A.P.U. Siahaan (2018)	<i>“Strategy For Improving Science And WelFare Through Community Empowerment Technology”.</i>	Penelitian kuantitatif.	Persamaan: Sama-sama membahas tentang kesejahteraan nelayan. Perbedaan: Penelitian ini mengkaji tentang strategi yang dikembangkan oleh pemerintah yang mencakup kebijakan pemerintah dan pembangunan fasilitas.
9	Meri Enita Puspita Sari dan Diah Ayu Pratiwi, (2018)	<i>“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Hidup Masyarakat Suku Laut Pulau Bertam Kota Batam”.</i>	Penelitian Kualitatif	Persamaan: Sama-sama mengkaji tentang Kesejahteraan masyarakat nelayan. Perbedaan: Penelitian ini mengkaji tentang faktor yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan sedangkan penelitian penulis mengkaji bagaimana ekonomi islam memandang manajemen pengelolaan dari pelepasan ikan dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat nelayan.
10	Annisa Ilmi Faried dan Diwayana Putri Nasution (2018)	<i>“Analisis Strategi Peningkatan Kesejahteraan Nelayan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Desa Pahlawan Kacamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara”.</i>	Metode yang digunakan metode Kuantitatif dengan teori pemberdayaan masyarakat	Persamaan: Sama-sama mengkaji tentang kesejahteraan nelayan. Perbedaan: Peneliti lebih fokus pada manajemen pengelolaan TPI dalam mensejahterakan nelayan sedangkan penelitian terdahulu lebih kepada pemberdayaan masyarakat nelayan.
11	Arif Humaidi. (2018)	<i>Peningkatan Kesejahteraan</i>	Penelitian Kualitatif.	Persamaan: Sama-sama mengkaji

		<i>Masyarakat Melalui Keterampilan Pembuatan Hand Made Berbasis Rumah Tangga.</i>		<p>tentang peningkatan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>Perbedaan: Pada penelitian ini berfokus pada solusi dalam meningkatkan kesejahteraan melalui pelatihan keterampilan rumah tangga untuk menambah nilai tambah ekonomi. Sedangkan dalam penelitian peneliti bagaimana manajemen pengelolaan TPI dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan dengan ekonomi Islam sebaga acuannya.</p>
12	Tumpal Manik dan Hadli Lidya Rikayana. (2018)	<i>“Pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Kelurahan Kampung Bugis TanjungPinang”</i>	Metode Kualitatif yang di Kuantitatifkan dengan alat kuesioner diukur dan dihitung langsung.	<p>Persamaan: Sama-sama mengkaji tentang peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan.</p> <p>Perbedaan: Penelitian ini membahas tentang pemberdayaan ekonomi produktif dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan sedangkan penelitian peneliti lebih kepada manajemen pengelolaan tempat pelelangan ikan dalam meningkatkan kesejahteraan.</p>
13	I Gede Made Subagiana, I Gusti Lanang Suta Artatanaya dan Ni Luh Made Wijayati. (2018)	<i>Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) Pada Tiga Perkampungan Nelayan Air Kuning, Pengambengan dan Candi Kusuma Kabupaten Jembara Propinsi Bali (Suatu Studi Komparatif).</i>	Pendekatan Kaulitatif Pengamatan terhadap Fenomena yang terjadi dilapangan.	<p>Persamaan: Sama-sama mengkaji tentang kesejahteraan.</p> <p>Perbedaan: Penelitian ini mengkaji tentang model atau konsep dari pemberdayaan masyarakat pesisir sedangkan pada penelitian peneliti lebih membahas tentang manajemen pengelolaan TPI dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan.</p>
14	Indra Cahyadinata, Achmad Fahrudin, dkk (2019)	<i>“Household welfare of mud crab fishermen in small outermost islands. Case study: Enggano</i>	Penelitian Kuantitatif dengan menggunakan scoring dan	<p>Persamaan: Sama-sama mengkaji tentang masyarakat nelayan.</p> <p>Perbedaan:</p>

		<i>Island, Bengkulu Province, Indonesia”</i>	Indexing	Penelitian ini terfokus pada kesejahteraan masyarakat dengan kegiatan ekonomi berdasarkan potensi sumberdaya alam salah satunya kepiting lumpur. Sedangkan penelitian yang peneliti teliti lebih fokus kepada manajemen pengelolaan TPI dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan.
15	Siti Muslihah, Hilda Octavana Siregar dan Sriniyati. (2019)	<i>Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Dan Kesejahteraan Masyarakat Desa di Kabupaten Bantul Daerah Is timewa Yogjakarta.</i>	Penelitian Kualitatif.	<p>Persamaan: Sama-sama mengkaji tentang kesejahteraan.</p> <p>Perbedaan: Penelitian ini mengkaji tentang dampak alokasi desa terhadap pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan penelitian peneliti lebih kepada bagaimana manajemen pengelolaan TPI dalam meningkatkan Kesejahteraan Nelayan dengan Ekonomi Islam sebagai acuannya.</p>

Dari berbagai penelitian yang dikemukakan pada tabel diatas, terdapat berbagai kesamaan yaitu sama-sama mengkaji tentang peningkatan kesejahteraan masyarakat, sedangkan perbedaan pada penelitian yang peneliti teliti terletak pada fokus penelitian yaitu pada strategi tempat pelelangan ikan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dengan ekonomi Islam sebagai acuannya, selanjutnya pada kerangka teori peneliti mencoba menguraikan apa yang dimaksud kesejahteraan, kesejahteraan dalam ekonomi Islam dan manajemen pengelolaan dalam peningkatan kesejahteraan. Dalam menganalisis data peneliti menggunakan metode *Miles dan Huberman* yaitu Reduksi data yaitu mengumpulkan dan merangkum data yang dianggap penting, kemudian di sajikan dalam bentuk narasi

teks (Penyajian Data) dari reduksi dan penyajian data di ambil kesimpulan yang menjadi jawaban atas permasalahan yang ditemukan.

B. Kerangka Teori

1. Kesejahteraan

a. Pengertian Kesejahteraan

Setiap manusia bertujuan mencapai kesejahteraan dalam hidupnya, namun manusia memiliki pengertian yang berbeda-beda tentang kesejahteraan. Dalam berbagai literature ilmu ekonomi konvensional dapat disimpulkan bahwa tujuan manusia memenuhi kebutuhannya atas barang dan jasa adalah untuk mencapai kesejahteraan (*well being*). Manusia menginginkan kebahagiaan dan kesejahteraan dalam hidupnya, dan untuk inilah ia berjuang dengan segala cara untuk mencapainya.¹⁶ Definisi sejaterah terangkum dalam sederetan keadaan yang baik, seperti: memperoleh hak, kebahagiaan, kedamaian, tempat tinggal, kesehatan, tercukupinya kebutuhan, kenyamanan dan lain sebagainya.¹⁷

Kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materill maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir dan batin, yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah-rohaniah dan sosial sebaik-baiknya bagi diri,

¹⁶ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008) hlm. 11.

¹⁷Michael Sherraden, *Aset Untuk Orang Miskin Perspektif Baru Usaha Pengentasan Kemiskinan*, (Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2006), hlm. 60.

keluarga serta masyarakat, dengan menjunjung tinggi hak-hak, azas serta masyarakat, dengan menjunjung tinggi hak-hak, azas serta kewajiban sesuai dengan Pancasila.¹⁸

Secara definisi, kesejahteraan merupakan suatu kondisi atau keadaan sejahtera, baik fisik, mental maupun sosial. Menurut undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyebutkan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Menurut Suharto (2006), kesejahteraan sosial sedikitnya mengandung empat makna.

- 1) Kesejahteraan sosial sebagai kondisi sejahtera (*well-being*). Pengertian ini biasanya merujuk pada istilah kesejahteraan sosial (*social welfare*) sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan materi dan nonmaterial. Midgley mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai *a condition or state of human well-being*. Kondisi sejahtera terjadi apabila kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal dan pendapatan dapat dipenuhi, serta manakala manusia dapat melindungi diri dari resiko-resiko utama yang mengancam kehidupannya.
- 2) Kesejahteraan sosial sebagai pelayanan sosial. Pelayanan sosial umumnya mencakup lima bentuk, yakni jaminan sosial (*social*

¹⁸Irianto Sulistyowati, *Antropologi Hukum Sebuah BungaRampai*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), hlm. 239.

security), pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan pelayanan sosial personal (*personal social services*).

- 3) Kesejahteraan sosial sebagai tunjangan sosial, khususnya diberikan kepada orang miskin.
- 4) Kesejahteraan sosial sebagai proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan menyelenggarakan pelayanan sosial.¹⁹

b. Indikator-Indikator Keluarga Sejahtera Menurut BKKBN

BKKBN membagi lima tahapan kesejahteraan keluarga sejahtera, setiap tahapan kesejahteraan keluarga memiliki indikator-indikator yang berbeda. Dalam penentuan kesejahteraan keluarga, BKKBN menggunakan 23 indikator, yaitu:

- 1) Anggota keluarga sudah melaksanakan ibadah menurut agamanya;
- 2) Seluruh anggota keluarga dapat makan minimal dua kali sehari;
- 3) Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian berbeda untuk di rumah, bekerja, sekolah, dan berpergian;
- 4) Bila anak sakit, dibawa kesarana kesehatan;
- 5) Anggota keluarga melaksanakan ibadah agamanya secara teratur;
- 6) Keluarga makan daging/ikan/telur minimal sekali seminggu;
- 7) Setiap anggota keluarga memperoleh satu *stel* pakaian baru dalam setahun;

¹⁹Badan Perencana Pembangunan Daerah-Daerah Istimewa Yogyakarta, (Yogyakarta: 2014), hlm. 10-11.

- 8) Terpenuhi luas lantai rumah minimal delapan meter persegi per penghuni;
- 9) Tidak ada anggota keluarga yang sakit dalam tiga bulan terakhir;
- 10) Ada anggota keluarga berumur 15 tahun ke atas yang berpenghasilan tetap;
- 11) Tidak ada anggota keluarga berumur 10-60 tahun yang tidak bisa baca-tulis;
- 12) Tidak ada anak berumur 5-15 tahun yang tidak bersekolah;
- 13) Jika keluarga telah memiliki dua anak atau lebih, memakai kontrasepsi;
- 14) Keluarga dapat meningkatkan pengetahuannya;
- 15) Sebagian penghasilan keluarga ditabung;
- 16) Keluarga minimal dapat makan bersama sekali dalam sehari dan saling berkomunikasi;
- 17) Keluarga ikut berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat;
- 18) Keluarga melakukan rekreasi di luar rumah minimal sekali sebulan;
- 19) Keluarga dapat mengakses berita dari surat kabar, radio, televisi ataupun majalah;
- 20) Anggota keluarga dapat menggunakan fasilitas transportasi lokal;
- 21) Keluarga berkontribusi secara teratur dalam aktivitas sosial dan

22) Minimal satu anggota keluarga aktif dalam pengelolaan lembaga lokal.²⁰

Indikator-indikator tersebut kemudian dibagi kedalam setiap tahapan keluarga, dengan pembagian indikator pada setiap tahapannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Tahapan Keluarga Berdasarkan Indikator

No.	Tahapan Keluarga	Jumlah Indikator
1.	Keluarga Pra Sejahtera (KPS)	Belum bisa memenuhi kebutuhan dasarnya (<i>basic needs</i>) secara minimal atau belum bisa memenuhi indikator 1 hingga liama.
2.	Keluarga Sejahtera I (KSI)	Bila memenuhi indikator 1 hingga 5.
3.	Keluarga Sejahtera II	Bila memenuhi Indikator 1-14.
4.	Keluarga Sejahtera III	Bila memenuhi indikator 1-21
5.	Keluarga Sejahtera III Plus	Bila memenuhi seluruh indikator 1-23.

c. Konsep Kesejahteraan dalam Islam

Konsep kesejahteraan dalam Islam didasarkan pada seluruh ajaran agama Islam tentang kehidupan. Selain itu kesejahteraan dalam konsep ekonomi Islam tidak hanya kesejahteraan dunia tetapi juga kesejahteraan di akhirat, karena kehidupan manusia bukan hanya di dunia saja melainkan ada kehidupan setelah kematian. Jika kondisi kedua ini tidak bisa dicapai solusi yang ditawarkan adalah mengejar kesejahteraan akhirat sebagai

²⁰Endang Rostiana dan Horas Djulius, *Perencanaan Dan Pengelolaan Keuangan dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera*, (Yogyakarta: Diandra Kreatif ANggota IKAPI, 2018), hlm. 7-9.

tujuan utama, sebab ia merupakan kehidupan yang dalam segala hal lebih bernilai.²¹

Pendefinisian Islam mengenai kesejahteraan didasarkan pada pandangan yang komprehensif tentang kehidupan ini. Kesejahteraan menurut konsep Islam mencakup dua hal yaitu: (1) kesejahteraan holistik dan seimbang, yaitu kecukupan materi yang didukung kecukupan pemenuhan kebutuhan spiritual serta mencakup individu dan sosial, (2) kesejahteraan di dunia dan diakhirat, sebab manusia tidak hanya hidup di dunia tetapi juga di alam setelah kematian atau musnahnya didunia (akhirat).²²

Menurut Al-Ghazali dalam merumuskan Kesejahteraan menyatakan sebuah konsep fungsi kesejahteraan sosial yang sulit diruntuhkan dan yang telah dirindukan oleh ekonom-ekonom modern. Dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, Imam Al-Ghazali mengelompokkan dan mengidentifikasi semua masalah baik yang berupa *masalih* (utilitas, manfaat) ataupun *mafasid* (disutilitas, kerusakan) dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Selanjutnya ia mendefinisikan fungsi sosial dalam kerangka riererki kebutuhan individu sosial.²³

Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan (*masalahah*) dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar: (1) agama (*al-dien*), (2) hidup atau jiwa (*nafs*); (3) Intelek atau akal

²¹Hendri, *Pengantar Ekonomika Makro Islam*, cetakan pertama, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hlm. 6

²²Tim P3EI UII, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), hlm. 4-5.

²³Anas Zarka, *Islamic Economics: an Approach to Human Welfare*. Dalam Khursid Ahmad (ed). *Studies in Islamic Economics* . (Leicester: The Islamic Fondantion, 1980).

(*aql*) (4) keluarga dan keturunan (*nasl*) (5) Harta tau kekayaan (*maal*); Ia menitikberatkan bahwa sesuai tuntunan wahyu, “kebaikan dunia ini dan akhirat (*maslahat al-din wa al-dunya*) merupakan tujuan utamanya.²⁴

d. Indikator Kesejahteraan dalam Islam

Indikator kesejahteraan masyarakat di mana keluarga atau rumah tangga (*usrah*) sebagai unit terkecil memang sulit dirumuskan secara terinci. Namun sekurang-kurangnya ajaran syari’at Islam dengan konsep fiqh sosial telah banyak menunjang sebagai syarat mendekati rumusan tersebut.

Unsur-unsur kesejahteraan dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi, bersifat saling mempengaruhi. Apabila hal itu dikaitkan dengan syari’at Islam yang dijabarkan fiqh sosial dengan bertitik tolak dari lima prinsip dalam *Maqāṣid Syarī’ah*, maka akan jelas, syari’at Islam mempunyai sasaran yang mendasar, yakni kesejahteraan lahir batin bagi setiap manusia. Berarti bahwa manusia merupakan sasaran, sekaligus menempati posisi kunci dalam keberhasilan mencapai kesejahteraan yang dimaksud.²⁵

1) *Hifz al-dīn* (melindungi agama)

Menjaga, melindungi dan menghormati kebebasan beragama atau berkepercayaan.

2) *Hifz al-nafs* (melindungi jiwa)

²⁴Adiwarman A Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: PT GrafindoPersada, 2007), hlm. 61

²⁵Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 1994), hlm. 4.

Perlindungan terhadap kehidupan mencakup perlindungan kepada jiwa dan kehormatan manusia dengan akhlaknya yang mulia yang harus dijaga dan dilestarikan.²⁶

3) *Hifz al- 'aql* (melindungi pikiran)

Melipatgandakan pola pikir dan *research* ilmiah; mengutamakan perjalanan untuk mencari ilmu pengetahuan; menekankan pola pikir yang mendahulukan kriminalitas kerumunan gerombolan; menghindari upaya-upaya untuk meremehkan kerja otak.

4) *Hifz al- nasl* (melindungi keturunan)

Teori yang berorientasi kepada perlindungan keluarga; keperdulian yang lebih terhadap institusi keluarga.

5) *Hifz al- Māl* (menjaga harta)

Mengutamakan keperdulian sosial; menaruh perhatian pada pembangunan dan pengembangan ekonomi; mendorong kesejahteraan manusia; menghilangkan jurang miskin dan kaya.²⁷

2. Manajemen Pengelolaan Dalam Islam

a. Pengertian Manajemen Syari'ah

Manajemen dalam bahasa Arab disebut dengan *idarah*. *Idarah* diambil dari perkataan *adartasy-syai'a*²⁸ atau perkataan Secara istilah, manajemen adalah suatu aktivitas khusus menyangkut kepemimpinan,

²⁶Riyanto Sofyan, *Bisnis Syariah Kenapa Tidak: Pengalaman Penerapan Pada Bisnis Hotel*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 11-12.

²⁷Jasser Auda, *Al-Maqasid untuk Pemula (Cet.I)*, (Yogyakarta: UIN SUKA Press, 2014), hlm. 8.

²⁸Mahdi bin Ibrahim bin Muhammad Mubjir, *Amanah dalam Manajemen terjemahan: Rahmad Abas*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997), hlm: 59.

pengarahan, pengembangan personal, perencanaan, dan pengawasan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang berkenaan dengan unsur-unsur pokok dalam suatu proyek.²⁹ Tujuannya adalah agar hasil-hasil yang ditargetkan dapat tercapai dengan cara efektif dan efisien.

Stoner menyatakan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengawasan usaha-usaha para usaha anggota organisasi dan penggunaan sumberdaya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sejalan dengan definisi tersebut Stoner dan Winkel menyatakan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian upaya anggota organisasi lainnya demi tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Menurut Shafritz dan Russel, manajemen adalah berkenaan dengan orang yang bertanggung jawab menjalankan suatu organisasi, dan proses menjalankan organisasi itu sendiri yaitu pemanfaatan sumberdaya seperti orang dan mesin untuk mencapai tujuan organisasi.³⁰ Berangkat dari uraian-uraian di atas, secara implisit dapat diketahui, bahwa hakekat manajemen yang terkandung dalam al-Qur'an adalah merenungkan atau memandang kedepan suatu urusan (persoalan), agar persoalan itu terpuji dan baik akibatnya. Untuk menuju hakekat tersebut, diperlukan adanya pengaturan dengan cara yang bijaksana.

²⁹Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPM, 2002), hlm. 147

³⁰Tjahjanulin Domai, *Manajemen Keuangan Publik*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2010), hlm. 32.

Hakekat manajemen yang terkandung dalam al-Qur'an ini, dengan demikian erat kaitannya dengan pencapaian tujuan, pengambilan keputusan dan pelaksanaan manajerial itu sendiri. Karena pada dasarnya terbangunnya konsep manajerial didasarkan kepada ketiga dasar pemikiran tersebut (pencapaian tujuan, pengambilan keputusan dan pelaksanaan manajemen).³¹

b. Prinsip Manajemen dalam Syari'at Islam

Beberapa prinsip atau kaidah dan teknik manajemen yang ada relevansinya dengan Al Qur'an atau Al HAdits antara lain sebagai berikut:

1) Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Setiap muslim wajib melakukan perbuatan yang *Ma'ruf*, yaitu perbuatan yang baik dan terpuji seperti perbuatan tolong-menolong (*taawun*), menegakkan keadilan di antara manusia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempertinggi efisiensi, dan lain-lain. Sedangkan perbuatan munkar (*keji*), seperti korupsi, suap, pemborosan dan sebagainya harus di jauhi dan bahan harus diberantas.

Menyeru kepada kebajikan (*amar ma'ruf*) dan mencegah kemunkaran (*nahi munkar*) adalah wajib sebagaimana firman Allah SWT:

³¹Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), hlm. 14.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ

الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

“Hendaklah ada diantara kamu umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeruh perbuatan yang ma’ruf dan mencegah perbuatan keji (Q.S Ali’Imran (3): 104)”³²

Untuk melaksanakan prinsip tersebut, ilmu manajemen harus dipelajari dan dilaksanakan secara sehat, baik secara bijak maupun secara ilmiah.

2) Kewajiban Menegakkan Kebenaran

Ajaran Islam adalah metode Illahi untuk menegakkan kebenaran dan menghapuskan kebatilan, dan untuk menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera serta diridhai Tuhan. Kebenaran (*haq*) menurut ukuran dan norma Islam, antara lain tersirat di dalam firman Allah Surat Al Isra (17) ayat 81:

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴿٨١﴾

“Katakanlah ya Muhammad! Telah datang kebenaran dan telah sirna yang batil. Sesungguhnya yang batil itu akan lenyap”³³

Manajemen suatu metode pengelolaan yang baik dan benar, untuk menghindari kesalahan dan keliruan dan menegakkan kebenaran. Menegakkan kebenaran adalah metode Allah yang harus ditaati oleh manusia. Dengan demikian manajemen yang disusun oleh manusia untuk menegakkan kebenaran itu menjadi wajib.

³²Q,S Ali ‘Imran: 104, dikutip dari Tim Syghma Media Inovasi, *Alquran Terjemahan dan Tajwid*, (Jawa Barat: 2014), hlm. 63

³³Q.S. Al-Israa’ :81, dikutip dari Tim Syghma Media Inovasi, *Alquran Terjemahan dan Tajwid*, (Jawa Barat: 2014), hlm. 415

3) Kewajiban Menegakkan Keadilan

Hukum Syari'ah mewajibkan kita menegakkan keadilan, kapan dan di manapun. Allah berfirman di Surat An Nisa' (4) ayat 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

“Jika kamu menghukum di antara manusia, hendaklah kamu menghukum (mengadili) secara adil”³⁴

Semua perbuatan harus dilakukan dengan adil. Adil dalam menimbang, adil dalam bertindak, dan adil dalam menghukum. Adil itu harus dilakukan dimanapun dan dalam keadaan apapun, baik diwaktu senang maupun di waktu susah. Sewaktu sebagai orang kecil harus berbuat adil, sewaktu sebagai orang yang berkuasapun harus adil. Setiap muslim harus adil kepada dirinya sendiri dan adil pula terhadap orang lain.

4) Kewajiban menyampaikan amanah.

Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kepada setiap muslim untuk menunaikan amanah. Seorang manajemen perusahaan adalah pemegang amanah dari pemegang sahamnya, yang wajib mengelola perusahaan dengan baik, sehingga menguntungkan pemegang saham

³⁴Q.S An-Nisaa: 58, dikutip dari Tim Syghma Media Inovasi, *Alquran Terjemahan dan Tajwid*, (Jawa Barat: 2014), hlm. 415

c. Fungsi Manajemen

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori dari Terry dalam The Liang Gie, yang menyatakan bahwa kegiatan atau fungsi manajemen, meliputi: perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actualing*), dan pengawasan (*Controlling*).

1) Perencanaan (*planning*)

Secara definisi, George R. Terry menyatakan perencanaan meliputi tindakan: memilih dan menggabungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dalam sal memvisualisasikan serta merumuskan aktivitas-aktivitas yang diusulkan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan.³⁵

Istilah perencanaan strategis (*strategic planning*) sebagai proses pemilihan tujuan organisasi, penentuan kebijakan dan program yang diperlukan untuk mencapai sasaran tertentu dalam rangka mencapai tujuan, dan penetapan metode yang dibutuhkan untuk menjamin agar kebijakan dan program strategis itu dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan kondisi yang berkembang. Perencanaan merupakan aktivitas manajemen yang paling krusial, bahkan ia adalah langkah awal untuk menjalankan manajemen sebuah pekerjaan. Ia sangat berpengaruh terhadap unsur-

³⁵George R. Terry, *Asas-Asas Menejemen*, (Bandung: Alumni Bandung,2012), hlm. 163

unsur manajemen lainnya, seperti merealisasikan perencanaan dan pengawasan agar bisa mewujudkan tujuan yang direncanakan.³⁶

Semua dasar dan tujuan manajemen haruslah terintegrasi, konsisten dan saling menunjang satu sama lain. Untuk menjaga konsistensi kearah pencapaian tujuan manajemen maka setiap usaha itu harus didahului oleh proses perencanaan yang baik, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

“Wahai orang-orang yang berfirman bertaqwalah kepada Allah dan rencanakanlah masa depanmu. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Tahu atas apa-apa yang kalian perbuat (Qs Al-Hasyr (59):18)³⁷

Perencanaan berarti menentukan sebelumnya apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Perencanaan dapat dianggap sebagai suatu kumpulan keputusan-keputusan, dalam hubungan mana perencanaan tersebut dianggap sebagai tindakan mempersiapkan mempersiapkan tindakan-tindakan untuk masa yang akan datang dengan jalan membuat keputusan-keputusan sekarang³⁸.

2) Pengorganisasian

Istilah pengorganisasian berasal dari perkataan *Organism* (*Organisme*) merupakan sebuah entitas dengan bagian-bagian yang

³⁶Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 64.

³⁷Q,S Al- Hasyr : 18, dikutip dari Tim Syghma Media Inovasi, *Alquran Terjemahan dan Tajwid*, (Jawa Barat: 2014), hlm. 545

³⁸George R. Terry, *Asas-Asas Menejemen...*, 163

terintegrasi demikian rupa hingga hubungan mereka satu sama lain dipengaruhi oleh hubungan mereka terhadap keseluruhan.

Apabila suatu kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih bekerjasama kearah suatu tujuan bersama, maka hubungan antara mereka dapat menimbulkan problem-problem seperti misalnya siapa yang mengambil keputusan dalam bidang mana, siapa melaksanakan pekerjaan macam apa, tindakan apa perlu dilakukan apabila terdapat kondisi-kondisi tertentu.

Dapat diketahui definisi pengorganisasian: pengorganisasian merupakan tindakan mengusahakan, hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, hingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu.

3) Pergerakan (*Actuating*)

Actuating merupakan usaha untuk menggerakkan anggota-anggota kelompok demikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran-sasaran atau tujuan tertentu.

Menggerakkan berhubungan erat dengan sumber daya manusia yang pada akhirnya merupakan pusat aktivitas-aktivitas manajemen berputar. Menggerakkan, menimbulkan daya pikat yang luar biasa. Nilai-nilai, sikap, harapan, kebutuhan, ambisi, harapan, pemuasan seseorang dan interaksinya dengan orang-orang lain dan dengan

lingkungan fisik kesemuanya bertautan dengan proses, menggerakkan merupakan fungsi manajemen yang paling fundamental. Guna mencapai dan mempertahankan sukses dalam bidang manajemen maka keahlian serta keterampilan dalam bidang menggerakkan merupakan hal yang mutlak perlu.

4) Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan berarti mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana.³⁹

Kata pengawasan dipakai sebagai arti harfiah dari kata *controlling*. Dengan demikian pengertian pengawasan meliputi segala kegiatan penelitian, pengamatan dan pengukuran terhadap jalannya operasi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan.⁴⁰

3. Jual Beli Lelang

a. Definisi Jual beli Lelang

Jual beli adalah aktivitas ekonomi yang hukumnya boleh berdasarkan kitabullah dan sunnah rasul-Nya serta ijma' dari seluruh umat Islam.⁴¹ Secara etimologis, jual beli terdiri dari dua suku kata, yakni jual dan beli yang dalam bahasa Arab dikenal dengan *al-bai'* yang berakar dari

³⁹*Ibid.*

⁴⁰Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), hlm. 215.

⁴¹Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm.5.

kata *ba'a-yabi'u-bai'an* yang berarti menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan secara terminologis Imam Nawawi di dalam kitabnya *al-Majmu'Syarah al-Muhadzdzab* menyebutkan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta secara kepemilikan. Ibnu Qudamah dalam kitabnya *al-Mughni* juga menjelaskan bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan kepemilikan dan penguasaan.⁴²

Adapun yang dimaksud dengan jual beli lelang ialah menunjukkan suatu benda lalu ditawarkan kepada orang banyak. Seseorang menawar lalu ada yang menambah dengan harga yang lebih tinggi, orang lain lagi menambahnya pula. Demikian sampai tidak ada yang mengatasinya, kemudian benda itu diberikan kepada orang yang menawar dengan harga tertinggi.⁴³ Adapun transaksi dalam bentuk lelang diperbolehkan apabila wujud dari objek transaksi pelelangan itu sebelumnya diberitahukan (ditunjukkan) kepada para peminat lelang (pembeli).⁴⁴

Jual beli muzayadah (lelang) disebut juga jual beli *dalalah* dan *munadah*. Secara etimologis berarti bersaing (*tanafus*) dalam menambah harga barang dagangan yang ditawarkan untuk dijual. Adapun secara terminologis, jual beli *muzayadah* adalah jika seseorang penjual menawarkan barang dagangannya dalam pasar (di hadapan para calon

⁴²Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*, (:Duta Media Publishing, 2018), hlm. 38.

⁴³Imam An-Nawawi, *Riyadhus Shalihin*, (,2016), hlm.217.

⁴⁴Al-Ghazali, *Ihya Ulumiddin: menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama*, (Jakarta: Republika, 2011), hlm.100

pembeli), kemudian barang dagangan itu diberikan kepada orang yang paling tinggi dalam memberikan harga.⁴⁵

Menurut Kamus Besar Indonesia, istilah lelang dijelaskan sebagai berikut:

Lelang adalah penjualan di hadapan orang banyak (dengan tawaran yang ats-mengatasi) dipimpin oleh pejabat lelang. Sedangkan melelnag adalah menjual dengan cara lelang.⁴⁶

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomer 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang:

Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang.⁴⁷

Berikutnya menurut Kamus *Dictionary of Law Complate Edition* dari M. Marwan dan Jimmy P mengartikan lelang sebagai berikut:

Lelang adalah bentuk penjualan barang-barang yang dipimpin oleh pejabat lelang dan dilaksanakan di depan orang banyak dengan berdasarkan penawaran yang lebih tinggi sebagai pembeli barang lelang, setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.⁴⁸

Berdasarkan definisi lelang tersebut jelas pelaksanaan dari penjualan di muka umum atau lelang dibuka dengan adanya suatu pemberitahuan tentang akan dilakukannya penjualan secara umum atau

⁴⁵Abdullah bin Muhammad, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah: Dalam Pandangan 4 Mazhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017), hlm. 24-25.

⁴⁶Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988), hlm. 510.

⁴⁷Rachmadi, *Mengikuti lelang di kantor lelang*, (Yogyakarta: LeutikaPrio, 2020), hlm.3

⁴⁸M. Marwan dan Jimmy, *Kamus Hukum: Dictionary of Law Complate Edition*, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), hlm. 404.

lelang terhadap benda-benda yang akan disebutkan dalam pengumuman lelang berikut tempat dan waktu diadakan lelang. Pengumuman lelang merupakan wujud dari asas keterbukaan dari penjualan lelang.

b. Keunggulan Jual Beli Lelang:

Sebagai suatu instrument pasar, penjualan secara lelang mempunyai kelebihan atau keunggulan, adapun beberapa keunggulan dari jual beli lelang adalah sebagai berikut:

- 1) *Adil*, karena lelang dilakukan secara terbuka (transparan), tidak ada prioritas di antara peserta lelang, kesamaan hak dan kewajiban antara peserta akan menghasilkan pelaksanaan lelang yang objektif.
- 2) *Aman*, karena lelang disaksikan, dipimpin dan dilaksanakan oleh Pejabat Lelang selaku pejabat umum yang bersifat independen. Oleh karena itu, pembeli lelang pada dasarnya cukup terlindungi. Sistem lelang mengharuskan pejabat lelang meneliti lebih dulu secara formal tentang keabsahan penjual dan barang yang akan dijual (subjek dan objek lelang). Bahkan pelaksanaan lelang harus lebih dahulu diumumkan sehingga memberikan kesempatan apabila ada pihak-pihak yang ingin mengajukan keberatan atas penjualan tersebut. Oleh karena itu, penjualan secara lelang adalah penjualan yang aman.
- 3) *Cepat dan efisien*, karena lelang didahului dengan pengumuman lelang, sehingga peserta lelang dapat berkumpul pada saat hari lelang dan pada dasarnya menggunakan sistem penawaran yang bersifat kompetitif dan transparan.

- 4) *Mewujudkan harga yang wajar*, karena dari setiap pelaksanaan lelang pada dasarnya menggunakan sistem penawaran yang bersifat kompetitif dan transparan.
- 5) *Memberikan kepastian hukum*, karena dari setiap pelaksanaan lelang di terbitkan Rislal lelang yang merupakan autentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna.⁴⁹

Dari beberapa keunggulan jual beli lelang dapat diketahui bahwa jual beli lelang memiliki kepastian hukum, dilaksanakan dengan cepat, mewujudkan harga yang optimal, wajar karena memiliki sistem penawaran yang kompetitif dan efisien.

c. Syarat-Syarat Lelang (Muzayadah)

Lelang merupakan salah satu bentuk transaksi jual beli, walaupun dengan cara yang berbeda dari sistem jual beli lainnya lelang tetap memiliki kesamaan dalam rukun dan syarat-syaratnya sebagaimana syarat-syarat jual beli pada umumnya. Adapun rukun dan syarat jual beli lelang terdapat kriteria umum sebagai pedoman pokok yaitu sebagai berikut:⁵⁰

- 1) Transaksi dilakukan oleh pihak yang cakap hukum atas dasar saking sukarela (*'an taradhin*).
- 2) Yang menjadi objek lelang harus barang yang halal dan bermanfaat.
- 3) Objek harus berdasarkan kepemilikan (kuasa) penuh dari penjual.
- 4) Tidak adanya manipulasi dari objek lelang artinya barang harus jelas dan transparansi.

⁴⁹Rachmadi Usman, *Hukum Lelang*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016), hlm. 27.

⁵⁰*Ibid.*

- 5) Penjual harus memiliki kesanggupan penyerahan barang.
- 6) Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan.
- 7) Tidak menggunakan cara yang mengarah kepada tindakan kulusi, suap dan memenangkan tawaran.⁵¹

Adapun syarat-syarat dalam melakukan jual beli lelang adalah sebagai berikut:

- 1) Bukti dari pemohon lelang
- 2) Bukti pemilik atas barang
- 3) Keadaan fisik suatu barang

Bukti dari pemohon lelang dibutuhkan untuk mengetahui bahwa pemohon lelang benar-benar orang yang berhak dalam melakukan pelelangan atas barang yang akan dilelang tersebut. Sedangkan bukti pemilik atas barang merupakan bukti untuk mengetahui apakah barang tersebut benar-benar milik/hak pelelang. Bukti kepemilikan ini bisa berupa sertifikat (surat hak atas tanah), bukti pembayaran dan lainnya.⁵²

Keadaan fisik suatu barang diperlukan untuk mengetahui keadaan sebenarnya dari barang yang akan dilelang. Adapun untuk barang yang bergerak harus ditunjukkan mana barangnya dengan jelas. Sedangkan untuk barang tetap seperti rumah dan tanah harus ditunjukkan sertifikatnya, apakah sertifikatnya sudah terdaftar atau dibukukan. Jika tanah tersebut

⁵¹*Ibid.*

⁵²*Ibid.*

belum didaftarkan harus diketahui dimana letaknya, bagaimana keadaan tanahnya serta adanya keterangan dari pejabat setempat.⁵³

4. Tempat Pelelangan Ikan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pelelangan berasal dari kata lelang yang berarti penjualan di hadapan orang banyak dengan tawar yang mengatasi di pimpin oleh seorang juru lelang. Artinya, dalam penjualan lelang atau pelelangan, para calon pembeli di beri kesempatan untuk mengajukan tawaran harga sesuai kemampuan dan minat masing-masing. Tempat pelelangan ikan (TPI) merupakan pusat penampungan beberapa jenis ikan hasil tangkap dilaut.⁵⁴

Pelelangan ikan adalah suatu kegiatan ditempat pelelangan guna mempertemukan dua belah pihak yaitu penjual dan pembeli sehingga terjadi tawar-menawar dengan harga ikan yang telah disepakati bersama. Sebelum ada sistem pelelangan ikan nelayan menjual sendiri hasil tangkapannya kepada konsumen setempat dengan cara barter atau dengan nilai uang tertentu. Namun, kegiatan ini tidak terorganisir dengan baik dan kurang efisien serta tidak menjaga mutu ikan hal ini membuat harga ikan cenderung menurun.⁵⁵

Melihat kenyataan ini, maka diupayakan adanya perubahan dalam hal pemasaran ikan. Ikan-ikan hasil tangkapan nelayan harus dijual dengan cara

⁵³Abdul manan, *Penerapan Hukum Acara Prdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 338.

⁵⁴Kholish Mahyuddin, *Panduan Lengkap Agribisnis Patin*, (Jakarta: Penebar Swadata, 2010), hlm. 187.

⁵⁵*Ibid.*

lelang sehingga harga tidak hanya ditentukan oleh pembeli dan mutu ikan dapat dipertahankan serta nilai jual yang diperoleh nelayan menjadi lebih besar. Untuk memperlancar proses pelelangan ikan ini, pemerintah telah membangun tempat pelelangan ikan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan bongkat muat dan pasar ikan beserta fasilitas lainnya yang disediakan.⁵⁶ Tempat pelelangan ikan merupakan sentral tempat pelelangan ikan. Adanya TPI (Tempat Pelelangan Ikan) memberikan kontribusi dan manfaat bagi para nelayan untuk menjaga kestabilan harga jual. TPI membantu nelayan dari cengkraman dan jeratan para tengkulak yang memberi ikan dengan harga di bawah standar yang telah ditentukan.⁵⁷ Pelelangan ikan ini antara lain bermanfaat untuk meningkatkan nilai jual ikan hasil tangkapan nelayan sehingga dapat mengubah taraf hidup nelayan ke arah yang lebih sejahtera.⁵⁸

5. Ekonomi Islam

a. Pengertian Ekonomi Islam

Istilah ekonomi secara sederhana dirujuk pada bahasa Yunani berakar dari kata *oikos* (keluarga, rumah tangga), dan *nomos* (peraturan, aturan, hukum). Secara garis besar, ekonomi diartikan sebagai “aturan rumah tangga” atau “manajemen rumah tangga”.⁵⁹

⁵⁶Wahab, *Perdagangan Nasional*, (Jawa tengah: Alptin, 2010), hlm. 7.

⁵⁷*Ibid.*

⁵⁸Puji Rahayu, *Profesi Seri Nelayan*, (Semarang: ALPRIN ,2019), hlm.42-43.

⁵⁹*Ibid.*

TIM P3EI Universitas Islam Indonesia merumuskan ekonomi sebagai hal yang mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa. Ruang lingkup ekonomi meliputi satu perilaku manusia dalam konsumsi, produksi dan distribusi.⁶⁰

Pendapat S.M. Hasanuzzaman. Ekonomi islam adalah pengetahuan dan aplikasi ajaran-ajaran dan aturan-aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam pencarian dan eksplorasi berbagai sumber daya, untuk memberikan kepuasan lahir dan batin bagi manusia serta memungkinkan mereka melaksanakan seluruh kewajiban mereka terhadap sang kholiq dan masyarakat. Selanjutnya menurut khursid Ahmad. Ilmu ekonomi islam adalah suatu upaya sistematis untuk mencoba memahami permasalahan ekonomi dan perilaku manusia dalam hubungannya dengan permasalahan tersebut dari sudut pandang Islam.⁶¹ M. Abdul Mannan secara induktif memberikan definisi ekonomi Islam sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi kerakyatan yang diilhami oleh nilai-nilai dan ajaran Islam.⁶²

Dari beberapa pengertian ekonomi Islam di atas, dapat dijelaskan bahwa kajian dan pembahasan ekonomi Islam berdimensi kerakyatan dengan sistem yang dibangun merupakan representasi dari ajaran nilai-nilai Islam. Adapun kepentingan atau tujuan dari ekonomi Islam

⁶⁰TIM P3EI UII, *Ekonomi Islam*, Cet, ke-12, (Jakarta: RajaGrafindo, 2012), hlm. 14.

⁶¹Muhammad Nafik Hadi Ryandono, *Filsafat Ilmu Ekonomi Islam*, (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018), hlm.286.

⁶²M. Abdul Mannan, *Ekonomi Islam, Teori dan Praktek, terj. Nastangin*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 19.

merupakan suatu bentuk ijtihad dari penerjemahan ajaran agama (*maqashid syari'ah*). Tujuan utama ekonomi islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan duniadan akhirat (*falah*), serta kehidupan yang baik dan terhormat (*al-hayah al-tayyibah*). Ini merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam, yang tentu saja berbeda secara mendasar dengan pengertian kesejahteraan dalam ekonomi konvensional.⁶³

b. Prinsip Sistem Ekonomi Islam

Metwally menyatakan bahwa sistem Ekonomi Islam sendiri memiliki prinsip-prinsip mendasar antara lain:⁶⁴

1) Berorientasi pada kehidupan Dunia dan Akhirat

Islam tidak memisahkan antara kehidupan dunia dan akhirat. Sumber daya Alam dipandang sebagai bagian dari amanah Allah SWT yang dititipkan kepada manusia yang mana penggunaannya akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak, artinya setiap aktivitas manusia di dunia akan berdampak pada kehidupan di akhirat. Oleh karena itu, setiap aktivitas keduniaan tidak boleh mencederai kehidupan akhirat. Allah SWT menegaskan dalam Al-Qur'an (QS. Al-Qashash: 77):

⁶³Mshur, *Filsafat Ekonomi Islam*, (Jateng: Lakeisha Anggota IKAPI, 2020) ,hlm.190.

⁶⁴Metwally, *Teori dan Model Ekonomi dan Islam*, (Jakarta: PT Bangkit Daya Insana, edisi pertama, 1995), hlm. 30.

وَأَبْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”⁶⁵

Apa yang kita lakukan di dunia ini pada hakikatnya adalah untuk mencapai tujuan akhirat. Prinsip ini jelas berbeda dengan prinsip sistem ekonomi kapitalis dan sosialis yang mana pada sistem tersebut hanya bertujuan untuk kehidupan dunia saja.

2) Menciptakan Keseimbangan antara Pribadi dan Umum

Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang tidak boleh merugikan orang lain secara umum. Prinsip ini telah Allah SWT sampaikan dalam firman-Nya yang artinya: *“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu,*

⁶⁵Q.S Al-Qasas: 77, dikutip dari Tim Syghma Media Inovasi, *Alquran Terjemahan dan Tajwid*, (Jawa Barat: 2014), hlm. 394

Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya” (QS. Al-Hasyr:7)⁶⁶

Dari ayat di atas jelas bahwa kegiatan ekonomi tidak boleh mengabaikan dan merugikan orang lain. Prinsip ini harus tercermin pada setiap kebajikan individu maupun lembaga.

3) Terjaminnya Hak Individu

Setiap individu dalam perekonomian Islam diberikan kebebasan untuk beraktivitas baik secara individu maupun kelompok dalam mencapai sebuah tujuan. Namun kebebasan tersebut tidak boleh melanggar aturan yang telah ditetapkan Allah SWT dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah.⁶⁷

Prinsip kebebasan ini sangat berbeda dengan prinsip kebebasan pada sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis. Dalam sistem kapitalis, kebebasan individu tidak dibatasi oleh norma akhirat, sehingga tidak ada perbedaan pendapatan halal maupun haram. Sementara dalam sistem sosialis tidak ada kebebasan individu, karena seluruh aktivitas ekonomi diatur oleh Negara.

4) Hak Milik Individu diakui oleh Negara

Islam memperbolehkan Negara untuk mengatur masalah perekonomian masyarakat, agar seluruh kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik dan terhindar dari monopoli dan ketidakadilan.

⁶⁶Q,S Al-Hasyr: 7, dikutip dari Tim Syghma Media Inovasi, *Alquran Terjemahan dan Tajwid*, (Jawa Barat: 2014), hlm. 546

⁶⁷Muklis, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Surabaya, Jakad Media Publishing, 2014), hlm. 29

Negara juga berkewajiban memberikan jaminan sosial dan keamanan agar seluruh masyarakat dapat hidup secara layak.

5) Harta yang Hanya Sebuah Titipan

Islam menghormati hak milik pribadi, namun sejatinya harta yang diberi hanyalah sebuah titipan yang mana dalam penggunaannya tidak boleh merugikan orang lain dan bertentangan dengan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT. Kepemilikan dalam Islam tidak mutlak, karena kepemilikan yang sesungguhnya hanyalah milik Allah SWT.

6) Kewajiban Membayar Zakat

Zakat harus dikeluarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas nisab. Zakat merupakan alat distribusi kekayaan dari orang-orang kaya untuk diberikan kepada orang-orang miskin yang sangat membutuhkan. Begitu pentingnya zakat sehingga Allah SWT menyangdingkan perkara zakat dengan perkara shalat wajib, Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾
“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku' (QS. Al-Baqarah:43)”⁶⁸

7) Riba adalah Haram

Islam telah melarang perbuatan riba dalam segala bentuknya. Secara tegas dan jelas hal ini tercantum dalam surah Ali Imron ayat 130, di mana Allah SWT berfirman:

⁶⁸Q,S Al-Baqarah: 43, dikutip dari Tim Syghma Media Inovasi, *Alquran Terjemahan dan Tajwid*, (Jawa Barat: 2014), hlm. 7

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا
اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (Qs. Ali Imran:130).”⁶⁹

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa Ekonomi Islam tidak hanya sekedar bertujuan pada pembangunan fisik material atau individu, mesyarakat dan Negara saja, tetapi juga memperhatikan pembangunan aspek-aspek lainnya yang juga merupakan elemen penting bagi kehidupan yang sejahtera dan bahagia. Begitulah Al-Quran secara rinci mendefinisikan tentang kesejahteraan, kesejahteraan dimulai dari kesejahteraan individu-individu yang mempunyai tauhid yang kuat, kemudian tercukupi kebutuhan dasarnya dan tidak berlebih-lebihan, sehingga suasana menjadi aman, nyaman dan tentram.

⁶⁹Q,S Ali Imran: 130, dikutip dari Tim Syghma Media Inovasi, *Alquran Terjemahan dan Tajwid*, (Jawa Barat: 2014), hlm. 66

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, yaitu melakukan penelitian *field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian mendalam mencakup keseluruhan yang terjadi di lapangan, dengan tujuan untuk mempelajari secara mendalam tentang latar belakang keadaan sekarang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, data dalam penelitian tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitung lainnya melainkan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹

Dalam operasionalnya, metode deskriptif kualitatif digunakan sebagai proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif baik berupa kata-kata (ungkapan) tertulis atau lisan yang diperoleh langsung dari lapangan yang berkaitan dengan tema penelitian Analisis Kelembagaan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan dalam Perspektif Ekonomi Islam di Wilayah Pulau Baai Kota Bengkulu.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Sosio-Ekonomi, pendekatan sosiologi ekonomi sebagai pendekatan

¹Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 6.

sosiologis yang diterapkan pada fenomena ekonomi.² sosiologis yang dimaksudkan di sini adalah konsep-konsep, variable-variabel, teori-teori, dan metode yang digunakan dalam sosiologi untuk memahami kenyataan sosial, termasuk didalamnya kompleksitas aktifitas yang berkaitan dengan ekonomi seperti produksi, konsumsi, distribusi dan lainnya.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Tempat penelitian ini berlokasi di Pulau Baai Kota Bengkulu. Lokasi dipilih berdasarkan pengamatan bahwa Tempat Pelelangan Ikan (TPI) berada di Pulau Baai dan bahwa masyarakat di Pulau Baai yang heterogen mata pencahariannya sebagai Nelayan. Pada lokasi ini terdapat lembaga keuangan tempat nelayan menabung dan beberapa koperasi di lokasi ini juga terdapat pemberdayaan yang diterapkan kepada masyarakat. Hal inilah yang menarik untuk peneliti lakukan penelitian.

C. Informan Penelitian

Adapun penentuan Informan dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *purposive*. Yaitu informan yang sengaja di pilih dengan maksud dan tujuan yang akan mewakili atas masalah yang diteliti. Adapun yang dipilih yaitu pengelola TPI Pulau Baai, dan beberapa nelayan.

D. Teknik Penentuan Informen

Dalam menentukan informen, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang sesuai

²Damsar dan Indramayu, *Pengantar Sosiologi Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009), hlm. 14.

dengan kriteria yang ditentukan.³ pertimbangan tertentu ini misalnya, orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti.⁴

Informen pertama merupakan orang yang memiliki kendali dan pengaruh dalam organisasi. Informen ini dipilih agar bisa “membuka pintu” untuk mengendalikan keseluruhan medan secara luas. Informen pertama dalam penelitian ini yaitu Pengelola tempat pengolahan ikan (TPI) Pulau Baai Kota Bengkulu.

Sedangkan informen kedua adalah orang yang dianggap paling mengetahui mengenai data dan informasi yang dibutuhkan peneliti. Data yang diperlukan dalam hal ini adalah data mengenai kegiatan para nelayan. Sehingga informen kedua adalah beberapa masyarakat nelayan di pulau Baai Kota Bengkulu.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data di lokasi, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data diantaranya:

1. Melalui Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuisioner selalu

³Nawawi, *Metode Penelitian Fiqh dan Ekonomi Syariah*, (Malang: Madani Media, 2019), hlm. 106-107.

⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014). Hal.32.

berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain.

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Metode ini dimaksudkan agar peneliti mampu mengamati, melihat dan menafsirkan langsung masalah Strategi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pondok Besi Kota Bengkulu Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan dalam Perspektif Ekonomi Islam.

2. Metode Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara Tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada masalah, tujuan penelitian.⁵ Metode ini digunakan sebagai metode pokok dalam memperoleh data dari lokasi penelitian sehingga bentuk yang digunakan adalah bebas terpimpin yaitu penulis terlebih dahulu mempersiapkan kerangka pertanyaan kepada para responden diberi kebebasan untuk menjawab. Peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang terlibat seperti pengelola Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pondok Besi Kota Bengkulu, dan beberapa orang Nelayan.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan wawancara mendalam (*indepth interview*) yaitu wawancara yang dilakukan peneliti kepada subjek penelitian dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dalam mencari

⁵*Ibid.*, 115.

informasi berdasarkan tujuan, subjek yang diwawancarai terlibat, mengetahui mendalam tentang fokus penelitian.

Metode (*indepth interview*) ini digunakan peneliti untuk mewawancarai Kepala UPT Pelabuhan Perikanan Pulau Baai, Seksi Staff Operasional Perikanan Pulau Baai, Pedagang Pengumpul dan beberapa orang masyarakat nelayan. Metode ini digunakan untuk menggali informasi tentang perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan manajemen pengelolaan tempat pelelangan ikan di Pulau Baai.

3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu data yang diperoleh dari sumber bukan manusia (*non-human resources*), dokumentasi terdiri atas buku harian, otobiografi, surat-surat pribadi, berita Koran, brosur bulletin, foto-foto, surat-surat serta dokumen-dokumen resmi.⁶ Metode ini juga biasanya dilakukan melalui foto dan rekaman. Secara sempit, Kartodirdjo mengatakan bahwa dokumen didefinisikan sebagai kumpulan data verbal yang berbentuk tulisan atau gambar seperti jurnal, kenang-kenangan, laporan dan sebagainya.

F. Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi untuk menguji keabsahan data yang digunakan. Peneliti memilih untuk menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Dimana triangulasi sumber merujuk pada upaya peneliti untuk mengakses sumber-sumber yang lebih bervariasi guna

⁶Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 195.

memperoleh data berkenaan dengan persoalan yang sama. Alasan penggunaan triangulasi sumber dikarenakan triangulasi sumber sesuai dengan kebutuhan dari peneliti yang ingin menguji keabsahan data dengan cara mengecek data yang didapat, kemudian data tersebut dideskripsikan, dikategorikan, dan dianalisis sehingga tercipta suatu kesimpulan. Triangulasi yang digunakan adalah membandingkan antara hasil wawancara yang telah dilakukan dengan dokumen berupa laporan pertanggung jawaban, rencana-rencana strategi TPI dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan.

G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam lalu di analisis. Setelah berhasil mengumpulkan data, yaitu Informasi tentang Strategi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pulau Baai Brngkulu Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan Dalam Perspektif Ekonomi Islam, data dalam penelitian kualitatif dilakukan mulai sejak awal sampai sepanjang proses penelitian berlangsung, analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda dan mengategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan focus atau masalah yang ingin dijawab.

Penelitian ini akan menggunakan teori fungsi manajemen POAC (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*) dari G.R. Terry. Penelitian ini juga menggunakan teknik analisis data lapangan model *Miles and Huberman*, dimana penganalisaan data dalam penelitian dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.

Pada saat melakukan wawancara peneliti, sudah melakukan analisis terhadap hasil jawaban dari wawancara. Menurut *Miles and Huberman*, aktivitas dalam menganalisa data terbagi menjadi tiga tahapan, Yaitu *data collection*, *data reduction*, *data display* dan *conclusions drawing or verifying*.⁷

1. Penumpukan data (*data collection*)

Pengumpulan data pada penelitian ini melalui beberapa instrument yaitu observasi, dokumentasi dan wawancara. Data yang dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan problem-ploblem strategi tempat pelelangan ikan dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan ditinjau dari perspektif ekonomi Islam.

2. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data berarti merangkum, memilih sesuatu yang pokok, memfokuskan pada sesuatu yang dianggap penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari lagi jika diperlukan. Dalam konteks sekarang, reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti computer mini, dengan memberi kode-kode pada aspek-aspek tertentu. dengan demikian, reduksi data termasuk dalam proses pengumpulan data peneliti. Pada tahap ini, peneliti merekam data lapangan dalam bentuk catatan-catatan lapangan (*field note*), menafsirkan dan menyeleksi.⁸

⁷Nawawi, *Metode Penelitian Fiqh...*, hlm. 121.

⁸Boedi Abdullah dan Beni ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hlm. 221-222

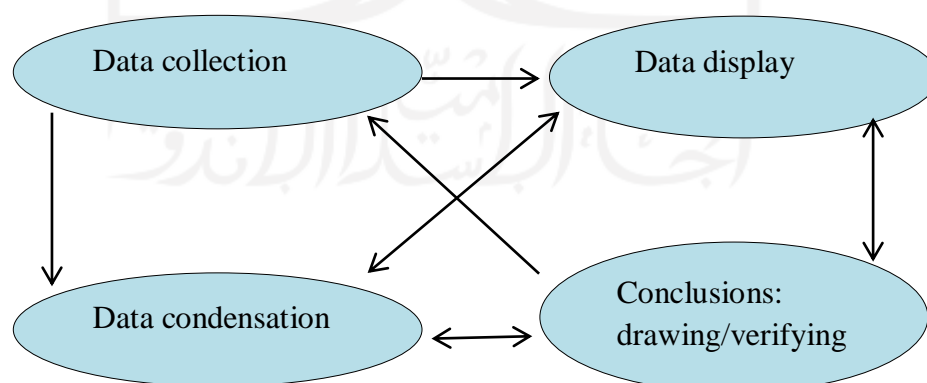
3. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah reduksi data, tahap berikutnya adalah *display* data atau penyajian data dalam bentuk narasi teks. Data yang tersaji dianalisis, disusun secara sistematis dan simultan untuk menjelaskan dan menjawab pokok permasalahan penelitian. Melalui penyajian data, data dapat terorganisir, tersusun dalam pola hubungan secara sistematis, sehingga hasilnya akan mudah dipahami.

4. *Conclusion Drawing or Verification* (Kesimpulan).

Langkah ini merupakan analisis lanjutan dari reduksi dan penyajian data. Dengan kata lain, analisis penelitian kualitatif dimulai dari reduksi data, penyajian, dan terakhir adalah verifikasi merupakan inti temuan penelitian secara eksplisit. Sehingga kesimpulan dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.

Sehingga Metode Teknik Analisa data menurut *Miles dan Huberman* dapat dijelaskan dalam diagram berikut:⁹



Sumber: Matthew B. Miles, A. Michael Huberman and Jhonny Saldana, *Qualitative Data Analisis* (A Methods Sourcebook), 2014 SAGE Publications.

⁹Matthew B. Miles, A. Michael Huberman and Jhonny Saldana, *Qualitative Data Analisis*, (America:SAGE Publications, 2014), hlm. 10

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profile UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan dan Tempat Pelelangan Ikan (PPI dan TPI) Pulau Baai Kota Bengkulu.

1. Sejarah Berdirinya PPI Pulau Baai

PPI (Pangkalan Pendaratan Ikan) Pulau Baai Bengkulu dibangun pada tahun 1991 dan diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 9 Juli 1992. Kemudian, pada tahun 1992-2008, statusnya sebagai Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI). Pada tahun 2008, setelah penerapan PP. No. 41 Tahun 2008 berganti nama menjadi Balai Pelabuhan Perikanan (BPP) Pergub No. 22 Tahun 2008. Sejak berdiri, Pelabuhan Perikanan berdampak sebagai penggerak ekonomi masyarakat nelayan, bukan saja dari Kota Bengkulu tetapi ada juga nelayan andon dari Sumatera Barat, Lampung, dan Sibolga Sumatera Utara. Sampai saat ini jumlah nelayan yang menggunakan fasilitas Pelabuhan Perikanan setiap harinya lebih kurang 1000 orang.¹

2. Kriteria Teknis Pangkalan Pendaratan Ikan.

Berdasarkan Permen No. PER. 08/MEN/2012 tentang Kepelabuhan Perikanan:²

- 1) Mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan diperairan Indonesia.

¹Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu, 2020

²Pedoman Tempat Pelelangan Ikan Pulau Baai Kota Bengkulu ditutup pada tanggal 7 Agustus 2020.

- 2) Memiliki fasilitas tambat labu untuk kapal perikanan sekurang-kurangnya 5 GT.
- 3) Panjang dermaga sekurang-kurangnya 50m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya -1m.
- 4) Mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 15 unit, atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 75 GT, dan
- 5) Memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 1 ha.³

3. Kriteria Operasional.

Berdasarkan Permen No. PER. 08/MEN/2012 tentang Pelabuhan Perikanan:

Terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 2 ton per hari.⁴

2. Eksistensi PPI Pulau Baai Kota Bengkulu

- 1) Berdasarkan UU No.23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menerangkan bahwa pada lampiran halaman 103, bahwa tugas Provinsi penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan adalah kewenangan provinsi.
- 2) Berdasarkan Permen No. PER. 08/Men/2012 tentang Pelabuhan Perikanan, bahwa Pelabuhan Perikanan Pulau Baai diklasifikasikan kelas D, yang selanjutnya disebut Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).
- 3) Pergub Bengkulu No. 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Uraian Tupoksi UPT Dinas dan Badan Provinsi Bengkulu.⁵

³Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu, 2020.

⁴*Ibid.*

- 4) Garis pantai Propinsi Bengkulu sepanjang 525 km.
 - 5) Dari 10 kabupaten/Kota, 7 diantaranya berada di wilayah pesisir.
 - 6) Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Pulau Baai merupakan satu-satunya penyangga produksi perikanan tangkap di Propinsi Bengkulu.
3. Sasaran Pembentukan PPI Pulau Baai
- 1) Memberikan pelayanan terhadap nelayan
 - 2) Sebagai tempat tambat labuh, bongkar muat kapal ikan
 - 3) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan nelayan serta pembinaan perkoperasian nelayan
 - 4) Menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB)
 - 5) Menyediakan air bersih
 - 6) Peningkatan produksi perikanan tangkap
 - 7) Perluasan perdagangan ikan domestic⁶
4. Jasa Pelayanan Pelabuhan

Pelayanan kapal Perikanan: Tambat Labuh, Pengisian BBM, Muatan es dan air bersih, Perbaikan alat tangkap. Pelayanan Kesyahbandaran: Surat persetujuan berlayar, keselamatan pelayaran, pengawasan perikanan. Pelayanan Pengolahan Ikan: Penyimpanan ikan, pengendalian kualitas ikan, pengangkutan ikan, pengepakan ikan. Pelayanan Masyarakat umum: Penyediaan kebutuhan pokok, Wisata bahari.⁷

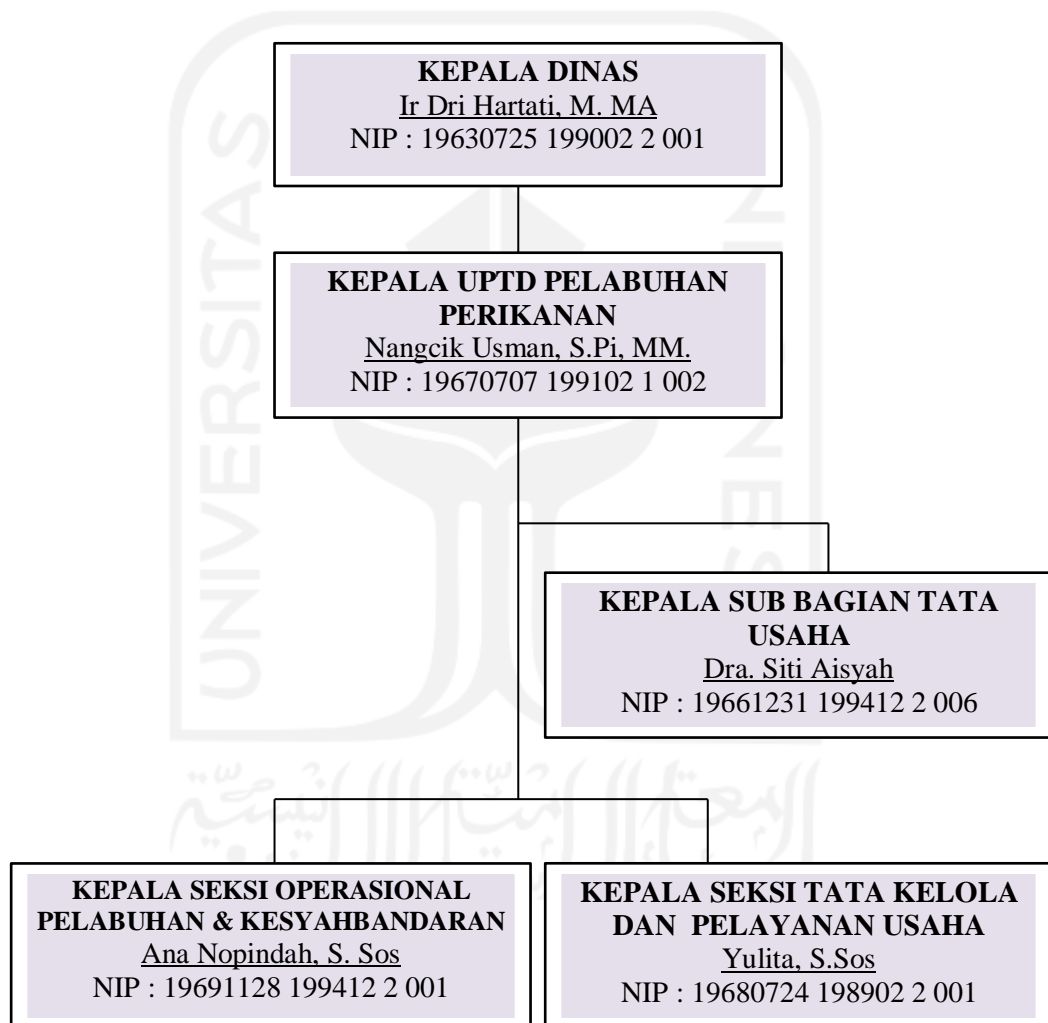
⁵*Ibid.*

⁶Dokumentasi Tempat Pelelangan Ikan Pulau Baai Kota Bengkulu dikutip pada tanggal Agustus 2020.

⁷*Ibid.*

5. Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelabuhan Perikanan Pulau Baai.⁸

**STRUKTUR ORGANISASI
UPT PELABUHAN PERIKANAN PULAU BAAI**



Berdasarkan Pergub No. 64 Tahun 2017.

⁸Dokumentasi Pelabuhan Perikanan Pulau Baai Kota Bengkulu dikutip pada Agustus 2020.

6. Tempat Pelelangan Ikan Pulau Baai.

Tempat Pelelangan Ikan Pulau Baai berada dibawah UPT Pangkalan Pendaratan Ikan Pulau Baai terletak di Desa Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu.

PPI Pulau Baai Berbatasan dengan:

Sebelah utara : Tanah Pelindo II

Sebelah selatan : Pelabuhan ASDP

Sebelah timur : Jalan Raya

Sebelah Barat : Samudra Hindia

Letak PPI Pulau Baai (Google Earth)



Tempat Pelelangan Ikan Pulau Baai merupakan Unit Pelaksanaan Teknis dari Dinas Kelautan dan Perikanan untuk mengelola potensi perikanan laut yang ada di Kota Bengkulu, meningkatkan pendapatan nelayan, pembudidayaan ikan dan pelaku usaha kelautan dan perikanan.

7. Sarana dan prasarana PPI Pulau Baai

Kondisi dari sarana dan prasarana yang ada di Pelabuhan Perikanan Pulau Baai Kota Bengkulu dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4
Sarana dan Prasarana TPI Pulau Baai

No.	Sarana dan Prasarana	Luas/Volume	Kondisi	Ket
1.	Tanah area dan Pelabuhan	50.000 M2	Baik	
2.	Panjang Dermaga	236 M	Baik	
3.	Jalan Masuk Area Parkir	2700 M	Baik	Hotmik
4.	Gedung Tempat Pelelangan	450 M2	Baik	
5.	Kantor UPT Pelabuhan Perikanan	306 M2	Baik	
6.	Gedung Pertemuan Nelayan	375 M2	Baik	
7.	Toilet Umum	60 M2	Rusak Ringan	
8.	Gudang Es	42 M2	Baik	
9.	Kantor Penjualan BBM	24 M2	Baik	
10.	Rumah Dinas	36 M2	Rusak Ringan	3 unit
11.	Rumah Dinas	54M2	Rusak Ringan	1 unit
12.	Pintu Gerbang	1 unit	Baik	
13.	Pagar Keliling	1 unit	Baik	
14.	Menara Air	1 unit	Baik	
15.	Instalasi Air Bersih	1 unit	Baik	
16.	Sumur Bor	2 unit	Baik	
17.	Pos Jaga	1 unit	Baik	
18.	Bangsai Pscking	1 unit	Baik	
19.	Gudang	1 unit	Baik	
20.	Bangsai Perbaikan Jaring	1 unit	Baik	

21.	Kantor Pengawas Terpadu	1 unit	Baik	
22.	Mushola	1 unit	Baik	
23.	Gudang Ikan Permanen	32 unit	Baik	
24.	Mes Nelayan	4 unit	Rusak Ringan	
25.	Gedung Bengkel Nelayan	1 unit	Rusak Berat	
26.	Pabrik Es Mini	1 unit	Rusak Berat	
27.	Food Presesor	1 unit	Rusak Berat	
28.	Cool Storage	1 unit	Rusak Berat	
29.	Docking	1 unit	Rusak Berat	
30.	Bangsas Pasar	3 unit	Baik	
31.	Halaman Parkir	1 unit	Baik	
32.	Listrik tenaga Surya	13 unit	Baik	
33.	Gapura	1 unit	Baik	
34.	Gedung Syahbandar	60 m2	Baik	

(Sumber, TPI Pulau Baai, 2020)

Dari tabel yang dijelaskan di atas dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana yang ada di TPI Pulau Baai masih harus terus dilakukan perbaikan-perbaikan terutama pada fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya. Seperti toilet umum, rumah dinas, yang mengalami rusak ringan dan dermaga, mess nelayan, Gedung Bengkel Nelayan, Pabrik Es Mini, Food Prosesor, cool Storage, yang mengalami kerusakan berat.⁹

⁹Pedoman Tempat Pelelangan Ikan Pulau Baai Kota Bengkulu ditutup pada tanggal 7 Agustus 2020.

Tabel 5
Jenis Kapal Menurut Ukuran (GT)

Jenis Kapal	Gross Tonase (GT)	Jumlah
Kapal Motor	1. < 5 GT	18 Unit
	2. 5-10 GT	153 Unit
	3. 10-30 GT	17 Unit
	4. >30 GT	8 Unit
Motor Tempel	-	12 Unit
Perahu Tanpa Motor	-	-

(Sumber, TPI Pulau Baai, 2020)

Dengan adanya jenis dan habitat yang berbeda, maka alat tangkap yang digunakan untuk menangkap ikan juga berbeda. Adapun jenis alat tangkap yang digunakan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pulau Baai dapat dilihat dalam Tabel berikut:

Tabel 6
Jenis Alat Tangkap

No.	Alat Tangkap Yang digunakan
1.	Gillnet Monofilament
2.	Gillnet Multifilament
3.	Pancing Tonda
4.	Pancing Rawai Dasar
5.	Bagan Apung
6.	Purse Seine
7.	Bubu
8.	Trammel Net

(Sumber, TPI Pulau Baai, 2020)

Berbagai jenis ikan hasil tangkapan dapat diperoleh di Indonesia, jenis ikan yang didapatkan tergantung karakteristik perairan yang ada adapun jenis ikan dominan yang ada di perairan pulau Baai kota Bengkulu di jelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 7
Jenis Ikan Dominan Yang di Tangkap

No	Jenis Ikan	Nama Ilmiah
1	Ikan Tuna	<i>Thunnini</i>
2	Ikan Tongkol	<i>Euthynnus affinis</i>
3	Ikan Cakalang	<i>Scomber negletus</i>
4	Ikan Layang	<i>Decapterus</i>
5	Ikan Kembung	<i>Rastrelliger</i>
6	Kakap	<i>Lutjanidae</i>
7	Kerapu	<i>Epinephelus coioides</i>

(Sumber, TPI Pulau Baai, 2020)

B. Data Informen Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive*. Teknik *purposive* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti. Adapun yang menjadi informen dalam penelitian ini Informen pertama merupakan orang yang memiliki kendali dan pengaruh dalam organisasi. Informen ini dipilih agar bisa “membuka pintu” untuk mengendalikan keseluruhan medan secara luas. Informen pertama dalam penelitian ini yaitu Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Pulau Baai yaitu Bapak Nangcik Usman, S. Pi. MM.

Sedangkan informen kedua adalah orang yang dianggap paling mengetahui mengenai data dan informasi yang dibutuhkan peneliti. Data yang diperlukan dalam hal ini adalah data mengenai kegiatan para nelayan. Sehingga informen kedua adalah Seksi Staf Operasional Pelabuhan Perikanan di TPI Pulau Baai dan beberapa masyarakat nelayan di pulau Baai Kota Bengkulu.

Tabel 8
Daftar Informen

No.	Nama	Keterangan	Jenis Kelamin (L/P)
1.	Nangcik Usman, S. Pi. MM.	Kepala UPT Pelabuhan Perikanan.	L
2.	Rianda	Seksi Staf Operasional Pelabuhan Perikanan	L
3.	Lis	Pedagang Pengumpul	L
4.	Nurdin	Pedagang Pengumpul	L
5.	Afri	Pedagang Pengumpul	L
6.	Tedi	Pedagang Pengumpul	L
7.	Anton	Nelayan	L
8.	Jaya	Nelayan	L
9.	Zaid	Nelayan	L
10.	Rasuli	Nelayan	L
11.	Hermansyah	Nelayan	L

(Sumber: Peneliti, 2020)

Berdasarkan tabel di atas peneliti akan menjelaskan peran informen pada penelitian ini:

- 1) Kepala UPT Pelabuhan Perikanan Pulau Baai adalah orang yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan penyusunan rencana tugas, pelaksanaan kegiatan teknis dan kegiatan operasional pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan.
- 2) Seksi Staff Operasional Pelabuhan Perikanan Pulau Baai merupakan orang yang memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pemantauan, evaluasi,

membina, mengawasi serta menilai hasil kerja staf di lingkungan seksi pemberdayaan pelabuhan perikanan dan TPI agar melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan.

- 3) Para Pedagang Pengumpul merupakan orang yang telah ditunjuk oleh TPI untuk menampung atau membeli hasil tangkap (produksi) perikanan yang diperoleh nelayan pada tempat pelelangan ikan pulau Baai.
- 4) Masyarakat nelayan merupakan orang yang bekerja sebagai pencari ikan (nelayan) yang menjadi target rencana manajemen tempat pengolahan ikan di Pulau Baai Kota Bengkulu.

C. Aktivitas Tempat Pelelangan Ikan Pulau Baai Kota Bengkulu:

1. Pendaratan Ikan Hasil Tangkap

Pendaratan Hasil Tangkap di TPI Pulau Baai Kota Bengkulu dilakukan setiap hari mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jum'at kecuali hari Sabtu dan Minggu, kapal yang mendarat tidak berbarengan waktu berlabuhnya. Sistem pendaratan yang dilakukan disini Begitu kapal sampai kemudian ikan didaratkan yang kemudian mengalami proses sortasi, pencucian penimbangan, penjualan, setelah itu Ikan akan didistribusikan kepada para pedagang pengumpul, pedagang eceran, maupun dikirim keluar wilayah Bengkulu.¹⁰

2. Aktifitas Pelelangan (Pemasaran) Ikan

Kalau di pelabuhan perikanan pantai Pulau Baai, sistem perikanan yang didaratkan, begitu ikan dibongkar dari kapal kemudian didaratkan. Ikan tersebut kemudian akan ditawarkan kepada para pedagang pengumpul yang

¹⁰Wawancara kepada bapak Nangcik Usman selaku Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan, tanggal 7 Agustus 2020, Pukul 10:30 Wib, di Kantor UPT Pelabuhan Perikanan.

sudah ada sekitar 20 sampai 25 pedagang pengumpul. Pedagang pengumpul kemudian akan melakukan penawaran harga hasil tangkap ikan tersebut kepada pemilik kapal. Setelah itu terjadi negoisasi antar pembeli (pedagang pengumpul dan pemilik kapal sampai disepakati harga yang logis untuk ikan yang didaratkan tersebut. Apabila telah disepakati harga tersebut maka pedagang pengumpul mengambil ikan tersebut dengan cara ditimbang. Banyak jumlah ikan yang ingin dibeli pedagang pengumpul tergantung dari keuangan pedagang pengumpul tersebut.¹¹

Dari hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan dengan Kepala UPTD Pulau Baai aktivitas pelelangan/pemasaran ikan di TPI Pulau Baai dimulai dari ikan Dibongkar kemudian didaratkan maka ikan tersebut akan ditawarkan langsung oleh pedagang pengumpul dengan melakukan negoisasi harga sampai harga disepakati oleh kedua belah pihak. Baru kemudian ikan tersebut di timbang banyak jumlah ikan yang akan dibeli sesuai kemampuan dari keuangan pedangang pengumpul.

Pada Tempat Pelelangan Ikan Pulau Baai tidak mematok harga tertinggi maupun harga terendah Ikan. Harga yang dijual berdasarkan harga yang logis dan wajar sesuai dengan kualitas dari Ikan yang dipasarkan. Sistem pembayaran harga ikan kepada pemilik kapal belum dibayarkan secara langsung, begitu ikan dibeli oleh pedagang pengumpul kepada pemilik kapal uangnya baru bisa dibayarkan kepada pemilik kapal sekitar 2-3 hari.

¹¹Wawancara kepada bapak Nangcik Usman selaku Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan, tanggal 7 Agustus 2020, Pukul 10:35 Wib, di Kantor UPT Pelabuhan Perikanan..

D. Manajemen Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan Pulau Baai Kota Bengkulu untuk Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan:

Adapun pembahasan dalam penelitian ini merupakan data dan fakta yang peneliti kumpulkan langsung dari lapangan yang disesuaikan dengan teori yang peneliti gunakan. Untuk mengetahui manajemen pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan Pulau Baai, peneliti menggunakan teori manajemen dari G.R Terry teori ini memberikan tolak ukur terhadap komponen-komponen penting yang harus dipertimbangkan dalam melakukan suatu manajemen pengelolaan demi mencapai tujuan yang ingin dicapai adapun fungsi manajemen yaitu Perencanaan (*Planning*), pengorganisasian (*Organizing*), Pelaksanaan (*Actuating*), dan Pengawasan (*Controlling*).

1. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan merupakan suatu pendekatan yang terorganisir untuk menghadapi problem-problem di masa yang akan datang dan mereka memberi uraian bahwa planning mengembangkan rencana hari ini untuk tindakan-tindakan mendatang. Planning menjembatani jurang pemisah antara posisi kita sekarang dan tujuan yang ingin dicapai.¹² Perencanaan dapat dianggap sebagai suatu kumpulan keputusan-keputusan, dalam hubungan mana perencanaan tersebut dianggap sebagai tindakan mempersiapkan tindakan-tindakan untuk masa yang akan datang dengan jalan menentukan keputusan.¹³

¹²George R. Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2019), hlm. 61.

¹³George R. Terry, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Bandung: AIUMNI, 2012), hlm. 161

Dalam manajemen pengelolaan tempat pelelangan ikan sangat diperlukan perencanaan yang matang dan terarah, sebagaimana tujuan utama didirikan tempat pelelangan yaitu untuk memberikan pelayanan terhadap nelayan, memperlancar kegiatan pemasaran dengan lelang, selain itu untuk membantu masyarakat mendapatkan ikan bagi kebutuhan penduduk sekitar dengan kualitas yang baik dan membantu nelayan mendapatkan harga yang wajar sehingga dapat membantu menaikkan taraf hidup masyarakat nelayan. Dalam penelitian ini peneliti menanyakan apa rencana yang dibuat untuk mengelolah TPI Pulau baai sebagaimana yang dijelaskan oleh kepala UPTD Pelabuhan Perikanan:

kami, berkeinginan di pelabuhan perikanan ini sistem perencanaan dan pemasaran kami rencanakan sistem perencanaan seperti pelabuhan perikanan yang higienis jadi, begitu ikan didartkan dari kapal kemudian, masuk keruangan sortasi kemudian ada ruang pendingin langsung disortir kemudian para pedagang pengumpul bisa langsung membeli dan megnambil ikan dengan harga yang logis dan layak tetapi komoditi itu tersebut sudah tangani dengan es jadi artinya begitu ikan datang kemudian kita lakukan penangan, setelah ikan ini ditangani baru di jual kepedagang pengumpul atau pembeli yang lain tetapi komoditi itu mutunya bisa dipertahankan sampai ke tangan konsumen..¹⁴

Dari hasil wawancara di atas dapat dianalisis bahwa rencana yang dibuat oleh kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Pulau Baai Bengkulu adalah menyiapkan Pelabuhan Perikanan Yang higienis, sehingga produksi ikan tetap terjaga kualitasnya. Apabila produksi perikanan terjamin mutunya maka harga yang akan diperoleh akan berdampak pada peningkatan pendapatan nelayan.

¹⁴Wawancara kepada bapak Nangcik Usman selaku Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan, tanggal 7 Agustus 2020, Pukul 10:30 Wib, di Kantor UPT Pelabuhan Perikanan.

Kemudian peneliti menanyakan apakah ada peraturan khusus yang mengatur tentang pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan Pulau baai Bengkulu. Menurut kepala UPTD Pelabuhan Perikanan, Bapak Nangcik Usman, S. Pi. MM pada wawancara penelitian mengatakan:

Peraturan adalah PERMEN (Departemen Kelautan dan Perikanan) No.8 tahun 2012. Tentang pengelolaan kepelabuhanan, perikanan di Indonesia. Itulah dasar kami mengelolah pelabuhan perikanan ini. Disana terdapat fungsi-fungsi pelabuhan perikanan ini. Ada fungsi fasilitas pokok, fasilitas fungsional, fasilitas penunjang. Juga ada fungsi-fungsi pelabuhan perikanan ini kalau tidak salah ada sekitar 18 fungsi pelabuhan perikanan ini disamping pelayanan tambat labu, bongkar muat, pelayanan surat persetujuan nelayan, kemudian fungsi sebagai statistik perikanan, pencatatan produksi perikanan, edukasi pendidikan seperti mba-mba ini kan (penelitian, mencari data) terhadap siswa, mahasiswa, memberikan edukasi terhadap masyarakat.¹⁵

Dari wawancara diatas dapat dianalisis bahwa peraturan yang mengatur tentang kepelabuhan sebagaimana pada Peraturan Pemerintah Dinas Kelautan Dan Perikanan No. 8 Tahun 2012. Yang mengatur tentang fungsi fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang. Namun untuk Tempat pelelangan Ikan sendiri tidak ada peraturan khusus. Tidak adanya standar prosedur/SOP yang dibuat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu dalam mengatur terkait teknis pelaksanaan tempat pelelangan ikan.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian merupakan kegiatan dasar dari manajemen dilaksanakan untuk mengatur seluruh sumber-sumber yang dibutuhkan termasuk unsur manusia, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan

¹⁵Wawancara dengan Bapak Nangcik Usman, S. Pi, MM Selaku Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan di Bengkulu, Tanggal 19 Agustus 2020, Pukul 14:00 Wib, di Kantor UPT Pelabuhan dan Perikanan.

sukses. Manusia merupakan unsur yang terpenting, melalui pengorganisasian manusia dapat di dalam tugas-tugas yang saling berhubungan. Tujuan dari pengorganisasian ialah untuk membimbing manusia-manusia bekerjasama secara efektif.¹⁶

Pengorganisasian juga berarti menentukan, mengelompokan dan pengaturan berbagai kegiatan yang dianggap perlu untuk pencapaian tujuan, penugasan orang dalam kegiatan, dengan menetapkan faktor lingkungan fisik yang sesuai dan menunjukkan hubungan kewenangan di limpahkan terhadap individu yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan.¹⁷

Pada Manajemen tempat pengolahan ikan pengorganisasian juga merupakan tahapan penting, pengorganisasian dalam manajemen pengolahan ikan salah satunya berupa pembagian tugas pegawai sesuai dengan pengalaman dan keterampilannya. Namun di tempat pelelangan ikan pulau Baai Bengkulu ini tidak ada struktur organisasi yang jelas seperti yang dijelaskan oleh bapak Nangcik Usman:

pelelangan itu pelelangan mandiri jadi, dikelolah oleh nelayan itu sendiri jadi kami biarkan harga itu memang harga ditingkat nelayan tidak ada peraturan dipihak UPTD pelabuhan perikanan,. Jadi, harga itu emang harga yangberlaku dipasaran. Kami tidak pernah mengatur dan kami tidak pernah memenage atau menunjuk salah satu ketua atau pengurs didalam pelelangan itu jadi kami biarkan nelayan itu secara mandiri untuk melakukan pembelian dan pelelangan. Kami hanya memantau harga-harga berapa sih harga ikan yang dalam hari ini di berikan nelayan pengumpul. Harga jenis ikan layang, ikan layur, tuna, tongkol, cakalang. Walaupun kami tidak ikut dalam manajemen lelang

¹⁶George R. Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen*,

¹⁷Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Bumi Aksara, Jakarta, 2007), hlm. 5.

mandiri yang diselenggarakan oleh pihak nelayan tetapi kami tau informasi pasar. Tidak di atur pelelangan.¹⁸

Dari hasil wawancara diatas dapat di analisis bahwa pada tempat pelelangan ikan di Pulau Baai tidak ada struktur organisasi yang menjelaskan tentang rinci tugas-tugas, jadi sitem lelangnya dilakukan secara mandiri pihak UPTD tidak menunjuk langsung siapa yang menjadi juru timbang, juru angkut dan manajemen pengelolaan lelang, semuanya dilakukan oleh nelayan secara mandiri. Senada dengan yang dijelaskan oleh Rianda:

Disini kekurangannya yakni sistem lelangnya ga ada misal nyakan kayak dipelabuhan lain. disini ga ada seperti manajemen operasional, juru timbang, mereka semua langsung. Mereka yang didalam inilah yang mengatur semuanya. Disini karena pedagangnya sedikit jadi merekalah yang mengontrol bedakan kalo di pelabuhan luar kapal yang datang itu banyak jadi mereka registrasi dulu buat, nomer urut, disini mereka sendiri yang mengatur. Disini pernah diterapkan sistem lelang tapi udah lama ga ada lagi, tidak terlaksana dengan baik, sebenarnya kalo sistem pelelangan peraturan pemerintah 2014 itu mengatakan pembagian wewenang pusat, provinsi dan daerah. Nah, kalo pelelangan ini sebenarnya itu yg mengelolah bagian kabupaten atau kota. Tapi sekarang faktanya ga ada. Manajemen sluruh pelabuhan itu seluruh provinsi. Provinsi yang ini yg handlenya mba. Jadi kota itu Cuma pelelangan aja. Tapi yang di Bengkulu aja ga di adain belum ada gerakannya gitukan, ga ada SOP.¹⁹

Dari wawancara di atas dapat dianalisis bahwa di TPI Pulau Baai Bengkulu tidak ada pembagian tugas secara tetap, lelang dilakukan secara mandiri TPI tidak menunjuk seseorang untuk memanajemen Pelelangan Ikan. Tidak ada juru timbang, juru lelang yang tetap. Semuanya dilakukan oleh nelayan sendiri. Di mana seharusnya dilihat dari aspek pengorganisasian

¹⁸Wawancara dengan Bapak Nangcik Usman, S. Pi, MM Selaku Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan di Bengkulu, Tanggal 7 Agustus 2020, Pukul 10:35 Wib, di Kantor UPT Pelabuhan Perikanan.

¹⁹Wawancara dengan Bapak Rianda Selaku Seksi Staff Operasional Pelabuhan Perikanan Bengkulu, Tanggal 19 Agustus 2020, Pukul 15:00 Wib, di Pelabuhan Perikanan Pulau Baai.

Tempat Pelelangan Pulau Baai sangat di perlukan sistem atau pembagian tugas dan tanggung jawab setiap pekerja. Agar pelelangan ikan di pulau Baai dapat berjalan lancar.

3. Pelaksanaan (*Actualing*)

Pelaksanaan kerja harus sejalan dengan rencana kerja yang telah disusun. Setiap pelaku organisasi harus bekerjasama sesuai dengan tugas, fungsi, peran, keahlian dan kompetensi masing-masing SDM untuk menncapai visi, misi dan program kerja organisasi yang telah ditetapkan. Inti dari *actualing* adalah menggerakkan semua anggota kelompok untuk bekerja agar menjapai tujuan organisasi.²⁰ Pada Tempat Pelelangan Ikan Pulau Baai proses manajemen pengelolaan tempat pelelangan ikan tidak terlepas dari berbagai masalah, terdapat beberapa masalah yang timbul dalam proses pelaksanaan pengelolaan tempat lelang iakan pulau baai, dalam penelitian ini peneliti mencoba mengungkap masalah-masalah yang muncul dalam manajemen pengelolaan tempat lelang ikan Pulau Baai.

Menurut kepala TPI Pulau Baai untuk menjadikan TPI Pulau Baai sesuai dengan fungsinya diajukannya beberapa permohonan kepada dinas kelautan dan perikanan dalam rangka memperbaiki fasilitas-fasilitas TPI agar dapat maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat nelayan. Adapun terkait biaya retribusi pada Tempat Pelelangan Ikan Pulau Baii tidak memungut retribusi dari hasil penangkapan perikanan. Adapun biaya retribusi

²⁰Ikatan Bankir Indonesia, *Strategi Sukses Bisnis Bank*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Indonesia, 2014), hlm. 109.

didapatkan TPI Pulau Baai untuk mengelolah pelelangan dalam bentuk sewa atau jasa, seperti tambat jasa tambat labu, jasa sewa gudang dan jasa penyewaan lahan. Seperti yang dijelaskan oleh kepala UPTD Pelabuhan dan Perikanan sebagai berikut:

Retribusi dari hasil penangkapan itu tidak ada di plabuhan perikanan pulau baai. Tidak ada retribusi sama sekali dari hasil penangkapan Ikan. kami, retribusi perikanan ini dari hasil yang pertama pas masuk yang kedua jasa sewa lahan apabila pedagang pengumpul mau menyewa lahan kemudian jasa sewa gudang, kemudian jasa tambat labu kapalnya. Jadi nelayan itu tambat labu seharusnya rp. 10.000 retribusi yang kami dapatkan dari jasa perikanan. Bukan dari jasa hasil ikannya.²¹

Dari wawancara di atas dapat dianalisis bahwa pada UPTD Pelabuhan dan Perikanan di Tempat Lelang Pulau Baai tidak dipungut biaya retribusi melainkan dalam bentuk jasa sewa yang dibebankan kepada nelayan seperti sewa kapal, sewa tambat labuh dan lain sebagainya, bukan dari hasil perikanan.

Biaya retribusi memiliki target setiap tahunnya yang harus dipenuhi oleh UPTD Pelabuhan dan Perikanan Pulau Baai jika dilihat dari jumlah armada laut yang ada diliwayah Tempat Pelelangan Ikan Pulau Baai dan aktivitas pelelangan ikan Pulau Baai seharusnya target retribusi tersebut dapat terpenuhi. Terkait hasil retribusi UPTD Pelabuhan Perikanan Pulau Baai dapat dilihat dari tabel berikut:

²¹Wawancara dengan Bapak Nangcik Usman, S. Pi, MM Selaku Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan di Bengkulu, Tanggal 7 Agustus 2020, Pukul 10:32 Wib, di Kantor UPT Pelabuhan Perikanan.

Tabel 9**Rekapitulasi Potensi dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2020
UPTD Pelabuhan Perikanan Pulau Baai**

Jenis Penerimaan	Target 2020	Potensi		Realisasi
		Jumlah	Satuan	
Retribusi Pelayanan Pelabuhan	93,511,442	-	-	72.140.000
Pass Masuk kendaraan Bermotor Pelabuhan Perikanan	36,203,128	100	Perhari	31,100,000
Jasa Sewa lahan pelabuhan	28,780,500	5	Perbulan	29,370,000
Jasa Gudang Pelabuhan	16,527,814	2	Perbulan	17,500,000
Jasa Sewa Mess	6,000,000	4	Pertahun	5,800,000
Jasa Tambat Labuh	6,000,000	3	Perhari	7,300,000

Sumber: Data UPTD Pulau Baai

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa target retribusi UPTD Pelabuhan dan Perikanan di TPI Pulau Baai pada tahun 2020 sebesar Rp: 187,022,884. Sementara realisasi retribusi pada tahun 2020 sebesar Rp: 163,210.000. sisa target retribusi yang belum terpenuhi adalah Rp: 23,813,884. Sedangkan target retribusi UPTD Pelabuhan dan Perikanan TPI Pulau Baai yang harus dicapai secara keseluruhan yaitu 100%. Dari hasil wawancara peneliti dapat diketahui bahwa target pencapaian retribusi UPTD Pelabuhan dan Perikanan TPI Pulau Baai adalah satu tahun. Padahal jika dilihat dari jumlah nelayan dan armada yang ada di UPTD Pelabuhan dan Perikanan TPI Pulau Baai target yang diberikan oleh pemerintahan daerah dapat terpenuhi. Jika aktivitas Tempat Pelelangan Ikan terlaksana dengan baik, maka target dan pencapaian retribusi dapat terkumpul dengan maksimal.

Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi terdapat berbagai masalah, kemudian peneliti menanyakan kenapa target retribusi yang diberikan tidak

terpenuhi dalam rentan satu tahun. Padahal jika dilihat dari jumlah nelayan dan armada laut seharusnya target tersebut dapat terpenuhi 100%. Adapun faktor-fktor penghambat nelayan dalam mencari ikan seperti yang dijelaskan oleh kepala UPTD Perikanan sebagai berikut:

Paling banyak itu cuaca iklim, karena dalam satu tahun itu paling 8 bulan, yang pertama kendalanya itu pada saat bulan terang, bulan terng ini sekitar satu minggu dlam satu bulan nah itu tidak bisa fotoaksisfositik kan air itu jadi hidup. Kebanyakan nelayan menggunakan korsen sama bagan. Kedua, cuaca extreme, angin kencang, badai, gelombang tinggi, pengaruh cuaca iklim. Yang ketiga, pengaruh hari besar, mau lebaran, tahun baru ga melaut mereka pulang pada hari-hari besar untuk beristirahat.²²

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa cuaca buruk dapat menjadi faktor penghambat nelayan mencari ikan pada TPI Pulau Baai nelayan masih menggunakan alat tangkap tradisional sehingga cuaca sangat berpengaruh pada hasil penangkapan ikan, selain itu cuaca buruk ditengah laut dapat beresiko pada keselamatan para nelayan. Ketika cuaca buruk tangkapan nelayan juga mengalami penurunan. Dengan kondisi alam yang buruk (cuaca yang extreme) maka penerimaan retribusi akan menurun dikarenakan nelayan tidak berani mencari ikan kerana resiko keselamatan yang mengancam. Kemudian ditambahkan oleh bapak Zaid selaku nelayan di TPI Pulau Baai:

Jika cuaca sedang buruk, seperti hujan badai maka kami tidak akan pergi melaut dikarenakan ombak yang tinggi dan petir sangat berbahaya jika berada di tengah laut. Jadi kami mengganggur menunggu sampai cuaca bagus kembali baru kamu mencari ikan lagi.²³

²²Wawancara dengan Bapak Nangcik Usman, S. Pi, MM selaku Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan di Bengkulu, Tanggal 7 Agustus 2020, Pukul 14:02 Wib, di Kantor UPT Pelabuhan Perikanan.

²³Wawancara dengan Bapak Zaid selaku Masyarakat Nelayan di Tempat Pelelangan Pulau Baai Bengkulu, Tanggal 19 Agustus 2020, Pukul 15:15 Wib, di Gedung Pertemuan Nelayan.

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa cuaca buruk menjadi kendala para nelayan dalam mencari ikan dikarenakan resiko keselamatan yang berbahaya yang menyebabkan nelayan takut melaut mencari ikan. Pada kondisi cuaca yang ekstrim seperti musim hujan dan petir para nelayan menghentikan aktivitas kenelayanan karena dapat membahayakan jiwa para awak kapal, untuk memulai aktivitas mencari ikan kembali para nelayan menunggu sampai cuaca sembaik.

4. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan dapat dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan, mengoreksi penyimpangan-penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dari aktivitas-aktivitas yang direncanakan. Keberhasilan atau kegagalan dinilai dari pencapaian sasaran-sasaran yang ditetapkan. Penilaian mencakup usaha-usaha pengendalian, yakni mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan apabila perlu memperbaiki kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendapatkan kepastian mencapai hasil yang direncanakan.²⁴

Dalam manajemen pengelolaan tempat pelelangan ikan tentu perlu diadakan pengawasan yang berkesinambungan agar dapat meminimalisir masalah-masalah yang akan terjadi, sehingga tempat pelelangan pulau baai dapat beroperasi secara maksimal, ada beberapa cara TPI pulau Baai untuk mengontrol tempat pelelangan ikan sebagaimana yang dijelaskan bapak

²⁴Wawancara dengan Bapak Nangcik Usman, S. Pi, MM Selaku Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan di Bengkulu, Tanggal 7 Agustus 2020, Pukul 10:30 Wib, di Kantor UPT Pelabuhan Perikanan.

Nangcik Usman dalam menjawab pertanyaan peneliti bagaimana cara pengawasan di TPI Pulau Baai:

Dinas kelautan perikanan ini ada UPTD lainnya yaitu LPPMHP namanya laboratorium pengujian mutu hasil perikanan. Secara periodik petugas dari UPTD Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perikanan datang kesini, melakukan control monitoring terhadap mutu hasil ikan yang ada di pelabuhan perikanan. Jangan sampai komoditi perikanan ini, sampai ditangan konsumen tidak layak lagi untuk di konsumsi. Jadi kami selalu memantau agar komoditi ini layak dan mutunya bisa dipertahankan.

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa salah satu cara pengawasan yang ada di tempat pelelangan pulau Baai yaitu dengan melakukan kunjungan kerja. Kunjungan kerja dilakukan oleh Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP) merupakan suatu istintasi dibawah Dinas Kelautan yang berfungsi untuk mengawasi dan membina masyarakat dan pelaku usaha produk hasil perikanan khususnya terkait mutu dan kualitas hasil perikanan. LPPMHP secara periodik datang ke TPI pulau Baai untuk melakukan control monitoring sehingga perikanan yang ada di TPI pulau Baai terjamin mutu dan kualitasnya.

Dalam penelitian ini sebelumnya telah membahas masalah yang muncul di tempat pelelang ikan Pulau Baai yaitu masih dijumpainya kapal-kapal illegal yang berlabuh di pelabuhan perikanan TPI Pulau Baai seperti yang dijelaskan oleh bapak Rianda terkait kendala dalam mengontrol tempat pelelangan ikan:

Kendalanya ada, yang pertama disini ngga apa namanya tu sistemnya itu maksudnya kalo dipelabuhan lain itu mereka melakukan dulu pembukuan dulu, baru kita ngecek sementara disini, mungkin karena

disini belum teratur gitu ya jadi, mereka ini main bongkar-bongkar aja sembarangan kadang juga kapal dari luar datang. Padahal kapal dari luar bukan gaboleh bongkar disini, karenakan itu harus dilihat dari cvnya surat ijinnya itu kan mengatas pelabuhan bongkar itu kan tertulis disitu, kalo pelabuhan bongkarnya tidak tertulis disini ga bisa dia bongkar disini. Masih sering itu saya temukan seperti itu misalnya kapal dari padang masuk kesini, bongkar disini harusnya kan ga boleh seperti itu.²⁵

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa masih sering terdapat kapal-kapal ilegal yang membongkar dan mendistribusikan ikan nya kepada pedagang pengumpul yang ada di tempat pelelangan pulau baai, kapal-kapal tersebut tidak memiliki surat izin dan tidak terdata di UPTD kepelabuhan pulau baai. Sehingga ini menyebabkan kerugian bagi UPTD Pulau Baai sebagaimana yang dijelaskan rianda:

Yang merugikan kami itu yang tidak terdata pertama, dengan cara sendiri-sendiri itu tidak terdata kalo lelangkan terdata. Kadang gini ya mba sabtu minggukan kami libur, seperti besok kamis dan jum'at kan libur tanggal merah dari kamis, jumat, sabtu dan minggu itu yang bongkar ga liat kadang malam juga yang jaga hanya beberapa orang nah, itu mereka kadang ga liat juga bongkar-bongkar malam itu sangat merugikan.²⁶

Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa masuknya kapal-kapal ilegal yang membongkar hasil tangkapannya di pelabuhan perikanan Pulau Baai Bengkulu dapat merugikan karena ikan yang dijual tersebut tidak terdata selanjutnya dari pihak UPTD tidak mendapatkan biaya sewa tambat labuh karena pembongkaran ikannya dilakukan secara diam-diam. Pembongkaran secara ilegal dapat menurunkan pendapatan UPTD pulau Baai.

²⁵Wawancara dengan Bapak Rianda Selaku Seksi Staff Operasional Pelabuhan Perikanan Bengkulu, Tanggal 19 Agustus 2020, Pukul 15:00 Wib, di Pelabuhan Perikanan Pulau Baai.

²⁶Wawancara dengan Bapak Rianda Selaku Seksi Staff Operasional Pelabuhan Perikanan Bengkulu, Tanggal 19 Agustus 2020, Pukul 15:02 Wib, di Pelabuhan Perikanan Pulau Baai.

Kemudian peneliti menanyakan apakah ada penambahan jumlah pengawas atau bekerjasama dengan instansi lain terkait adanya kapal-kapal ilegal yang membongkar dan menjual hasil perikananya, selanjutnya apakah ada sanksi atau denda yang diberlakukan untuk kapal ilegal yang ketahuan berlabuh dan membongkar hasil tangkap ikan di tpi pulau Baai:

Yang mengontrol dan menjaga ada, tapi tidak dilakukan setiap hari apalagi kapal ilegal itu biasanya berlabuh disini sering di malam hari atau pada hari libur, ketika malam hari ada yang menjaga tapi hanya beberapa orang dan itu kadang ga liat ada kapal lain yang bongkar malam-malam. Untuk sanksi atau denda tidak ada karna kami pun kadang tidak tahu bahwa ada kapal ilegal yang berlabuh disini.²⁷

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa kurangnya penjagaan yang ada di tempat pelelangan ikan Pulau Baai, pengontrolan tidak dilakukan setiap hari dan hanya beberapa orang saja sehingga banyak kapal ilegal yang berlabuh di pulau baai. Kurangnya sanksi berupa teguran yang tegas atau denda juga menjadi penyebab banyaknya kapal-kapal ilegal tersebut terus melakukan pembongkaran hasil tangkap ikan di pulau baai.

Senada dengan itu peneliti juga menanyakan pertanyaan kepada para pedagang pengumpul terkait sistem pengawasan yang ada di tempat pelelangan Pulau Baai, sebagai mana yang dijelaskan oleh bapak iis:

iya saya disini setiap hari, apa ga ada penegasan gitu dari kepala perikanan. pengaman memang ada tapi gitu emang ga setiap hari diawasi. Kalo menurut saya ga ada kurang perhatian. Seharusnya kepala perikanan disini memberikan perhatian lebih kepada para

²⁷Wawancara dengan Bapak Rianda Selaku Seksi Staff Operasional Pelabuhan Perikanan Bengkulu, Tanggal 19 Agustus 2020, Pukul 15:03, di Pelabuhan Perikanan Pulau Baai.

nelayan dan fokus pada TPI sehingga kami yang didalam ini di TPI lebih rame itukan bisa menambah penghasilan para nelayan.²⁸

Selain itu peneliti menanyakan hal yang sama terkait kapal illegal yang membongkar muatan di TPI Pulau Baai Bengkulu kepada nelayan di mana hal tersebut dijelaskan oleh bapak Anton:

Saya tidak tahu terkait adanya kapal illegal setau saya tidak ada tapi saya juga tidak memerhatikan apakah ada kapal illegal yang membongkar muatan disini, kapalkan banyak saya juga tidak hafal semua kapal-kapal yang ada disini. Kalo pengawasan sekali-kali ada dari pihak UPTD melihat-lihat kegiatan pembongkaran Ikan tapi tidak setiap hari kalo dari Dinas Kelautan jarang sekali kunjungan kesini dulu ada melakukan seminar pembinaan kepada para nelayan tetapi sekarang tidak ada lagi.²⁹

Dari beberapa hasil wawancara diatas dapat peneliti analisis bahwa Aspek pengawasan di TPI Pulau Baai Provinsi Bengkulu belum berjalan dengan baik disebabkan oleh kurangnya pengawasan dari pihak terkait seperti Dinas Kelautan Perikanan dan Pimpinan TPI Pulau Baai Bengkulu tidak ada upaya dalam perbaikan Sumber Daya Manusia dalam hal menambahkan jumlah Staff dalam melakukan Pengawasan. Kurangnya teguran berupa sanksi yang tegas kepada kapal luar yang tidak tercatat sehingga membuat masalah adanya kapal illegal belum bisa terselesaikan.

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat dianalisis bahwa manajemen pengelolaan ikan di TPI Pulau Baai Kota Bengkulu masih belum berjalan dengan baik adapun beberapa temuan yang dapat peneliti simpulkan selama penelitian penulis jelaskan dalam tabel sebagai berikut:

²⁸Wawancara dengan Bapak Lis Selaku Pedagang Pengumpul di Tempat Pelelangan Ikan Bengkulu, Tanggal 19 Agustus 2020, Pukul 15:15, di Gedung Tempat Pelelangan.

²⁹Wawancara dengan Bapak Anton Selaku Masyarakat Nelayan di Tempat Pelelangan Pulau Baai Bengkulu, Tanggal 19 Agustus 2020, Pukul 15:15 Wib, di Gedung Tempat Pelelangan.

Tabel 10
Temuan Lapangan

No	Fungsi Manajemen	Temuan dilapangan
1.	Perencanaan (<i>Planning</i>)	Aspek perencanaan tidak adanya Peraturan Khusus dalam Manajemen Pengelolaan pelelangan ikan. Tidak ada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang matang untuk Manajemen Pelelangan Ikan Pulau Baai.
2.	Pengorganisasian (<i>Organizing</i>)	Aspek Pengorganisasian Belum berjalan dengan baik karena tidak ada anggaran yang khusus diberikan Dinas Kelautan untuk operasional pelelangan ikan. Kurangnya kerjasama diantara staff karyawan kepelabuhan dan para nelayan yang mengelolah Tempat Pelelangan Ikan dimana tidak ada struktur organisasi di dalam pelelangan ikan sehingga tidak ada yang bertanggung jawab penuh atas tugas dan peran yang ada dipelalangan. Hal tersebut menyebabkan pelelangan tidak berjalan dengan efektif.
3.	Pelaksanaan (<i>Actualing</i>)	Pada Aspek pelaksanaan di TPI Pulau Baai, belum terpenuhinya pendapatan retribusi yang ditargetkan TPI Pulau Baai dalam satu tahun dikarenakan aktivitas TPI belum terlaksana secara maksimal.
4.	Pengendalian (<i>Controlling</i>)	Aspek pengawasan di TPI Pulau Baai Provinsi Bengkulu belum berjalan dengan baik disebabkan oleh kurangnya pengawasan dari pihak terkait seperti Dinas Kelautan Perikanan dan Pimpinan TPI Pulau Baai Bengkulu tidak ada upaya dalam perbaikan Sumber Daya Manusia dalam hal menambahkan jumlah Staff dalam melakukan Pengawasan. Kurangnya teguran berupa sanksi yang tegas kepada kapal luar yang tidak tercatat sehingga membuat masalah adanya kapal illegal belum bisa terselesaikan.

Sumber: Peneliti

E. Analisis Pengelolaan Sistem Lelang Ikan di TPI Pulau Baai Bengkulu Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam.

Ekonomi Islam pada dasarnya merupakan suatu perilaku individu muslim dalam setiap aktivitas ekonominya sesuai dengan tuntutan syariat Islam dalam rangka menjaga dan mewujudkan Maqāṣid Syarī'ahsyari'ah. Adapun tujuan Ekonomi Islam ialah agar terpenuhinya semua kebutuhan manusia bukan hanya satu melainkan seluruh manusia di bumi agar mencapai kesejahteraan sosial. Ekonomi Islam menekankan kepada 4 sifat, antara lain: kesatuan (*unity*), keseimbangan (*equilibrium*), kebebasan (*free will*), dan tanggung jawab (*responsibility*).

Dalam ekonomi Islam transaksi jual beli tidak terlepas dari proses tawar menawar, seperti yang terjadi dalam jual beli lelang dimana pembeli menawar barang dengan harga tertentu, kemudian yang berhak mendapatkan barang tersebut ialah orang yang penawarannya paling tinggi dari harga semula. Mengenai jual beli lelang menambah harga dengan cara tawar menawar diperbolehkan dalam Islam . sebagaimana dijelaskan:

“Dari Anas Radhiyallahu Anhu, ia berkata, Rasulullah Saw, menjual sebuah pelana dan sebuah mangkok air dengan berkata siapa yang mau membeli pelana dan mangkok ini? Seorang laki-laki menyahut: aku bersedia membelinya seharga satu dirham. Lalu Nabi berkata lagi, siapa yang berani menambah? Maka diberi dua dirham oleh seorang laki-laki kepada beliau, lalu dijuallah kedua benda itu kepada laki-laki tadi.” (HR. Tirmidzi).

Dari hadis diatas dapat diketahui bahwa jual beli lelang (*Muzayadah*) sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, jual beli lelang secara tawar menawar boleh dilakukan kecuali telah terjadi kesepakatan maka haram hukumnya bagi

orang ketiga untuk menawar walupun dengan harga yang lebih tinggi. Jual beli lelang diperbolehkan dengan syarat tidak mengandung unsur *gharar* dan tipuan serta jual beli lelang harus berdasarkan asas suka sama suka agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Dalam analisis ekonomi Islam sistem pengelolaan tempat pelelangan ikan Pulau Baai harus memiliki konsep pengelolaan yang berdasarkan prinsip-prinsip Ekonomi Islam: waktu pelaksanaan, sistem administrasi, dan sistem keuangan. Dalam Analisis Ekonomi Islam konsep strategi pengelolaan yaitu: waktu pelaksanaan proses pelelangan ikan yang sesuai yaitu tidak menunda-nunda waktu dalam proses pelaksanaannya. Kedua, sistem administrasi dan teknik pelaksanaannya keuangan menganjurkan dengan sitem yang benar. Ketika harga yang ditentukan dalam proses lelang harus memenuhi unsur keadilan, tidak ada unsur kezhaliman, tidak ada unsur paksaan, dan harus saling meridhoi antara kedua belah pihak.

Dengan adanya tempat pelelangan ikan Pulau Baai Bengkulu memberikan pengaruh yang baik bagi warga sekitar TPI Pulau Baai dampak kehidupan Ekonomi terhadap Keberadan PPI/TPI Pulau Baai Memberikan kesempatan kerja dan membuka berbagai usaha khususnya masyarakat pesisir sekitar PPI/TPI Pulau Baai contohnya:

1. Adanya aktivitas pasar subuh, masyarakat sekitar dapat melakukan jual beli kebutuhan sehari-hari.

2. Munculnya pedagang makanan disekitar TPI Pulau Baai, warung makan ini diisi oleh isteri-isteri para nelayan mereka menjual makanan dan minumam sambari menunggu lelang ikan para nelayan dan pedagang pengumpul dapat beristirahat dan makan di warung yang ada.
3. Munculnya usaha-usaha kecil di sekitar TPI Pulau Baai seperti penyedia BBM, Penyuplai es, penyuplai garam, penyuplai air bersih, Bengkel nelayan yang dapat menambah pendapatan masyarakat sekita PPI/TPI
4. Adanya pekerja bidang jasa, dalam membongkar hasil tangkapan ikan nelayan membutuhkan bantuan orang lain untuk mengangkut ikan. Muncunya para buruh angkut untuk membongkar dan megangkan ikan ke dalam mobil yang digunakan bakul ikan.

Dilihat dari keabsahan jual beli, penulis menganalisa jual beli ikan dengan cara lelang di TPI Pulau Baai Kota Bengkulu, dengan melihat dari sisi rukun dan syarat sahnya jual beli:

1. *Al-muta'qidain* (pihak yang berakad)

Pihak yang berakad (*Al-muta'qidain*) merupakan Pihak-pihak yang sama-sama harus mampu melakukan akad atau dapat bertindak secara hukum (mukallaf), jika belum mampu harus dilakukan oleh walinya. Oleh karena itu, suatu akad yang dilakukan oleh orang kurang waras (gila) atau anak kecil yang belum mukallaf secara langsung hukumnya tidak sah.

Dari hasil pengamatan yang peneliti lakukan pada jual beli lelang ikan di tempat pelelangan Pulau Baai pihak penjual (nelayan) dan pihak pembeli (pedagang pengumpul) sama-sama hadir di tempat (majlis) yang sama.

Penjual dan pembeli adalah orang yang berakal, baligh, *mumayyiz*, yang bisa membedakan baik dan buruk, dan tidak dalam tekanan atau paksaan. Penjualan ikan di TPI Pulau Baai dilakukan langsung oleh pemilik kapal/para nelayan kepada para pembeli. Sehingga masing-masing *muta'qidain* saling mengetahui serta mengetahui objeknya sehingga tidak terjadi *gharar* (krtidakjelasan), dengan begitu akan terjadi ijab dan qabul yang *taradhin* (suka sama suka).

2. *Sigat* (ijab dan qabul)

Sigat (redaksi/ucapan) dalam jual beli adalah segala sesuatu yang menunjukkan kesukarelaan kedua belah pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli).³⁰ Berkaitan dengan *sigat* akad (ijab dan qabul), ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pertama, ijab dan qabul harus dinyatakan oleh orang yang telah mencapai umur tamyiz, yang menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan, sehingga ucapannya itu benar-benar merupakan pernyataan isi hatinya. Kedua, ijab dan qabul harus tertuju pada satu objek yang merupakan objek akad. Ketiga, ijab dan qabul harus berhubungan langsung dalam suatu majelis, apabila kedua belah pihak sama-sama hadir atau sekurang-kurangnya dalam majelis diketahui ada ijab oleh pihak yang tidak hadir.³¹ Adapun *Ijab dan Qabul (Sigat akad)* dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu:

³⁰Nabhani Idris, *Fiqh Empat Madzhab*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 276

³¹Ardito Bhinadi, *Muamalah Syari'ah Hidup Barokah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm.79

- 1) Dilakukan dengan lisan, yaitu dengan menggunakan perkataan atau bahasa yang dapat diketahui/dimengerti oleh kedua belah pihak yang berakad.
- 2) Dengan tulisan, akad dilakukan oleh salah satu pihak yang berakad. cara ini dilakukan apabila salah satu dari kedua belah pihak tidak dapat hadir dalam satu tempat (majelis), atau salah satu dari pihak yang berakad tidak dapat berbicara.
- 3) Dengan isyarat, suatu akad yang dilakukan dengan bahasa isyarat yang dimengerti oleh kedua pihak. Cara ini dilakukan apabila masing-masing dari kedua belah pihak tidak dapat berbicara dan tidak dapat menulis.³²

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan bahwa dalam pelaksanaan pelelangan di TPI Pulau Baai Bengkulu adalah jual beli yang telah memenuhi persyaratan *shighat*. Dalam jual beli lelang ikan di Tempat Pelelangan Ikan Pulau Baai terdapat khayar majlis atau tempat yang dijadikan proses terjadinya transaksi jual beli. Kedua belah pihak penjual (nelayan) dan pembeli (pedagang pengumpul) memiliki hak pilih antara mau meneruskan atau membatalkan jual beli selama masih berada di dalam majlis.

3. *Ma'qud Alaih* (objek akad)

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan berikut:³³

³²Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 66-67.

³³Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2005), hlm. 3320.

- 1) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan *syara'* benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi muslim.
- 3) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan dilaut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual.
- 4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan bahwa ikan yang ada di TPI Pulau Baai sebelum di lelang harus dikelompokkan berdasarkan mutu, kualitas dan ukuran Ikan (besar kecilnya ikan), agar tidak terjadi ketidakpuasan pembeli terhadap ikan yang tidak sesuai dengan mutunya, setelah ikan dikelompokkan baru ikan ditimbang kemudian dimasukkan kedalam keranjang untuk dilakukan pelelangan. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi unsur kezaliman dan spekulasi diantara para penjual dan pembeli selama proses pelelangan.

Mengenai objek dalam jual beli ikan di Tempat Pelelangan Ikan Pulau Baai, keempat syarat dari objek bisa dikatakan terpenuhi seperti, manfaat barang, kesucian barang, barang tersebut sepenuhnya milik dari penjual (nelayan), dan terakhir barang tersebut dapat diserahterimakan. Dengan demikian, dalam sistem lelang ikan di TPi Pulau Baai Penjual dan Pembeli

sama-sama mengetahui gambaran secara sederhana proses pelelangan. Artinya sistem pelelangan ikan di TPI Pulau Baai sudah memenuhi syarat jual beli dengan sah.

Dalam sistem ekonomi Islam, tujuan dari adanya jual beli ialah semata-mata hanya untuk mencari Rahmat Allah SWT, bukan semata-mata hanya untuk mencari keuntungan dan meningkatkan kekayaan. Asumsi dasar dalam Ekonomi Islam ialah penjual dan pembeli sama-sama mempunyai niat untuk saling tolong menolong, saling memudahkan dan meringankan antara kedua belah pihak, serta berperilaku saling jujur. Jual beli lelang di TPI Pulau Baai telah mengarah pada jual beli yang mengajarkan tolong menolong antar sesama. Islam menganjurkan agar hubungan kehidupan masyarakat dapat ditegakkan atas dasar nilai-nilai keadilan, agar terhindar dari tindakan pemerasan yang tidak dianjurkan. Salah satu hal yang mencerminkan hal tersebut adalah tidak ada proses tipuan kepada para nelayan dan pedagang pengumpul. Sistem lelang ikan di TPI Pulau Baai yang sehat tersebut akan merupakan langkah awal yang nantinya akan menjadikan kesejahteraan bagi nelayan.

Dalam melakukan pelelangan ikan TPI Pulau Baai sangat memperhatikan dua hal yang penting: *Pertama*, menyesuaikan harga yang wajar dengan kualitas ikan yang didapatkan, sehingga terdapat kepuasan diantara kedua belah pihak yaitu nelayan dan pembeli. *Kedua*, tingkat kepercayaan yang tinggi antara nelayan dan pembeli dengan demikian adanya kepuasan antara penjual dan pembeli sehingga tidak ada yang merasa kecewa,

sehingga sistem lelang di TPI Pulau Baai selalu berakhir dengan kepuasan. Sistem lelang Ikan di TPI Pulau Baai Bengkulu dilakukan berdasarkan asas kerelaan antara nelayan (pemilik kapal) dan para pedagang pengumpul (pembeli) karena dilakukan berdasarkan prosedur kesepakatan tentang sistem lelang, sehingga menurut pengamatan peneliti tidak ada aturan syariat yang dilanggar oleh pihak TPI Pulau Baai Bengkulu.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti paparkan diatas dapat disimpulkan bahwa permasalahan pada Manajemen Pengelolaan Ikan di Pulau Baai adalah sebagai berikut:

1. Majamen pengelolaan tempat pelelangan ikan Pulau Baai belum berjalan dnegan baik, hal ini dapat dilihat. *Pertama*, dalam sistem Perencanaan, tidak adanya Peraturan Khusus dalam Manajemen Pengelolaan pelelangan ikan. Tidak ada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang matang untuk Manajemen Pelelangan Ikan Pulau Baai. *Kedua*, pada aspek Pengorganisasian Belum berjalan dengan baik karena tidak ada anggaran yang khusus diberikan Dinas Kelautan untuk operasional pelelangan ikan, tidak ada struktur organisasi di dalam pelelangan ikan sehingga tidak ada yang bertanggung jawab penuh atas tugas dan peran yang ada dipelalangan. Hal tersebut menyebabkan pelelangan tidak berjalan dengan efektif. *Ketiga*, pada aspek pelaksanaan di TPI Pulau Baai, belum terpenuhinya pendapatan retribusi yang ditargetkan TPI Pulau Baai dalam satu tahun dikarenakan aktivitas TPI belum terlaksana secara maksimal. *Keempat*, pada sistem pengendalian atau pengawasan kurangnya pengawasan dari pihak terkait seperti Dinas Kelautan Perikanan dan Pimpinan TPI Pulau Baai Bengkulu tidak ada upaya dalam perbaikan Sumber Daya Manusia dalam hal menambahkan jumlah Staff dalam

melakukan Pengawasan. Kurangnya teguran berupa sanksi yang tegas kepada kapal luar yang tidak tercatat sehingga membuat masalah adanya kapal ilegal belum bisa terselesaikan.

2. Praktik jual beli lelang di TPI Pulau Baai sangat memperhatikan dua hal yang penting: *Pertama*, menyesuaikan harga yang wajar dengan kualitas ikan yang didapatkan, sehingga terdapat kepuasan diantara kedua belah pihak yaitu nelayan dan pembeli. *Kedua*, tingkat kepercayaan yang tinggi antara nelayan dan pembeli dengan demikian adanya kepuasan antara penjual dan pembeli. Sistem lelang Ikan di TPI Pulau Baai Bengkulu dilakukan berdasarkan asas kerelaan antara nelayan (pemilik kapal) dan para pedagang pengumpul (pembeli) karena dilakukan berdasarkan prosedur kesepakatan tentang sistem lelang, sehingga menurut pengamatan peneliti tidak ada aturan syariat yang dilanggar oleh pihak TPI Pulau Baai Bengkulu.

A. Saran

1. Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu, UPTD PPI/TPI pelabuhan dan tempat pelelangan ikan Pulau Baai harus membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dalam pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan agar target retribusi dapat terpenuhi.
2. Perlu adanya upaya pembentukan sitem organisasi dan pembagian tugas dengan cara koordinasi pimpinan UPTD dan staff tempat pelelangan ikan dalam menggerakkan dan mengarahkan masyarakat nelayan, dalam pengelolaan tempat pelelangan ikan di Pulau Baai sangat di perlukan sistem

atau pembagian tugas dan tanggung jawab setiap pekerja. Agar pelelangan ikan di pulau Baai dapat berjalan lancar.

3. Saran untuk peneliti selanjutnya dapat menambahkan dan memperluas informan, wilayah atau indikator. Peneliti mengharapkan agar penelitian ini bisa diperbaiki melalui penelitian berikutnya. Karena peneliti menyadari bahwa banyak terdapat kekurangan di dalam penulisan penelitian ini.



Daftar Pustaka

- Abdullah, Boedi, Beni ahmad Saebani., 2014, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Abdullah bin Muhammad., 2017, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah: Dalam Pandangan 4 Mazhab*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif.
- A.I.F. Lubis, A.P.U. Siahaan, dkk., 2018, “Strategy For Improving Science And Welfare Through Community Empowerment Tecknology”, *International Journal Of Civil Engineering And Tegnology (IJCIET)*, Vol. 09, No. 09, September 2018.
- Anita Velentina, Rouli., 2018, “Kebijakan Pembiyaan Bagi Nelayan Tradisional”, *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 47, No. 03, Juli 2018.
- Ahmad, Sarwat., 2018, *Fiqih Jual Beli*, Jakarta: Rumah Fiqih Punlishing.
- Auda, Jasser., 2014, *Al-Maqāṣid Syarī’ahuntuk Pemula (Cet.I)*, Yogyakarta: UIN SUKA Press.
- Azhar Basyir, Ahmad., 2000, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, Yogyakarta: UII Press.
- Badan Perencana Pembangunan Daerah-Daerah Istimewa Yogyakarta, 2014, Yogyakarta.
- Bengkulu BPS, *Provinsi Bengkulu dalam Angka*, dikutip dari Bengkulu, BPS. Go. Id, Pada 24 Desember 2019, pukul 20:39 WIB.
- Bhinadi, Ardito., 2018, *Muamalah Syari’ah Hidup Barokah*, Yogyakarta: Deepublish.
- Brotowidoyo, D Mukayat., 1995, *Pengantar Lingkungan Perairan dan Budidaya Air*, Yogyakarta: Liberty.
- Cahyadinata, Indra, dkk., 2019, “Household Wekfare Of Mud Crab Fishermen In Small Outermost Islands. Case Study: Enggano Island, Bengkulu Province, Indonesia, *AACL Bioflux*, Vol. 12, No. 02, 2019.
- Chapra, Umer., 2000, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Damsar, Indramayu., 2009, *Pengantar Sosiologi Ekonomi*, Jakarta: Prenadamedia Group.

- Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu, 2020.
- Domai, Tjahjanulin., 2010, *Manajemen Keuangan Publik*, Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Eko Purwana, Agung., 2014, *Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal *Justicia Islamica* Vol. 1 No 1, 2014.
- Faried , Annisa Iimi dan Diwayana Putri Nasution., 2018, “Analisis Strategi Peningkatan Kesejahteraan Nelayan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Desa Pahlawan kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara”, *Jurnal Kajian Ekonomi*, Vol. 03, No. 02, Juli 2018.
- Gazali-Al., 2011, *Ihya Ulumiddin: menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama*, Jakarta: Republika.
- Hasibuan, Malayu S.P., 2007, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Hendri., 2003, *Pengantar Ekonomika Makro Islam*, cetakan pertama, Yogyakarta: Ekonisia.
- Humaini, Arif., 2018, “Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Keterampilan Pembuatan *Hand Made* Berbasis Rumah Tangga, *Berdikari*, No. 1, Vol. 6, Februari 2018.
- Ibrahim Abu Sinn, Ahmad., 2006, *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Idris, Nabhani., 2015, *Fiqh Empat Madzhab*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,.
- Ikatan Bankir Indonesia., 2014, *Strategi Sukses Bisnis Bank*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Indonesia.
- Intihanah, Ani Nurul, Siti Zulaikha., 2018, *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest*, Yogyakarta: CV. Gre Publishing.
- Jahan, Khondker Murshed e, dkk., 2014, “Communication Strategis For Managing Coastal Fisheries Conflicts In Bangladesh”, Vol. 32, No. 04, Maret 2014.
- Karim, A Adiwarmam., 2007, *Ekonomi Mikro Islami* , Jakarta: PT GrafindoPersada.

- Kegiatan Rencana Aksi Daerah Pengembangan Ekonomi Kemaritiman di Provinsi Bengkulu, diakses pada tanggal 19 Agustus 2020, pukul, 10:30 Wib.
- Mahdi bin Ibrahim, bin Muhammad Mubjir., 1997, *Amanah dalam Manajemen terjemahan: Rahmad Abas*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Mahfudh, Sahal., 1994, *Nuansa Fiqih Sosial*, Yogyakarta: LKiS Yogyakarta.
- Mahyuddin, Kholish., 2010, *Panduan Lengkap Agribisnis Patin*, Jakarta: Penebar Swadata.
- Manik, Tumpal dan Hadli Lidya Rikayana., 2018, "Pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Kelurahan Kampung Bugis, Tanjung Pinang, *Maritime Empowerment*, No. 1, Vol.1, Tahun 2018.
- Mannan, M. Abdul., 1997, *Ekonomi Islam, Teori dan Praktek*, terj. Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- Metwally., 1995, *Teori dan Model Ekonomi dan Islam*, Jakarta: PT Bangkit Daya Insana, edisi pertama.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dkk., 2014, *Qualitative Data Analisis*, America: SAGE Publications.
- Muhammad., 2005, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia.
- Muhammad., 2002, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- M. Marwan dan Jimmy., 2009, *Kamus Hukum: Dictionary of Law Complate Edition*, Surabaya: Reality Publisher.
- Mshur., 2020, *Filsafat Ekonomi Islam*, Jateng: Lakeisha Anggota IKAPI.
- Moleong, Lexy J., 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Muhajidin, Akhmad., 2014, *Ekonomi Islam: Sejah, Konsep, Negara, dan Pasar*, Jakarta: PT Raja GrafindoPersada.
- Mulyana, Deddy., 2013, *Metode Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muslich., 1997, *Ekonomi Manajerial Alat Strategi Bisnis*, Yogyakarta: Ekonosia, 1997.

- Muslihah., Siti, dkk., 2019, “Dampak Allokasi Dana Desa Terhadap pembangunan Dan Kesejahteraan Masyarakat Desa di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, No. 1, Vol. 7, July 2019.
- Nawawi., 2019, *Metode Penelitian Fiqh dan Ekonomi Syariah*, Malang: Madani Media.
- Nafik Hadi Ryandono, Muhammad., 2018, *Filsafat Ilmu Ekonomi Islam*, Sidoarjo: Zifatama Jawa.
- Nuitja , I Nyoman Sumera., 2010, *Managemen Sumber Daya Perikanan*, Bogor: IPB Press.
- Pedoman Tempat Pelelangan Ikan Pulau Baai Kota Bengkulu dikutip pada tanggal 7 Agustus 2020.
- Pininta., Lisbeth, Dkk., 2018, “Faktor-Faktor Determinan Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Peserta Program Desa Mandiri Pangan Di Provinsi Riau”, *Jurnal Agribisnis*, Vol. 20. No. 01, Juni 2018.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), 2008., *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Rahayu., Sinta, dkk., 2017, “Dinamika Kehidupan Sosial Ekonomi Nelayan Desa Sirnobojo Kabupaten Pacitan Tahun 1998-2014”, *Journal of Indonesian Histori*, Vol. 06, No. 01, Oktober 2017.
- Rahayu, Puji ., 2019, *Profesi Seri Nelayan*, Semarang: ALPRIN.
- Rachmadi., 2020, *Mengikuti lelang di kantor lelang*, Yogyakarta: LeutikaPrio.
- Rencana Aksi Daerah Pengembangan Ekonomi Kemaritiman di Provinsi Bengkulu Tahun 2017.
- Rostiana., Endang, dkk., 2018, *Perencanaan Dan Pengelolaan Keuangan dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera*, Yogyakarta: Diandra Kreatif ANggota IKAPI.
- Sari., Meri Enita Puspita, dkk., 2018, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Hidup Masyarakat Suku Laut Pulau Batam Kota Batam”, *Jurnal Trias Politika*, Vol. 02, No. 02, Oktober 2018.
- Sherraden, Michael., 2006, *Aset Untuk Orang Miskin Perspektif Baru Usaha Pengentasan Kemiskinan*, Jakarta: Fajar Interpretama Offset.

- Sofyan, Riyanto., 2011, *Bisnis Syariah Kenapa Tidak: Pengalaman Penerapan Pada Bisnis Hotel*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Subagiana, I Gede Made, dkk., 2018, “Model Pemberdayaan Ekonomi Pesisir (PEMP) Pada Tiga Perkampungan Nelayan Air Kuning, Pengembangan dan Candi Kusuma Jembrana Propinsi Bali (Suatu Studi Komparatif)”, *Bisnis dan Kewirausahaan*, No. 2, Vol. 14, Juli 2018.
- Sugiyono., 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyowati, Irianto., 2001, *Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia).
- Sumera Nuitja, I Nyoman., 2010, *Managemen Sumber Daya Perikanan*, Bogor: IPB Press, 2010.
- Sunandi, Etis dkk., 2017, Laporan Penelitian: “*Analisis Statistika Deskriptif Dalam Pemetaan Kemiskinan Di Kota Bengkulu*”, (Online), Repository.unib.ac.id, diakses 7 februari 2017, jam 15.53 WIB.
- Sunarlan, Kusnadi., 2018, “The Synergy Of Marine Fishing And The Eco-Tourism Sector As The Solution In Resolving Poverti Of Fishermen”, Vol. 31, No. 2, 2018.
- Taufik., 2013, “Analisis Peran Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar”, *Ilmu Pemerintah*, No. 1, Vol. 6, Januari 2013.
- Terry, R George., 2012, *Asas-Asas Menejemen*, Bandung: Alumni Bandung.
- Terry, R George., 2019, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Terry, R George., 2012, *Dasar-Dasar Manajemen*, Bandung: ALUMNI.
- Tim Revisi Pedoman Tesis Program Studi Magister Ilmu Agama Islam., 2019, *Pedoman Penulisan Tesis*, Yogyakarta: Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
- Tim P3EI UII., 2015, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Triyanti., Riesti, dkk., 2016, “Tingkat Kesejahteraan Nelayan Skala Kecil Dengan Pendekatan Kehidupan Berkelanjutan di Kabupaten Indramayu”, *Jurnal Ekonomi*, Vol. 11, No. 01, Juni 2016.

- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa., 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- TIM P3EI UII., 2012, *Ekonomi Islam*, Cet, ke-12, Jakarta: RajaGrafindo.
- Undang-Undnag Republik Indonesia Nomor 1 Tahun, 2014.
- Usman, Abdul Halim., 2015, *Manajemen Strategi Syariah: Teori Konsep dan Aplikasi*, Jakarta: PT. Bestari Buana Murni.
- Usman, Rachmadi., 2016, *Hukum Lelang*, Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Wahab., 2010, *Perdagangan Nasional*, Jawa tengah: Alptin.
- Yaqin, Ainul., 2018, *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*, Duta Media Publishing.
- Zarka, Anas., 1980, *Islamic Economics: an Approach to Human Welfare*. Dalam Khursid Ahmad (ed). *Studies in Islamic Economics* . Leicester: The Islamic Fondantion.
- Zuhaily, Al-Wahbah., 2005, *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr al- Mu'ashir.

Lampiran 1:

Pedoman Wawancara

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *wawancara* mendalam, garis besar pedoman wawancara pada penelitian ini mengacu pada empat fungsi manajemen Pengelolaan sebagai berikut:

No.	Fungsi Manajemen	Pertanyaan
1.	Planning (Perencanaan)	Apakah rencana yang dibuat untuk mengelola TPI Pulau Baai? Adakah peraturan khusus yang mengatur tentang Pengelolaan TPI Pulau Baai? Apa yang diperlukan untuk mengelola TPI Pulau Baai?
2.	Organizing (Pengorganisasian)	Bagaimana cara mengorganisasikan TPI Pulau Baai? Apakah ada anggaran khusus yang diberikan Dinas Kelautan dan Perikanan, untuk mengorganisasikan TPI Pulau Baai? Selain dari dinas kelautan anggaran didapat dari mana saja?
3.	Actualing (Pelaksanaan)	Apakah ada pengarahan khusus dalam mengelolah TPI misalnya, bapak menunjuk seseorang untuk menjadi coordinator pelaksanaan teknis pelelangan? Apakah ada target untuk mengelolah TPI Pulau Baai? Berapakah pencapaian target tersebut harus dicapai?
4.	Controlling (pengawasan)	Apakah saja yang sudah dilakukan untuk mengontrol TPI Pulau Baai? Apakah saja kendala dalam mengontrol tempat pelelangan ikan?

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Mardian Suryani
Nim : 18913054
Prodi : Ekonomi Islam
Judul Penelitian : Analisis kelembagaan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Wilayah Pulau Baai, Kota Bengkulu.

A. Informan I Pimpinan TPI Pulau Baai Kota Bengkulu

1. Kapan Berdirinya TPI Pulau Baai Kota Bengkulu?
2. Fungsi apa saja yang dilakukan oleh TPI Pulau Baai Kota Bengkulu?
3. Bagaimana sistem lelang ikan di TPI Pulau Baai Kota Kota Bengkulu?
4. Adakah peraturan khusus yang mengatur Pengelolaan TPI?
5. Bagaimana pembayaran bakul yang ikut sistem lelang ikan di TPI Pulau Baai Kota Bengkulu?
6. Bagaimana pembayaran uang hasil lelang kepada nelayan yang ikut lelang ikan di TPI Pulau Baai Kota Bengkulu?
7. Siapa saja yang bisa menjadi bakol (pembeli ikan) pada proses lelang ikan di TPI Pulau Baai Kota Bnegkulu? Adakah ketentuan khusus?
8. Bagaimana perencanaan sistem lelang ikan di TPI Pulau Baai Kota Bengkulu?
9. Bagaimana Pengorganisasian sistem lelang ikan di TPI Pulau Baai Kota Bengkulu?
10. Bagaimana pelaksanaan sisitem lelang ikan di TPI Pulau Baai Kota Bengkulu?
11. Bagaimana pengawasan dalam sistem lelang ikan di TPI Pulau Baai Kota Bengkulu?
12. Bagaimana kebijakan TPI bagi nelayan dan bakol yang melakukan transaksi lelang ikan di TPI Pulau Baai Kota Bengkulu?

B. Informen II Pedagang Pengumpul

1. Bagaimana sistem lelang ikan di TPI Pulau Baai Kota Bengkulu?
2. Bagaimana Pembayaran bakul yang ikut sistem lelang ikan di TPI Pulau Baai Kota Bengkulu?
3. Apa saja keuntungan bagi bapak ketika ikut sistem lelang ikan di TPI Pulau Baai Kota Bengkulu?
4. Apa saja kendala yang dihadapi dalam sistem lelang ikan di TPI Pulau Baai Kota Bengkulu?

C. Informen III Nelayan

1. Bagaimana pendapat bapak dengan sistem lelang ikan di TPI Pulau Baai Kota Bengkulu?
2. Bagaimana pembayaran uang hasil lelang kepada nelayan yang ikut lelang ikan di TPI Pulau Baai Kota Bengkulu?
3. Apa saja keuntungan bagi bapak ketika ikut sistem lelang ikan di TPI Pulau Baai Kota Bengkulu?
4. Apa saja kendala yang dihadapi bapak dalam sistem lelang ikan di TPI Pulau Baai Kota Bengkulu?

Hasil Wawancara:

Wawancara kepada Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan: **Nangcik Usman, S.Pi. MM.**

Pada hari Jum'at tanggal 7 Agustus 2020, pukul 10:30 Wib.

Pewawancara : Bagaimana Sistem Pelelangan Ikan di Pulau baai Kota Bengkulu?

Informen : Kalau di pelabuhan perikanan pantai Pulau Baai, Sistem perikanan yang didaratkan di sini, begitu ikan dibongkar dari kapal kemudian didaratkan. Kemudian ikan ditawarkan kepada pedagang pengumpul jadi sudah ada sekitar 20 sampai 25 pedagang pengumpul. Pedagang pengumpul kemudian akan menawarkan hasil tangkapan ikan tersebut. Nah, terjadi negoisasi antara pembeli dan pemilik kapal disepakati berapa harga yang logis untuk komoditi ikan yang didaratkan tersebut. Apabila telah disepakati harga tersebut didapatkan maka, para pedagang pengumpul mengambil ikan tersebut dengan cara ditimbang jadi, masing-masing pedagang pengumpul mau mengambil beberapa kilo itu tergantung kemampuan keuangan dari pedagang pengumpul. Begitu caranya jadi Harga negoisasi antara pedagang pengumpul pembeli dan pemilik kapal itu.

Pewawancara : kalo harga ada ketetapan dari berapa sampai berapa gitu ngga pak?

Informen : kalo, ketetapan harga, dari UPTD Perikanan tidak ada mematok misalkan harga tertinggi Ikan harga terendah Ikan seperti itu, jadi kami bebaskan saja para pedagang pengumpul dan pedagang pengecer untuk membeli kepada pemilik kapal. Jadi, harga itu harga yang logis dan wajar. Dan sampai saat ini, harga ikan yang ada di pelabuhan erikanan terutama di provinsi Bengkulu juga tidak menyebabkan inflasi seperga harga cabe, harga bawang dll. Kenaikan yang paling tinggi paliing 3-5 Ribu. Jadi, Komuditi perikanan yang ada di plabuhan perikanan menurut catatan dari BPS, tidak menunjukkan Inflasi.

Pewawancara : Kalo sistem pembayarannya dilakukan secara langsung atau adaseperti apa?

Informen : jadi, sistem pembayaran harga ikan kepada pemilik kapal belum dibayarkan secara langsung, begitu ikan dibeli oleh pedagang pengumpul yang ada disitu kepada pemilik kapal uangnya itu

baru bisa dibayarkan kepada pemilik kapal sekitar 2-3 hari baru dibayarkan kepada pemilik kapal. Kenapa begitu, karna pedagang pengumpul ini nantinya ia menjual lagi kepada pedagang pengecer atau dikirim antar kabupaten kota atau antar provinsi setelah ikannya dikirim, dibayar oleh pembelinya baru dibayarkan pedagang pengumpul kepada pemilik kapal. Jadi belum bayar cash saat mengambil ikan. Jadi missal saya mengambil ikan 2 ton belum dibayar saat itu, saya bayar kepada pemilik kapal sekitar dua sampai tiga hari setelah saya dapatkan uang dari pembeli yang dari saya kepada pedagang pengecer.

Pewawancara : Sistem perencanaan TPI Ini sendiri Untuk kedepannya bagaimana pak?

Informen : kami, berkeinginan di pelabuhan perikanan ini sistem perencanaan dan pemasaran kami rencanakan sistem perencanaan seperti pelabuhan perikanan yang higienis jadi, begitu ikan didatkan dari kapal kemudian, masuk keruangan sortasi kemudian ada ruang pendingin langsung disortir kemudian para pedagang pengumpul bisa langsung membeli dan megambil ikan dengan harga yang logis dan layak tetapi komoditi itu tersebut sudah tangani dengan es jadi artinya begitu ikan datang kemudian kita lakukan penanganan, setelah ikan ini ditangani baru di jual kepedagang pengumpul atau pembeli yang lain tetapi komoditi itu mutunya bisa dipertahankan sampai ke tangan konsumen.

Pewawancara : apakah ada retribusi?

Informen : retribusi dari hasil penangkapan itu tidak ada di plabuhan perikanan pelobaai. Tidak ada retribusi sama sekali dari hasil penangkapan Ikan. kami, retribusi perikanan ini dari hasil yang pertama pas masuk yang kedua jasa sewa lahan apabila pedagang pengumpul mau menyewa lahan kemudian jasa sewa gudang, kemudian jasa tambat labu kapalnya. Jadi nelayan itu tambat labu seharinya rp. 10.000 retribusi yang kami dapatkan dari jasa perikanan. Bukan dari jasa hasil ikannya.

Pewawancara : Apakah ada target setiap bulannya?

Informen : hemm, kita rata-rata produksi perlabuhan perikanan ini 10,4 Ton. Itu rata-rata minimal kami ambil rata-rata minimal tapi kadang seringkali terlampaui dari rata-rata itu. 10,4 ton perhari produksi yang didaratkan di pelabuhan perikanan ini. Terutama ikan yang mendominasi beby tuna, tongkol, cakalang, dan ikan layang serta jenis-jenis ikan karang lainnya seperti kerapu, kakap merah, tenggiri dll.

Pewawancara : Bagaimana sistem pengawasan di TPI Pulau Baai?

Informen : dinas kelautan perikanan ini ada UPTD lainnya yaitu LLPMHP namanya laboratorium pengujian mutu hasil perikanan. Secara periodik petugas dari UPTD Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perikanan datang kesini, melakukan control monitoring terhadap mutu hasil ikan yang ada di pelabuhan perikanan. Jangan sampai komoditi perikanan ini, sampai ditangan konsumen tidak layak lagi untuk di konsumsi. Jadi kami selalu memantai agar komoditi ini layak dan mutunya bisa dipertahankan.

Pewawancara : Apakah ada Rintangan dan Hambatan di TPI Pulau Baai?

Informen : kalo saya perhatikan belum ada hambatan yang serius terhadap pelelangan ikan, tapi kami melakukan penyempurnaan-penyempurnaan, misalnya. Adanya tempat penampungan ikan yang bersih, higienis, terus lingkungannya juga bisa dikatakan tidak kotor. Kemudian sarana keranjang ikannya itu benar2 bagus gitu. Budaya nelayannya juga tidak sembarangan melakukan penangkapan ikan. Kita mengharapkan juga para kru penangkapan ikan atau nelayan penangkap ikan kalau pergi menangkap ikan kami harapkan membawa es agar mutu ikannya sampai dipendaratan masih tetap bagus. Kalau ikannya bagus tentunya menguntungkan para nelayan sendiri tentunya mendapatkan harga juga yang tinggi sehingga, tingkat pendapatan juga bisa meningkat. Jadi kalo berangkat itu membawa es membawa barang begitu.

Pewawancara : Apa saja Fasilitas-fasilitas pelelangan disini?

Informen : masih ada yang harus dilakukan perbaikan-perkain terutama pada fasilitas pokok, yaitu dermaga karena untuk mengoprasionalkan pelabuhan itu dipinggir pantai cuaca extreme, angin pantai, kemudian porositasnya atau kalo bahan-bahan dari besi itu cepat berkarat, jadi artinya tingkat pemeliharaannya itu tinggi. Kami harapkan kepada pihak-pihak yang terkait bisa memperhatikan tentang pengiprasian pelabuhan ini, memang oprasionalnya cukup besar.

Pewawancara : Selain menjual disini apakah ada menjual dilain tempat?

Informen : jadi, iakan yang didaratkan dipelabuhan pelobaai ini ynag pertama diambil dulu dari pemilik kapal ditangmpung oleh pedagang pengumpul yang ada. Kemudian, ikan ini selain dipasarkan dipelabuhan juga di pasarkan diantar kabupaten arga makmur, bkl selatan, rejang lebon, kepahiang ada juga yang dipasarkan antar provinsi ke jambi, kepalembang, kelampung seperti itu. Jadi ikan yang ada disini selain dikonsumsi oleh

masyarakat kota. Dan dikonsumsi juga oleh masyarakat diluar provinsi Bengkulu.

Kendala nelayan mungkin adek-adek tahu kalo cuaca ekstrim, bulan terang kan tidak bisa menangkap karena alat tangkap sini banyak menggunakan yang pototaksispositif kalo bulan terang dia tidak bisa menangkap ikan saat bulan gelap dia bisa menangkap ikan karena. Nangkap ikan disini menggunakan lampu, jadi alat penangkap ikannya bagan apung, sama kursen jadi disaat bulan terang ini beradu dia positif sama positif. Hari ini mulai redup bulan mungkin banyak berangkat.

Wawancara:

Wawancara kepada Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan: **Nangcik Usman, S.Pi. MM.**

Pada hari Rabu tanggal **19 Agustus 2020**, pukul **14:00 Wib.**

Planning (perencanaan)

Pewawancara : Apa rencana yang dibuat untuk mengelola TPI?

Informen : untuk Pengelolaan pelabuhan perikanan ini, kedepannya ingin menjadikan tempat pelelangan ikan yang higienis yang ada dipelabuhan perikanan di pulau baai ini, jadi kalo ada TPI yang higienis artinya mutu ikan itu bisa dipertahankan lebih baik. Jadi, ada berupabangunan nanti ditempat TPI itu begitu ikan kita daratkan di dermaga ikan itu masuk dulu ke tpi higienis di prosesing dan bling, dan peer trus di beri penanganan yang baik setelah masuk di tpi higienis baru disalurkan kepedagang pengumpul, itu cara kita kedepan untuk mengelolah pelabuhan perikanan ini.

Pewawancara : Adakah Peraturan Khusus yang mengatur Pengelolaan TPI?

Informen : peraturan adalah PERMENKAPI(Departemen Kelautan dan Perikanan) No.8 tahun 2012. Tentang Pengelolaan kepelabuhanan, perikanan di Indonesia. Itulah dasar kami mengelolah pelabuhan perikanan ini. Disana terdapat fungsi-fungsi pelabuhan perikanan ini. Ada fungsi fasilitas pokok, fasilitas fungsional, fasilitas penunjang. Juga ada fungsi-fungsi pelabuhan perikanan ini kalau tidak salah ada sekitar 18 fungsi pelabuhan perikanan ini disamping pelayanan tambat labu,

bongkar muat, pelayanan surat persetujuan nelayan, kemudian fungsi sebagai statistik perikanan, pencatatan produksi perikanan, edukasi pendidikan seperti mba-mba ini kan (penelitian, mencari data) terhadap siswa, mahasiswa, memberikan edukasi terhadap masyarakat.

Pewawancara : Apakah ada program di TPI Pulau Baai Kota Bengkulu?

Informen : ada programnya, tetapi kami, program itu sebenarnya ada di Dinas Kelautan UPTD ini dibawah Dinas Kelautan Perikanan, jadi program pokoknya itu tertuang di dinas kelautan dan perikanan provinsi Bengkulu nah untuk menjalankan programnya, kami sebagai pembantu kan UPTD sebagai pelayanan kepelabuhanan, dinas itu memiliki tiga UPTD untuk pelayanan teknis. Yang pertama, pelayanan budu daya perikanan, yang kedua pelayanan laboratorium pengujian mutu hasil perikanan, jadi kami menjalankan program dari dinas kelautan perikanan secara teknis ya. Karna kami perpanjangan dari dinas kelautan perikanan untuk memberikan pelayanan teknis jadi hanya pelayanan. Kalo di dinas kebijakan-kebijakan, disini pelayanan.

Pewawancara : Apakah ada Anggaran yang diberikan Dinas Kelautan dan Perikanan, untuk mengorganisasikan TPI?

Informen : hemm.. kalo kita bicara idealis ya heemm boleh dicatat boleh engga ini. Secara idealis memang wajib operasional untuk mempertahankan eksistensi pelabuhan perikanan ini perlu anggaran untuk operasional. Mau tidak mau suka tidak suka karna kita ini, pelanan public contohnya saya disini memegang pelabuhan perikanan seluas lima hektar tiba-tiba air nya mati. Tentunya saya butuh anggaran biar cepat pulih lagi masyarakat tidak mau lama-lama kita itu harus bergerak 24 jam, kemudian tower disana patah akibat cuaca extreme, seng-seng ini banyak yang lepas di lapak-lapak. Kita harus memberikan pelayanan. Seharusnya, kami cepat merehabilitasi fasilitas tersebut. Tetapi kadang-kadang anggaran yang sudah ada itu belum optimal/ mencukupi sehingga, kami mencari mana yang lebih diprioritaskan terlebih dahulu itu yang kami ganti meskipun memang dinas maupun dari kementrian itu snagan care terhadap pelayanan yang ada dipelabuhan perikanan, karena tanpa operesional pelabuhan perikanan ini tidak bisa dijalankan atau tidak bisa dioperasionalkan. Contohnya jaringan listrik, pelayanan surat perstujuan pelayaran. 24 jam harus kami layani tetapi kalo printer kami ga bisa di operasikan apa yang akan kami berikan pelayanan terhadap. Harusnya kami harus memberikan pelayanan cepat, murah, memuaskan atau pelayanan prima

terhadap masyarakat. Jadi, memang diperlukan dana operasional atau harus dianggarkan khusus.

Pewawancara : Selain dari Dinas kelautan anggaran didapat dari mana saja?

Informen : Anggaran ini sebenarnya ada dua, satu dana APBN dari (Kelautan dan perikanan) yang kedua dari APBD dana dari pmda Pemerintah daerah. Jadi ada dua sumber APBN dan APBD.

Pewawancara : Apakah ada Pengarah Khusus dalam mengelolah TPI, misalnya, bapak menunjuk seseorang untuk menjadi coordinator pelaksanaan teknis pelelangan?

Informen : hemm begini ya mba yak arena kami, tidak memungut biaya retribusi dari hasil pelelangan ya, jadi sumber-sumber PADnya itu kami tidak memungut, saat pelelangan itu pelelangan mandiri jadi, dikelolah oleh nelayan itu sendiri jadi kami biarkan harga itu memang harga ditingkat nelayan tidak ada peraturan dipihak UPTD pelabuhan perikanan,. Jadi, harga itu memang harga yang berlaku dipasaran. Kami tidak pernah mengatur dan kami tidak pernah memenage atau menunjuk salah satu ketua atau pengurus didalam pelelangan itu jadi kami biarkan nelayan itu secara mandiri untuk melakukan pembelian dan pelelangan. Kami hanya memantau harga-harga berapa sih harga ikan yang dalam hari ini di berikan nelayan pengumpul. Harga jenis ikan layang, ikan layur, tuna, tongkol, cakalang. Walaupun kami tidak ikut dalam manajemen lelang mandiri yang diselenggarakan oleh pihak nelayan tetapi kami tau informasi pasar. Tidak ada di atur pelelangan.

Pewawancara : kendala fasilitas, prasarana?

Informen : saya lihat dan saya amati ya, fasilitas untuk tambat labu, tidak ada masalah fasilitas bongkar muat juga tidak ada masalah, emm ada kendalanya itu, mungkin pada saat pasak kering atau pasang surut terendah disudut sana sebelah kanan, paling pinggir sana tidak bisa kapal yang diatas 30 ton merapat ke dermaga yang sudut sana kanan. Karena, tipografinya atau permukaan pasis dipelabuhan itu tidak rata. Jadi, disekiri agak dalam disebelah kanan dangkal. Tapi pada posisi pasang surut ya, kalo pasang normal-normal saja tidak ada masalah.

Pewawancara : apa saja yang dibutuhkan dalam proses pelelangan Ikan?

Informen : yang dibutuhkan dalam proses pelelangan ikan itu, sarannya ada keranjang ikan fish.. apanamanya timbangan, kemudian ada kesepakatan harga, harga disepakati hemm ada kepercayaan dari

pihak pemilik kapal terhadap nelayan pengumpul yang mengambil ikannya. Atau yang membeli ikannya pada saat pelelangan sebab misalnya saya mengambil ikan 300 kepada mba, mba percaya dua tiga hari lagi akan dibayarkan, jadi ada rasa tenang ohh mba itu yang ngambil dan pasti akan membayar. Kemudian harga yang disepakati itu emang harga pasaran harga pasaran dalam arti seperti ini mba, jenis ikan misalnya ikan layur atau ikan layar sedang berkurang dipasaran harga disana agak lebih tinggi misalknya dari harga 24k jadi 25k . pada saat ikan itu banyak atau banjir mungkin harga itu bisa turu sekitar 22k, 23k seperti itu. Bukan harga monopoli.

Pewawancara : kalo pedang pengumpul itu sendiri (yang mengambil ikan dari pemilik kapal) itu dia terdaftar atau siapa saja bisa menjadi pedagang pengumpul?

Informen : Itu, gimana ya kalo saya pelajari disini yang mengambil ikan itu kan orang-orang yang punya gudang disini/ pedagang pengumpul yang sudah menetap disini. Jadi setiap hari bergaulnya antara pedagang pengumpul dan pemilik kapal itu udah lama gitu. Jadi kalo sya mendekati pas orang sedang bongkar ikan. Misalnya kita bertiga kesana nah orang sudah tau kita bertiga adalah pedagang pengumpul disini, mempunyai gudang disini dan memang layak diberi ikan kepada nelayan. Bukan tiba-tiba kita datang untuk membeli ikan kepada pemilik kapal itu tidak bisa, rasa kepercayaannya emnag sudah tinggi tidak bisa kita baru satu dua bulan disini mau ngambil ikan tidak bisa. Kita baru bisa mengambil ikan kepada pedagang pengumpul ini tadi, ini pemilik kapal menjual ikan kepada pedagang pengumpul kalo baru satu dua bulan tidak bisa kita mengambil ikan langsung ke pemilik kapal, kita baru bisa mengambil ikan ke pedagang pengumpul ini saja. Dan orang-orang tertentu. bukan mendaftar karena pergaulan sehari-hari disini, sudah menjalin hubungan bertahun-tahun.

Pewawancara : Faktor-faktor penghambat nelayan mencari ikan?

Informen : Paling banyak itu cuaca iklim, karena dalam satu tahun itu paling 8bulan, yang pertama kendalanya itu pada saat bulan terang, bulan terng ini sekitar satu minggu dlam satu bulan nah itu tidak bisa fotoaksisfositik kan air itu jadi hidup. Kebanyakan nelayan menggunakan korsen sama bagan. Kedua, cuaca extreme, angin kencang, badai, gelombang tinggi, pengaruh cuaca iklim. Yang ketiga, pengaruh hari besar, mau lebaran, tahun baru ga melaut mereka pulang pada hari-hari besar untuk beristirahat.

Pewawancara : Dalam pelelangan berari tidak ada struktur organisasi?

Informen : tidak ada, mereka langsung secara mandiri, seperti ini saya pemilik kapal saya membongkar iakan 5ton, saya tawarkan berapa anda mau sekitar 22k,pak susah kami menjualnya nanti akhirnya nego-nego 20.500k perkilo oke. Kemudian ditimbang. Tapi ikannya dibagi-bagi biasanya kan pedagang pengumpul sekitar 15 orang tidak bisa memborong semua ikan. Tidak bisa mendominasi semuanya dapat ikan dibagikan secara merata.

Wawancara:

Wawancara kepada Seksi staf Operasional Pelabuhan Perikanan: **Rianda**

Pada hari Rabu tanggal **19 Agustus 2020**, pukul **15:00 Wib**.

Pewawancara : Kendala dalam mengontrol Pelelangan Ikan?

Informen : Kendalanya ada, yang pertama disini ngga apa namanya tu sistemnya itu maksudnya kalo dipelabuhan lain itu mereka melakukan dulu pembukuan dulu, baru kita ngecek sementara disini, mungkin karena disini belum teratur gitu ya jadi, mereka ini main bongkar-bongkar aja sembarangan kadang juga kapal dari luar datang. Padahal kapal dari luar bukan gaboleh bongkar disini, karenakan itu harus dilihat dari cvnya surat ijinnya itukan mengatas pelabuhan bongkar itukan tertulis disitu, kalo pelabuhan bongkarnya tidak tertulis disini ga bisa dia bongkar disini. Masih sering itu saya temukan seperti itu misalnya kapal dari padang masuk kesini, bongkar disini harusnya kan ga boleh seperti itu.

Pewawancara : Kalo ada kapal dari luar yang membongkar ikan disini itu merugikan tpi?

Informen : Iya merugikan karena, merekakan illegal ya. Maksudnya itu tidak terdata ikannya itu mba.

Pewawancara : berapa lama nelayan mencari Ikan?

Informen : tergantung, kadang zonk misalnyakan lagi dilaut itu sudah habis perbekalannya taunya ikannya juga lagi sepi lgi ga ada ikan, pulang mereka. Jadi nasib-nasiban juga mba. Biasanya kalo ga ada halangan seminggu sudah mendarat mba. Karenakan

tergantung bahan bakarnya juga. Kalo bahan bakarnya habis pulang mereka dapat ga dapat maksimal seminggu lah ditargetkan seminggu.

Pewawancara : Para pedagang pengumpul itu mendaftar atau bagaimana?

Informen : langsung, disini kekurangannya yakan sistem lelangnya ga ada misalnyakan kayak dipelabuhan lain. disini ga ada seperti manajemen operasinal, juru timbang, mereka semua langsung. Mereka yang didalam inilah yang mengatur semuanya. Disini karena pedagangnya sedikit jadi merekalah yang mengontrol bedakan kalo di pelabuhan luar kapal yang datang itu banyak jadi mereka registrasi dulu buat, nomer urut, disi mereka sendiri yang mengatur. Disini pernah diterapkan sistem lelang tapi udah lama ga ada lagi, tidak terlaksana dengan baik, sebenarnya kalo sistem pelelangan peraturan pemerintah 2014 itu mengatakan pembagian wewenang pusat, provinsi dan daerah. Nah, kalo pelelangan ini sebenarnya itu yg mengelolah bagian kabupaten atau kota. Tapi sekarang faktanya ga ada. Manajemen sluruh pelabuhan itu seluruh provinsi. Provinsi yang ini yg handlenya mba. Jadi kota itu Cuma pelelangan aja. Tapi yang di Bengkulu aja ga di adain belum ada gerakannya gitukan, ga ada SOP. Kalo distribusi berjalan dengan baik. Yang merugikan kami itu yang tidak terdata pertama, dengan cara sendiri-sendiri itu tidak terdata kalo lelangkan terdata. Kadang gini ya mba sabtu minggukan kami libur, seperti besok Kamis dan jum'at kan libur tanggal merah dari Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu itu yang bongkar ga liat kadang malam juga yang jaga hanya beberapa orang nah, itu mereka kadang ga liat juga bongkar-bongkar malam itu sangat merugikan.

Pewawancara : Ada biaya retribusi?

Informen : Ada tambat labu itu satu harinya 10k, satu kapal kalo ga lihat itu rugi kitakan, ga dapet retribusinya.

Wawancara:

Wawancara kepada Pedagang Pengumpul: **Lis** Umur 50thn.

Pada hari Rabu tanggal **19 Agustus 2020**, pukul **15:15 Wib.**

Pewawancara : Bagaimana sistem lelang di TPI Pulau Baai Kota Bengkulu?

Informen : ga ada sistem, langsung jual ga ada sistem lelang seperti di lampungan.

Pewawancara : Bagaimana sistem pemyaran pembelian ikan?

Informen : setelah ikan habis baru disetor, jadi ikan dujualkan terlebih dahulu baru ikan distor. Tergantung kalo memang pengurus kapal mau uang cepat ya uangnya lebih cepat lagi di stor. Misalkan butuh duit langsung ditagih walaupun ikannya belum habis.

Pewawancara : keuntungan dari membeli kan di Tpi ini?

Informen : mendapatkan keuntungan dari penjualan ikan itulah.

Pewawancara : Apa saja kendala yang dihadapi dalam sistem lelang ikan di TPI Pulau Baai Kota Bengkulu?

Informen : kendala kalo tahun-tahun ini, terlalu banyak pasar di TPI diluar pasar, dipinggir jalan pasar, jadi orang itu ga fokus ke TPI, izin ga ada inikan TPI pusat pelelangan ikan ga ada sayur mayur iya kan, khusus tempat pelelangan Ikan. Khusus ikan ga ada sayur ga ada cabr ga ada baju, ini semua ada. Jadi sepi di dalam jadi minatnya lebih kesana males ke dalam. Bahkan ini pusat pelelangan ikan disana ada ikan, diluar ada lagi ikan, di tempat jangkar disana pasar lagi. Apa kepala perikanan disini ga ada perhatian? Seperti itu. Seharusnya di depan dipusatkan atau dibikin taman jadi lebih rami lagi orang datang ke TPI. Ini semua ada, sayur ada, cabe ada, jadi itulah dek, kami yang didalam ini sudah seperti kurang hasil gitu mengurangi penghasilan tidak seperti biasanya. Biasanya fokus orang kedalam kalau orang mau beli cabe ya kepasar karna ini TPI bukan pasar.

Pewawancara : Bapak disini setiap hari pak?

Informen : iya saya disini setiap hari, apa ga ada penegasan gitu dari kepala perikanan. Kalo aman cukup aman di Bengkulu pengaman ada tapi emang ga setiap hari diawasi. Yang buat kami menderita di dalam ini ya karna itulah terlalu banyak pasar. Yang seharusnya fokus utamanya di TPI. Kalo menurut saya ga ada kurang perhatian.

Wawancara:

Wawancara kepada Pedagang Pengumpul: **Nurdin** Umur 50thn. Pada hari Rabu tanggal **19 Agustus 2020**, pukul **15:20 Wib**.

Pewawancara : Bagaimana sistem lelang di TPI Pulau Baai Kota Bengkulu?

Informen : ketika iakan didaratkan, ikan kemudian dibongkar dan ditawarkan kepada pedagang pengumpul. Kemudian kami ambil beberpa kilo sesuai kemampuan.

Pewawancara : Bagaimana sistem pemyaran pembelian ikan?

Informen : Pembayaran tidak dilakukan secara langsung, pembayaran dilakukan setelah ikan yang diambil terjual maksimal dua sampai tiga hari baru uang dibayarkan kepada pemilik kapal.

Pewawancara : keuntungan dari membeli kan di Tpi ini?

Informen : mendapatkan ikan dengan harga yang wajar, langsung dari pemilik kapal sehingga mutu ikannya masih terjaga.

Pewawancara : Apa saja kendala yang dihadapi dalam si stem lelang ikan di TPI Pulau Baai Kota Bengkulu?

Informen : sama seperti yang dikatakan pak lis tadi, terlalu banyak pasar di TPI diluar pasar, dipinggir jalan pasar, jadi orang itu ga fokus ke TPI, izin ga ada inikan TPI pusat pelelangan ikan ga ada sayur mayur iya kan, khusus tempat pelelangan Ikan. Khusus ikan ga ada sayur ga ada cabr ga ada baju, ini semua ada. Jadi sepi di dalam jadi minatnya lebih kesana males ke dalam. Bahkan ini pusat pelelangan ikan disana ada ikan, diluar ada lagi ikan, di tempat jangkar disana pasar lagi. Apa kepala perikanan disini ga ada perhatian? Seperti itu. Seharusnya di depan dipusatkan atau dibikin taman jadi lebih rami lagi orang datang ke TPI. Ini semua ada, sayur ada, cabe ada, jadi itulah dek, kami yang didalam ini sudah seperti kurang hasil gitu mengurangi penghasilan tidak

seperti biasanya. Biasanya fokus orang kedalam kalau orang mau beli cabe ya kepasar karna ini TPI bukan pasar.

Pewawancara : Bapak disini setiap hari pak?

Informen : iya saya disini setiap hari, nunggu nelayan karena makin hari disini makin sepi jadi pendapatan untuk pedangang pengumpul kaya saya ini berkurang. Saya berharap semoga ketua upt memfokuskan pada tempat pelelangan ikan bukan pada pasar yang ada di depan-depan. Supaya tpi bisa rame dan pendapatan kita dapat meningkat.



Lampiran 2:

Cover Proposal Tesis

**ANALISIS KELEMBAGAAN DAN PENGELOLAAN TEMPAT
PELELANGAN IKAN UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
NELAYAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI WILAYAH
PULAU BAAI, KOTA BENGKULU**



acc Pembimbing

Oleh :
Mardian Suryani
Nim: 18913054


PROPOSAL TESIS

Diajukan Kepada
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk Memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi

**YOGYAKARTA
2020**

Lampiran 3:

Rekomendasi

 PROGRAM STUDI
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM (S-2)
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lingsi II
Telp. & Fax (0274) 523637 Yogyakarta
e-mail: info@iains

REKOMENDASI

Proposal Tesis : STRATEGI TEMPAT PELELANGAN IKAN PULAU BAAI
BENGKULU UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
NELAYAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Ditulis oleh : Mardian Syryani

NIM : 18913054

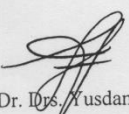
Konsentrasi : Ekonomi Islam


Nilai : 3,6 (A-)

Telah / belum dapat disetujui sebagai Proposal Tesis pada Program Studi Magister Ilmu Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia (PS MIAI FIAI UII) dengan catatan:

- Teori public org. ?
- Strategi ?
- Jenis etnik ?
- SWOT ?

Yogyakarta, 07 Januari 2020
Penguji Seminar Proposal

 (Dr. Drs. Yusdani, M.Ag.)

 (Dr. Anton Priyo Nugroho SE., MM.)

Keterangan Nilai :

A = 3,76 - 4,00	B- = 2,51 - 2,75	C/D = 1,26 - 1,50
A- = 3,51 - 3,75	B/C = 2,26 - 2,50	D+ = 1,01 - 1,25
A/B = 3,26 - 3,50	C+ = 2,01 - 2,25	D = 0,01 - 1,00
B+ = 3,01 - 3,25	C = 1,76 - 2,00	E = 0
B = 2,76 - 3,00	C- = 1,51 - 1,75	

D:\DATA\Akademik\Tesis\RSPT

Lampiran 4:

Surat Izin Penelitian



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

Nomor : 158/PS-MIAI/VII/2020
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 17 Juli 2020

Kepada Yang Terhormat:

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu

di-

TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

NAMA : Mardian Suryani
NIM : 18913054
KONSENTRASI : Ekonomi Islam
HP : 0895410796040

adalah Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses menuju penyusunan Tesis dengan judul: **"Analisis Kelembagaan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Wilayah Pulau Baai Kota Bengkulu"**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada yang bersangkutan guna melakukan Penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.


Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



Lampiran 5:

Surat Izin Melakukan Penelitian dari Dinas Kelautan

**PEMERINTAH PROPINSI BENGKULU**
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Jalan Cendana Nomor. 61 Telp. (0736)- 21477
BENGKULU

Bengkulu, 24 Juli 2020

Nomor : 426 / 5807 / I / 2020
Lampiran : -
Perihal : **Ijin Penelitian**


Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
di_
YOGYAKARTA

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 158/PS-MIAI/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020, perihal Permohonan Izin Penelitian di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu, dengan judul tesis : "**Analisis Kelembagaan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Wilayah Pulau Baai Kota Bengkulu**" dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat menyetujui penelitian tersebut, atas nama :

No	Nama Mahasiswa	Jurusan
1.	Mardian Suryani	Ekonomi Islam

Demikian untuk maklum, atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Bengkulu


I. SRUHARTATI, M.MA
NIP. 19630725 199002 2001

Lampiran 6:

Pengajuan Calon Pembimbing Tesis



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

PENGAJUAN CALON PEMBIMBING TESIS

Nama : Mardian Suryani	No. Mhs. : 18913054
Alamat : Jln. Raden Fatah Satu RT.51 RW.03 Pagar Dewa Kota Bengkulu. Hp. 0895410796040	No. Ujian :
Judul Tesis	ANALISIS KELEMBAGAAN DAN PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN NELAYAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI WILAYAH PULAU BAAI KOTA BENGKULU
Rumusan Masalah	<ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana sistem Kelembagaan dan strategi pengelolaan tempat pelelangan ikan pulau Baai Kota Bengkulu Untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dalam perspektif Ekonomi Islam?2. Bagaimana Efektivitas dari Strategi Tempet Pelelangan Ikan Pulau Baai Bengkulu dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan?

Yogyakarta, 16 Juli 2020

Mengetahui
Ketua,

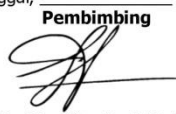
Yang Mengajukan,


(Dr. Dra. Juhanah, MIS)



(Mardian Suryani)


KETERANGAN DARI CALON PEMBIMBING

Uraian :
.....
.....
.....
.....
Tanggal, _____ Pembimbing  (Dr. Drs. Yusdani, M.Ag.)

NB: dibuat rangkap 2
- untuk MIAI-UII
- untuk yang bersangkutan

Lampiran 7:

Surat Telah Melakukan Penelitian

**PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU**
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
UPTD. PELABUHAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU
Jalan Yos Sudarso Telp. (0736)- 51354 Pulau Baai Bengkulu

Nomor : 523.1/164.4/UPTD.PP/2020
Lampiran : -
Perihal : Penelitian Lapangan

Bengkulu, 3 November 2020
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Magister Ilmu
Agama Islam Universitas Islam
Indonesia Yogyakarta
di.
Yogyakarta

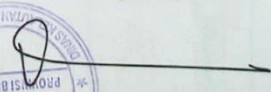
Schubungan telah selesainya di laksanakan Penelitian Lapangan oleh Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta di UPTD. Pelabuhan Perikanan Propinsi Bengkulu dari tanggal 3 Agustus 2020 s/d 3 November 2020. Dengan ini kami sampaikan bahwa selama melaksanakan Penelitian Lapangan Mahasiswa yang bersangkutan telah mengikutinya dengan baik.

Adapun Nama Mahasiswa tersebut :

No	Nama Mahasiswa	NIM
I.	Mardian Suryani	18913054

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala


NANGCIK USMAN, S.Pi, MM
NIP.19670707 199102 1 002

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Bengkulu

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 8:

Foto Dokumentasi



Foto Pengajuan Izin Penelitian Bersama dengan Kepala UPTD Perikanan Nangcik Usman, S.Pi. MM. dan Kepala SUB Bagian Tata Usaha Dra. Siti Aisyah, di Kantor UPT Pelabuhan Perikanan pada hari Rabu Tanggal 15 Juli 2020, Pukul 8:36 Wib.



Foto Wawancara Bersama dengan Kepala UPTD Perikanan Nangcik Usman, S.Pi. MM. di Kantor UPT Pelabuhan Perikanan pada hari Jum'at Tanggal 07 Agustus 2020, Pukul 10:23 Wib.



Foto Wawancara Bersama Kepala SUB Bagian Tata Usaha Dra. Siti Aisyah di Kantor UPT Pelabuhan Perikanan pada hari Senin Tanggal 10 Agustus 2020, Pukul 08:47 Wib.



Foto Pengambilan Data Bersama Kepala Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha Yulita, S.sos di Ruang Administrasi Kantor UPT Pelabuhan Perikanan pada hari Senin Tanggal 7 Agustus 2020, Pukul 10:16 Wib.



Foto Wawancara Bersama masyarakat nelayan, di Gedung Pertemuan Nelayan, pada Hari Minggu Tanggal 27 September 2020 Pukul 10:03 Wib.



Foto Wawancara Bersama Rianda Seksi Staf Operasional Pelabuhan Perikanan Pulau Baai Bengkulu, di Dermaga Pelabuhan Perikanan, pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020, Pukul 13:55 Wib.



Foto Wawancara Kepada Para Pdagang Pengumpul, di Bangsal pasar Tempat Pelelangan Ikan Pulau Baai pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020, pukul 14:03 Wib.



Aktivitas Pasar Pagi tempat para pedagang ecer menjual ikan di depan kantor UPT Pelabuhan Petikanan Pulau Baai.



Aktivitas Bongkar Muat Es di Gudang es Pelabuhan Perikanan Tempat Pelelangan ikan Pulau Baai.



Hasil Tangkap Masyarakat Nelayan yang terdiri dari Ikan Tuna, Ikan Tongkol, Ikan Cakalang, Ikan Layang, Ikan Kembung, Ikan Kakakap dan Ikan Kerapu.



Aktifitas TPI Pulau Baai Kota Bengkulu



Aktivitas Bongkar Muat Ikan dan Pemasaran Hasil Perikanan Rata-Rata 2 Ton Per Hari.



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

No: 124/Perpus/MIAI/XII/2020

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Mardian Suryani
Nomor Induk Mahasiswa : 18913054
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Dosen Pembimbing : Dr. Drs. Yusdani, M.Ag
Fakultas/Prodi : MIAI FIAI UII
Judul Tesis :

Manajemen kelembagaan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan dalam Perspektif Ekonomi Islam di Wilayah Pulau Baai Kota Bengkulu. Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) besar **7 (tujuh persen) %**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 30 Desember 2020
Kaprosdi MIAI



Dr. Junah, MIS

MANAJEMEN KELEMBAGAAN DAN PENGELOLAAN TEMPAT
PELELANGAN IKAN UNTUK MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN NELAYAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI
ISLAM DI WILAYAH PULAU BAAI, KOTA BENGKULU

ORIGINALITY REPORT

7%	7%	0%	2%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	2%
2	es.scribd.com Internet Source	2%
3	bappeda.bengkuluprov.go.id Internet Source	1%
4	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%
5	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
6	kumpulan-makalah-ekonomi- syariah.blogspot.com Internet Source	1%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%

CURUCULLUM VITAE

IDENTITAS DIRI

Nama : Mardian Suryani
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir : Bengkulu, 01 Maret 1996
Agama : Islam
Alamat : Jln. Raden Fatah Satu Rt:51 Rw:03 Pagar Dewa Kota Bengkulu
No. Handphone : 0895410796040
Alamat Email : mardiansuryani1@gmail.com

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Taman Kanak-kanan : TK Bahakti Family Pagar Dewa Kota Bengkulu.
Sekolah Dasar : SDN 74 Kota Bengkulu.
Sekolah Menengah Pertama : SMPN 05 Pagar Dewa Kota Bengkulu.
Sekolah Menengah Atas : SMAN 03 Pagar Dewa Kota Bengkulu.
Perguruan Tinggi (S1) : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.